

Dr. Ujang Mahadi, M.Si.

# Komunikasi Antarbudaya

Strategi Membangun Komunikasi Harmoni  
pada Masyarakat Multikultural



  
PUSTAKA PELAJAR

  
LIRIS BENGKULU PRESS

Dr. Ujang Mahadi, M.Si.

# **Komunikasi Antarbudaya**

**Strategi Membangun Komunikasi Harmoni  
pada Masyarakat Multikultural**



PUSTAKA PELAJAR



LAJIM BENGKULU PRESS



# KOMUNIKASI ANTARBUDAYA

Strategi Membangun Komunikasi Harmoni  
pada Masyarakat Multikultural

Cetakan Pertama • November 2017

Penulis • Dr. Ujang Mahadi, M.Si.

Editor • Dr. Samsudin, M.Pd

Desain isi • Jendro

Desain sampul • Riyanto

Korektor • Risti

Pracetak • Riyanto

Diterbitkan oleh

**PUSTAKA PELAJAR**

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. [0274] 381542 Faks. [0274] 383083

E-mail: [pustakapelajar@yahoo.com](mailto:pustakapelajar@yahoo.com)

Website: [pustakapelajar.co.id](http://pustakapelajar.co.id)

Bekerja sama dengan  
**IAIN Bengkulu Press**

ISBN: 978-602-229-792-5

## PENGANTAR PENULIS

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan buku yang saat ini sedang anda baca. Harapan penulis, buku ini dapat memberikan inspirasi, pencerahan, dan pemahaman, khususnya dalam membangun harmoni kehidupan pada masyarakat Indonesia yang kaya bahasa, beranekaragam budaya, dan penganut agama yang berbeda.

Mengutip pendapat Guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. H. Deddy Mulyana, Ph.D., bahwa "Komunikasi Antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial atau bahkan jenis kelamin". Terinspirasi dari pengertian tersebut, maka buku ini penulis beri judul "KOMUNIKASI ANTARBUDAYA: Strategi Membangun Komunikasi Harmoni pada Masyarakat Multikultural.

Buku ini diramu dari hasil penelitian dan artikel penulis, terdiri dari lima bagian. Bagian satu buku ini tentang "Membangun Harmonisasi dalam Kemajemukan". Isinya lebih menekankan pada komunikasi masyarakat beda agama dalam membangun harmonisasi dan kerukunan hidup. Bagian dua tentang "Dakwah di Tengah Masyarakat Multikultural". Di dalamnya menguraikan etika komunikasi dakwah pada masyarakat yang plural. Bagian tiga tentang "Pemberdayaan Masyarakat



Islam dengan Pendekatan Komunikasi Antarbudaya". Pada bagian ini menjelaskan strategi komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Bagian empat tentang "Pendidikan Multikultural di Pesantren". Di dalamnya membahas komunikasi guru/ustadz kepada santri (peserta didik) dalam menanamkan nilai-nilai multikultural. Bagian lima tentang "Komunikasi Politik Kyai dalam Pilkada". Materinya tentang komunikasi politik, keterlibatan Kyai dalam politik, dan politisi moralis.

Kehadiran buku ini dapat menambah dan memperkaya literatur komunikasi antarbudaya di tanah air dan dapat menjadi bahan kajian dalam kegiatan penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa buku ini masih perlu dikritisi dan mendapat kontribusi pemikiran dari pembaca untuk lebih menyempurnakan dari berbagai aspeknya. Kekurangan yang terdapat dalam buku ini adalah kelemahan penulis, maka penulis membuka diri untuk menerima saran yang terbaik guna perbaikan penerbitan yang akan datang.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Bengkulu beserta jajarannya yang telah berkenan membantu dan mendanai penerbitan buku ini melalui DIPA yang dialokasikan di LPPM. Terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga besar Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Bengkulu. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada istri dan anak-anak tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, keselamatan, rizki yang barokah, ampunan, dan lindungannya, amin.

Bengkulu, Mei 2017  
Ujang Mahadi

# DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS — v

DAFTAR ISI — vii

## BAGIAN 1

### MEMBANGUN HARMONISASI DALAM KEMAJEMUKAN — 1

- A. Pendahuluan — 1
- B. Pluralitas Agama dalam Berbagai Kajian — 7
- C. Teori tentang: Sosiologi, Interaksionisme Simbolik,  
Agama dan Multikultural — 9
- D. Pola Interaksi Masyarakat Beda Agama — 30
- E. Perspektif Sosiologi dan Interaksionisme Simbolik — 41
- F. Faktor Pendukung Harmonisasi Masyarakat  
Beda Agama — 42

## BAGIAN 2

### DAKWAH DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTURAL — 45

- A. Pendahuluan — 45
- B. Pluralitas Masyarakat — 47
- C. Komunikasi Dakwah — 50
- D. Etika Komunikasi Dakwah — 53
- E. Materi, Media dan Metode Dakwah — 56



### **BAGIAN 3**

#### **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM DENGAN PENDEKATAN KOMUNIKASI ANTARBUDAYA — 63**

- A. Pendahuluan — 63
- B. Memahami Hakikat Komunikasi — 64
- C. Budaya dan Multikulturalisme dalam Al-Qur'an — 66
- D. Komunikasi Antarbudaya (KAB) — 69
- E. Pemberdayaan Masyarakat Islam — 73
- F. Komunikasi Efektif dalam Pemberdayaan  
Masyarakat Islam — 75

### **BAGIAN 4**

#### **PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI PESANTREN — 81**

- A. Pendahuluan — 81
- B. Paradigma Pendidikan Multikultural — 87
- C. Ayat-ayat al-Qur'an tentang Perdamaian — 98
- D. Teologi Multikultural — 104
- E. Keberadaan Pondok Pesantren Pancasila — 113
- F. Kyai dan Pemahamannya tentang Multikultural — 121
- G. Pendidikan Multikultural pada Santri — 129

### **BAGIAN 5**

#### **KOMUNIKASI POLITIK KYAI DALAM PILKADA — 135**

- A. Pendahuluan — 135
- B. Kyai dan Perannya di Masyarakat — 140
- C. Keterlibatan Kyai dalam Politik — 143
- D. Agama dan Politik — 146
- E. Komunikasi Politik dan Teori Pendukungnya — 148
- F. Islam, Negara, dan Politisi Moralitas — 152
- G. Tujuan Elit Agama Berpolitik — 157
- H. Polemik dan Tipologi Ustadz Berpolitik — 164

#### **DAFTAR PUSTAKA — 169**

#### **BIODATA PENULIS — 181**

## BAGIAN 1

# MEMBANGUN HARMONISASI DALAM KEMAJEMUKAN

### A. Pendahuluan

Kitab suci al-Qur'an, dalam beberapa ayat menyinggung masalah kemajemukan atau pluralitas, seperti pada surat al-Hujurat ayat 13 dan surat ar-Rum ayat 32.<sup>1</sup> Pluralitas agama,<sup>2</sup> di era globalisasi menjadi karakteristik dari bangsa Indone-

---

<sup>1</sup> "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al-Hujurat: 13). "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. Ar-Ruum: 22).

<sup>2</sup> MUI membedakan antara arti pluralitas dan pluralisme agama. Pluralisme Agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga". Sedangkan, Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara/daerah tertentu terdapat berbagai bentuk pemeluk. Lihat Fatwa MUI dalam majalah *Media Dakwah*, No. 358, Ed. Sya'ban 1426 H/September 2005, hal. 49.



sia yang heterogen. Sehingga tak bisa dipungkiri, pluralitas agama ini memiliki potensi dan peran sangat besar dalam proses integrasi dan pembangunan. Di samping itu, pluralitas agama ini juga mengandung potensi terjadinya konflik, disintegrasi bangsa, ketika melihat masing-masing agama memiliki klaim kebenaran absolut dan muatan emosi keagamaan yang menjadi dasar interaksi primer.<sup>3</sup>

Konflik atas dasar perbedaan agama bisa disebabkan oleh ajaran agama itu sendiri, kualitas moral-spiritual penganutnya, maupun latar belakang budaya, seperti kultur patriarkal atau ikatan primordial yang masih kuat. Secara struktural perbedaan agama tersebut berkaitan erat dengan rasa *insecurity* dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya.<sup>4</sup> Jika memperhatikan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, maka akan terlihat jelas bahwa adanya unsur-unsur agama yang menjadi pemicu dan pelestari konflik. Hal ini dapat dilihat dengan jelas, misalnya pada konflik di daerah Maluku

---

<sup>3</sup> Lihat Andreas Anangguru Yewanggoe, *Agama dan Kerukunan* (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hal. 26.

<sup>4</sup> Menurut Jandra, ada dua fakta yang perlu dikemukakan sehubungan dengan konflik dalam masyarakat yang berlarut-larut. *Pertama*, dalam sejarahnya pertemuan agama-agama dan benturan kadang-kadang tidak terelakkan, karena masalah agama lebih sensitif dibanding dengan yang lainnya. Dalam hubungan antara Islam dengan agama lain, ajaran Islam dengan tegas mengatakan bahwa "bagimu agamamu dan bagiku agamaku" (al-Kafirun: 6) dan pengakuan Nasrani dalam Keputusan Vatikan II awal abad XXI "gereja memandang umat Islam dengan penuh hormat". *Kedua*, bila diamati dalam kurun waktu tiga dekade di penghujung abad XX dan awal abad XXI, ada dua gejala sosial yang muncul ke permukaan, yaitu fenomena sosiokultural yang menggejala pada masyarakat postmodern (*postmodernity*), dan fenomena transmisi global seperangkat "kesadaran dan institusi" modern (sosial, ekonomi, dan budaya) hingga menyentuh masyarakat yang belum modern yang disebut juga "globalisasi". M. Jandra "Pluralisme Agama dan Multikulturalisme: Usaha Mencari Perekat Sosial" dalam Zakiyuddin Baydhadi & M. Toyibi (ed), *Reinvensi Islam Multikultural* (Surakarta: PSB-PS UMS, 2005), hal. 232-233.

yang masih berkepanjangan. Siapa yang berani menyangkal bahwa ada nuansa agama yang kental dalam konflik tersebut, tetapi juga terlalu menyederhanakan masalah apabila dikatakan bahwa konflik Maluku semata-mata adalah masalah agama. Jelas ada masalah-masalah lain yang terkait, tetapi unsur agama telah menyebabkannya menjadi begitu besar dan berkelanjutan. Dalam konflik Maluku yang berkelanjutan, masalah agama tampaknya seperti bensin yang akan turut menyulut kemungkinan terjadinya pertikaian.<sup>5</sup>

Potensi konflik atau disintegrasi ini sangat dalam akibatnya, sangat luas dan besar implikasinya, dan dapat menelan ongkos sosial, politik dan ekonomi yang teramat mahal. Konflik yang dilatarbelakangi oleh faktor agama, lebih berbahaya dibandingkan dengan latar belakang lain. Hal ini disebabkan oleh watak agama itu sendiri yang tidak mengenal batas sosiologis, demografis, maupun geografis. Di samping itu, agama sangat berpengaruh dalam totalitas kepribadian, serta penghayatan pada tingkat lapisan awam.

Kenyataan juga memperlihatkan bahwa agama merupakan suatu sistem yang total. Menurut Koentjaraningrat dengan mengutip pendapat Emile Durkheim,<sup>6</sup> dalam karyanya yang terkenal *Les Formes Elementaires de la vie Religieuse*, menyatakan bahwa ada empat unsur pokok dalam agama, yaitu: emosi keagamaan, sistem kepercayaan, sistem upacara, dan komunitas keagamaan. Emosi keagamaan menyebabkan manusia menjadi religius. Sistem kepercayaan mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan

---

<sup>5</sup> Wahyu Pramudya, "Pluralitas Agama: Tantangan Baru Bagi Pendidikan Keagamaan di Indonesia", *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 6/2 (Oktober 2005), hal. 278.

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, "Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan", (Jakarta: Gramedia, 1978), hal. 136-137.



serta tentang wujud dari alam gaib. Sistem upacara religius bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib, dan kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan dan melakukan sistem upacara-upacara religius.

Dalam hubungan antar komunitas dan emosi keagamaan, akan terbentuk ikatan primer dan solidaritas kelompok, mengingat emosi keagamaan juga merupakan dasar ikatan primer dalam komunitas masyarakat dan sumber dari sentimen kemasyarakatan, di mana kesadaran tentang hubungan itu menjadi paling kuat dan paling mudah disinggung dan dilukai. Sehingga, umat beragama mudah disulut bagi timbulnya konflik yang mengatasnamakan agama.

Sebenarnya, perspektif dimensi agama,<sup>7</sup> mengandung klaim kebenaran yang bersifat universal. Hal ini memungkinkan terjadi ambiguitas dalam interpretasi menurut tingkat pemahaman, penghayatan, dan moralitas-spiritualitas penganutnya. Fenomena ini tampak dalam penggunaan konsep-konsep atau simbol-simbol agama untuk orientasi tertentu ketika melibatkan emosi keagamaan penganutnya. Untuk itu, menghindari konflik atau mewujudkan kerukunan umat beragama merupakan nilai universal. Dengan nilai ini, semua manusia melalui agamanya diharapkan dapat hidup rukun, berdampingan secara damai, saling menghormati, saling toleransi, dan bekerja sama dalam menangani persoalan kemanusiaan.

Kerukunan antar umat beragama menjadi sesuatu yang

---

<sup>7</sup> Agama adalah praktik, keyakinan, dan pengalaman yang berhubungan dengan sistem kepercayaan. Jeff Levin, *God, Faith, and Health Exploring The Spirituality-Healing Connection*, (New York: John Wiley & Son, Inc., 2001), hal. 10.

sangat penting, mendasar dan merupakan satu-satunya pilihan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kerukunan yang mesti dikembangkan bukanlah kerukunan yang artifisial atau verbalis-semantik, tetapi kerukunan yang otentik, dinamis, realistis yang bertolak serta merupakan refleksi dari ajaran agama yang dianut. Kerukunan seperti ini dilandasi kesadaran bahwa walaupun berbeda agama tetapi memiliki kesadaran tanggung jawab dan keterpanggilan untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi semua orang.<sup>8</sup>

Sebagaimana dikemukakan Surya Darma Ali,<sup>9</sup> upaya membangun kerukunan umat beragama itu masih jauh selesai. Oleh karena itu, dalam upaya untuk memperkokoh kerukunan umat beragama, Kementrian Agama sangat berkepentingan akan hadirnya sebuah payung hukum atau regulasi yang mengatur masalah ini, sehingga menjadi rujukan bagi siapa saja dalam merekonstruksi kerukunan umat beragama.

Kehidupan beragama yang dinamis dengan terciptanya kerukunan umat beragama melalui interaksi dan komunikasi harmoni, saling menghormati dan menghargai serta membangun budaya gotong royong dan kebersamaan, tentu saja akan membawa manfaat yang sangat besar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Interaksi sosial,<sup>10</sup> mutlak dilakukan dalam masyarakat. Tidak ada masyarakat yang di dalamnya tidak terjadi interaksi. Interaksi sosial merupakan suatu kewajiban, bahkan me-

---

<sup>8</sup> Weinata Sairin, *"Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Bangsa: Butir-Butir Pikiran"*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), hal. xi.

<sup>9</sup> Lihat dalam Saiful Anam, *"Merekonstruksi Kerukunan yang Hakiki"*, dalam *Majalah Ikhlas Beramal*, Edisi 74, (April 2012), hal. 6.

<sup>10</sup> Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Abu Ahmadi, *"Psikologi Sosial"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 54.



upakan kebutuhan pokok bagi kehidupan setiap insan. Interaksi sosial merupakan bagian yang integral dari kehidupan dalam masyarakat.

Teori interaksi melibatkan masyarakat sebagai proses dinamis, yang menempatkan manusia sebagai pelaku (*actor*) dan penanggung jawab. Terdorong dari dalam batinnya oleh bermacam kebutuhan dan tujuan, manusia mencari kontak dengan orang lain, misalnya kebutuhan fisik dan psikis, sehingga memperlihatkan proses tindakan yang bersifat dinamis pada masyarakat.<sup>11</sup>

Pola interaksi dalam masyarakat dipengaruhi adat istiadat, norma susila, dan berbagai peraturan yang dapat membentuk suatu sistem kehidupan bersama yang saling mengadakan penyesuaian. Dari kelompok masyarakat yang luas, terdapat masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil. Pengeompokan tersebut disebabkan adanya faktor-faktor kepentingan dan tujuan tertentu dalam kelompok.<sup>12</sup>

Tulisan ini diramu dari hasil penelitian tentang "Pola Interaksi Masyarakat Beda Agama di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Pluralitas masyarakatnya bukan saja dari sisi agama tetapi juga suku dan bahasa mereka berbeda. Sebagai gambaran, masyarakat Desa Talang Benuang terdiri dari enam suku, yaitu: suku Serawai, suku Bali, suku Jawa, suku Padang, suku Rejang dan suku Batak. Mayoritas penduduknya adalah suku Serawai dan beragama Islam, selebihnya beragama Hindu dan Kristen.

Keunikan dan menariknya, masyarakat yang plural dengan

---

<sup>11</sup>Susiyanto, "Solidaritas Sosial Cina Muslim dan Non-Muslim dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Edisi Khusus (Juni 2006), hal. 94.

<sup>12</sup>Susiyanto, "Solidaritas Sosial Cina Muslim dan Non-Muslim dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Edisi Khusus (Juni 2006), hal. 94.

berbagai perbedaan suku, bahasa dan agama mereka bisa hidup berdampingan, rukun – damai, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, terbangun budaya gotong royong dan kebersamaan, bahkan masyarakat yang mayoritas beragama Islam (saat penelitian ini dilakukan) dipimpin oleh Kepala Desa yang beragama Hindu.

## B. Pluralitas Agama dalam Berbagai Kajian

Banyak tulisan dan penelitian yang membahas tentang pluralitas agama. Buku yang membahas tentang hal tersebut seperti *“Agama dan Kerukunan”* karya Yewanggoe.<sup>13</sup> Dalam buku tersebut dibahas mengenai bagaimana membangun kerukunan hidup umat beragama yang dilakukan oleh agama Kristen. Buku suntingan Sairin,<sup>14</sup> yang berjudul *“Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-Butir Pemikiran”*. Buku tersebut berisi kumpulan tulisan tentang kerukunan umat beragama dari berbagai perspektif agama. Tulisan Ibrahim,<sup>15</sup> tentang *“Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama”*. Dalam tulisannya, ia menekankan tentang pentingnya penerapan pendidikan multikultur dalam kurikulum pendidikan.

Selanjutnya, tulisan Pramudya,<sup>16</sup> dalam Jurnal Veritas yang berjudul *“Pluralitas Agama: Tantangan Baru Bagi Pendidikan Keagamaan di Indonesia”*. Dalam tulisannya Pramudya mencoba

---

<sup>13</sup> Andreas Anangguru Yewanggoe, *“Agama dan Kerukunan”*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009).

<sup>14</sup> Weinata Sairin, *“Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Bangsa: Butir-Butir Pikiran”*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006).

<sup>15</sup> Ruslan Ibrahim, *“Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama”*, *el-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, No 1 Vol. 1 (2008), hal. 115 – 127.

<sup>16</sup> Wahyu Pramudya, *“Pluralitas Agama: Tantangan Baru Bagi Pendidikan Keagamaan di Indonesia”*, *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 6/2 (Oktober 2005), hal.277– 288.



menganalisis praktik pendidikan agama saat ini dan mencoba mencari satu bentuk pendidikan agama yang cocok di tengah era pluralitas agama. Sedangkan penelitian yang mengupas tentang pluralitas agama seperti yang dilakukan oleh Susiyanto,<sup>17</sup> berjudul "*Solidaritas Sosial Cina Muslim dan Non-Muslim dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya: Studi di Kota Bengkulu*". Penelitiannya menghasilkan simpulan bahwa solidaritas sosial etnik Cina-Muslim dengan Cina nonmuslim di Kota Bengkulu dipengaruhi oleh faktor keluarga dan faktor agama sehingga membentuk ikatan solidaritas yang kuat di antara mereka.

Penelitian tentang "*Model Interaksi Sosial Antarumat Beragama: Studi Kasus Umat Beragama di Pulau Enggano*" dilakukan oleh Zulkarnain S., dkk.<sup>18</sup> Simpulan penelitiannya bahwa masyarakat hidup membaaur dalam pluralitas etnis suku bangsa, sosial dan agama. Secara historis kehidupan masyarakat ini belum pernah mengalami konflik antarumat beragama, kecuali masalah kriminal biasa. Terwujudnya interaksi sosial antarumat beragama tersebut didorong oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Faktor tradisi yang ada sejak nenek moyang mereka dengan sifat gotong-royong dan tolong-menolong. (2) Faktor kekerabatan antar suku bangsa, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. (3) Faktor misi dakwah, yang menekankan aspek kemanusiaan dan pemberdayaan umat. (4) Faktor kerja sama antar tokoh agama, pemimpin adat dan aparat pemerintah. (5) Ada persepsi antar umat agama, bahwa perbedaan agama merupakan masalah yang lazim dan harus

---

<sup>17</sup> Susiyanto, "*Solidaritas Sosial Cina Muslim dan Non-Muslim dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Edisi Khusus (Juni 2006), hal. 84 – 98.

<sup>18</sup> Melalui: < [http: www.dipertais-net/istiqlra/1 st 02-05](http://www.dipertais-net/istiqlra/1%2002-05)> [24/09/2012].

diterima. (6) Tidak adanya provokasi yang menimbulkan perpecahan, baik oleh masyarakat, tokoh agama dan pemimpin maupun pihak ketiga.

### C. Teori tentang: Sosiologi, Interaksionisme Simbolik, Agama dan Multikultural

#### 1. Kajian Sosiologi

##### a. Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.<sup>19</sup> Teori interaksi melibatkan masyarakat sebagai proses dinamis, yang menempatkan manusia sebagai pelaku (*actor*) dan penanggung jawab. Terdorong dari dalam batinnya oleh bermacam kebutuhan dan tujuan, manusia mencari kontak dengan orang lain, misalnya kebutuhan fisik dan psikis, sehingga memperlihatkan proses tindakan yang bersifat dinamis pada masyarakat.<sup>20</sup>

Interaksi sosial di dalam masyarakat terwujud dalam bentuk hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, antara individu dengan kelompok lainnya atau bahkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Masyarakat dapat membangun pola hubungan yang dapat memungkinkan dan menjadikan interaksi sosial di antara mereka terbangun dengan baik dan harmoni.

##### b. Bentuk Interaksi Sosial

Puspito,<sup>21</sup> menyatakan bahwa pada umumnya para ahli

---

<sup>19</sup> Abu Ahmadi, "*Psikologi Sosial*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 54.

<sup>20</sup> Susiyanto, "*Solidaritas Sosial Cina Muslim dan Non-Muslim dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Edisi Khusus, (Juni 2006), hal. 94.

<sup>21</sup> Hendro Puspito, "*Sosiologi Sistematis*", (Yogyakarta: Kanisius, 1989),



sosiologi mengklasifikasikan bentuk dan pola interaksi sosial menjadi dua, yaitu proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang mengarah menggabungkan ditujukan bagi terwujudnya nilai-nilai yang disebut kebajikan-kebajikan sosial seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas dan dikatakan sebagai proses positif. Sedangkan proses sosial menceraikan mengarah kepada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan ini dikatakan proses negatif.

Masih menurut Puspito,<sup>22</sup> bahwa bentuk-bentuk proses sosial asosiatif adalah sebagai berikut:

- 1) Kerja sama, ialah suatu bentuk proses sosial di mana dua atau lebih perorangan atau kelompok mengadakan kegiatan bersama guna mencapai tujuan yang sama. Bentuk ini paling umum terdapat di antara masyarakat untuk mencapai dan meningkatkan prestasi material maupun non material.
- 2) Asimilasi, ialah berasal dari kata latin *assimilare* yang artinya menjadi sama. Definisi sosiologisnya adalah suatu bentuk proses sosial di mana dua atau lebih individu atau kelompok saling menerima pola kelakuan masing-masing sehingga akhirnya menjadi satu kelompok yang terpadu. Mereka memasuki proses baru menuju penciptaan satu pola kebudayaan sebagai landasan tunggal untuk hidup bersama.
- 3) Akomodasi, berasal dari kata latin *acomodare* yang berarti menyesuaikan. Definisi sosiologisnya adalah suatu bentuk

---

hal. 288.

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 230-236.

proses sosial yang di dalamnya dua atau lebih individu atau kelompok berusaha untuk tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau yang sudah ada. Akomodasi ada dua bentuk yaitu toleransi dan kompromi. Bila pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini bersedia menanggung derita akibat kelemahan yang dibuat masing-masing. Bila masing-masing pihak mau memberikan konsesi kepada pihak lain yang berarti mau melepaskan sebagian tuntutan yang semula dipertahankan sehingga ketegangan menjadi kendor disebut kompromi.

Sedangkan bentuk-bentuk disosiatif, menurut Puspito,<sup>23</sup> terdiri dari:

- 1) Persaingan, adalah bentuk proses sosial di mana satu atau lebih individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih cepat dan mutu yang lebih tinggi. Dengan adanya persaingan itu, masyarakat mengadakan seleksi untuk mencapai kemajuan.
- 2) Penghalang (oposisi), berasal dari bahasa latin *opponere* yang artinya menempatkan sesuatu atau seseorang dengan maksud permusuhan. Oposisi adalah proses sosial di mana seseorang atau sekelompok orang berusaha menghalangi pihak lain mencapai tujuannya.
- 3) Konflik, berasal dari bahasa latin *confligere* yang berarti saling memukul. Konflik berarti suatu proses di mana orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Bentuk-bentuk interaksi dapat menguntungkan bila berl-

---

<sup>23</sup> *Ibid* hal 240-247.



angung dalam perhitungan rasional dan mendatangkan keuntungan bagi yang menjalankannya. Akan tetapi dapat menjadi merugikan bila kerja sama dan persaingan atau pertikaian dijalankan berdasarkan emosional dan sentimen yang tidak terkontrol sehingga hasilnya kerap kali membawa kerugian serta kekecewaan.<sup>24</sup>

### c. Faktor-faktor Interaksi Sosial

Interaksi sosial mempunyai hubungan terhadap penafsiran sikap dan pengertian sesama individu dan kelompok. Terjadinya proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan yang bergabung. Faktor-faktor dalam interaksi sosial menurut Soedjono,<sup>25</sup> meliputi:

#### 1) Faktor Peniruan (*imitasi*)

Gejala tiru-meniru atau proses *imitasi* sangat kuat perannya dalam interaksi sosial.<sup>26</sup> Salah satu segi positifnya adalah bahwa *imitasi* dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun imitasi dapat bersifat negatif jika yang ditiru ada-

---

<sup>24</sup> Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, "*Bunga Rampai Sosiologi*", (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1974), hal. 179.

<sup>25</sup> Soedjono, "*Teori Sosiologi*", (Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1982), hal. 78.

<sup>26</sup> Gabriel Tarde menyatakan bahwa seluruh kehidupan sosial itu sebenarnya berdasarkan faktor imitasi saja. Walaupun pendapat ini berat sebelah, namun peranan imitasi dalam interaksi sosial itu tidak kecil. Terbukti misalnya pada anak-anak yang sedang belajar bahasa, seakan-akan mereka mengimitasi dirinya sendiri, mengulang-ulangi bunyi kata-kata, melatih fungsi-fungsi lidah dan mulut untuk berbicara. Kemudian ia mengimitasi kepada orang lain, dan memang sukar orang belajar bahasa tanpa mengimitasi orang lain, bahkan tidak hanya berbahasa saja, tetapi juga tingkah laku tertentu, cara memberi hormat, cara berterima kasih, cara memberi isyarat dan lain-lain. Abu Ahmadi, "*Psikologi Sosial*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 57-58.

lah sifat yang menyimpang. Selain itu *imitasi* juga melemahkan/mematikan kreasi seseorang.

2) Faktor Sugesti

Sugesti,<sup>27</sup> secara psikologis diartikan sebagai suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik. Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi pandangan atau sikap dari dirinya yang kemudian diterima pihak lain. Hal ini hampir sama dengan *imitasi*, hanya sugesti terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh emosinya sehingga menghambat berpikirnya secara rasional.

3) Faktor Identifikasi

Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan. Kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi dapat berlangsung secara sadar maupun tidak sadar dan prosesnya tidak saja bersifat lahiriah, tapi juga bersifat batiniah.<sup>28</sup>

4) Faktor Simpati

Proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan seseorang memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk

---

<sup>27</sup> Ada dua macam sugesti yaitu auto-sugesti dan hetero-sugesti. Auto-sogesti adalah sugesti terhadap diri sendiri sedangkan hetero-sugesti adalah sugesti yang datang dari orang lain. Abu Ahmadi, "*Psikologi Sosial*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 58.

<sup>28</sup> Perbedaan imitasi dan identifikasi adalah kalau imitasi dapat berlangsung antara orang-orang yang tidak saling kenal, sedangkan identifikasi tidak bisa. Buktinya bahwa hubungan sosial yang berlangsung dalam identifikasi lebih mendalam daripada hubungan sosial yang berlangsung dalam sugesti. Abu Ahmadi, "*Psikologi Sosial*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 63.



bekerjasama dengannya. Inilah perbedaan utamanya dengan identifikasi yang didorong oleh suatu keinginan untuk belajar dari pihak lain yang dianggap kedudukannya lebih tinggi dan harus dihormati karena mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemampuan-kemampuan tertentu yang patut dijadikan contoh.

Charles P. Loomis,<sup>29</sup> melihat bahwa ada beberapa ciri-ciri penting dari interaksi sosial, antara lain:

- 1) Jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih.
- 2) Adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
- 3) Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini, dan akan datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung.
- 4) Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh pengamat.

#### d. Norma Sosial dan Aturan dalam Interaksi

Norma sosial tidak akan timbul dengan sendirinya, melainkan terjadi melalui interaksi sosial antara individu di dalam kelompok sosial. Norma sosial senantiasa terjadi bersamaan dengan adanya interaksi manusia di dalam kelompok, dengan kata lain norma sosial adalah hasil dari interaksi sosial antara anggota suatu kelompok.<sup>30</sup>

Surachmad,<sup>31</sup> mengemukakan bahwa yang dimaksud norma sosial tidak lain dari harapan yang diletakkan pada setiap anggota kelompok untuk bertingkah laku menurut kelaziman kelompok sosial itu. Norma sosial merupakan kelakuan

---

<sup>29</sup> Lihat dalam Soleman B. Taneko, "*Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*", (Jakarta: Rajawali, 1984), hal. 114.

<sup>30</sup> Abu Ahmadi, "*Psikologi Sosial*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 109.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 111.

standar yang dijadikan pegangan oleh anggota suatu perkumpulan atau komunitas, anggota perkumpulan itu diharapkan akan mematuhi. Sebagai tingkah laku standar, norma sosial merupakan peraturan yang ditentukan dan disetujui oleh sebagian besar anggota masyarakat mengenai baik tidaknya suatu tingkah laku.

Pada umumnya, norma sosial merupakan garis panduan bagi anggota masyarakat pada waktu menghadapi suatu keadaan tertentu. Penerimaan serta kepatuhan terhadap norma sosial penting untuk mewujudkan perpaduan suatu kelompok atau masyarakat. Beberapa norma sosial yang diterima oleh kebanyakan masyarakat adalah larangan terhadap pembunuhan, pencurian, dan perompakan. Tanpa norma sosial kehidupan manusia akan terganggu dan masyarakat menjadi kacau balau.<sup>32</sup>

Soekanto,<sup>33</sup> menjelaskan bahwa norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, yang sedang, sampai yang terkuat daya ikatnya. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian yaitu:

- 1) Cara (*usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungkannya. Misalnya, orang mempunyai cara masing-masing untuk minum pada waktu bertemu. Ada yang

---

<sup>32</sup> Ting Chew Peh, "Konsep Asas Sosiologi", (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia, 1985), hal. 86.

<sup>33</sup> Soejono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 174.



minum tanpa mengeluarkan bunyi, ada pula yang mengeluarkan bunyi sebagai pertanda rasa kepuasannya menghilangkan kehausan. Pada cara yang terakhir biasanya dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan. Apabila cara tersebut dilakukan juga, maka paling banyak orang yang diajak minum bersama akan merasa tersinggung dan mencela cara minum yang demikian.

- 2) Kebiasaan (*folkways*); mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada "cara". Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Sebagai contoh, kebiasaan memberi hormat kepada orang lain yang lebih tua. Apabila perbuatan tadi tidak dilakukan, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat. Kebiasaan menghormati orang yang lebih tua merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat dan setiap orang akan menyalahkan penyimpangan terhadap kebiasaan umum tersebut. Kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat.
- 3) Tata Kelakuan (*mores*); mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarangnya sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuannya tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Kesusilaan biasanya berhubungan dengan keyakinan agama. Siapa yang melanggar kesusilaan akan diisolir atau disingkirkan oleh masyarakat dan menjadi buah bibir di masyarakat tersebut.

4) Adat-istiadat (*custom*); tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkat kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat-istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat, akan mendapat sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan. Suatu contoh, hukum adat yang melarang terjadinya perceraian antar suami-isteri. Suatu perkawinan dinilai sebagai kehidupan bersama yang sifatnya abadi dan hanya dapat terputus apabila salah satu meninggal dunia (cerai mati). Apabila terjadi perceraian, tidak hanya yang bersangkutan yang tercemar namanya, tapi seluruh keluarga dan bahkan seluruh sukunya. Untuk menghilangkan kecemaran tersebut, diperlukan suatu upacara adat khusus yang membutuhkan biaya besar sekali.<sup>35</sup>

Norma-norma tersebut di atas, setelah mengalami suatu proses, pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Proses tersebut dinamakan proses pelembagaan (*institutionalization*), yaitu suatu proses yang dilewatkan oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Maksudnya ialah sampai norma itu oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai, kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya, interaksi yang berpola itu meliputi pula hal-hal seperti norma-norma, status-status dan tujuan. Selanjutnya meliputi pula kewajiban timbal balik, status timbal balik, tujuan dan makna yang secara timbal balik berarti antara dua atau lebih aktor di dalam kontak yang bersamaan. Dengan demikian

---

<sup>35</sup> Biasanya Negara menyediakan alat pemerintah untuk memaksa anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum ini. Pada umumnya adat istiadat ini lebih bersifat irrasional atas dasar kepentingan masyarakat.



suatu interaksi yang dapat dikatakan berpola memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Adanya pengulangan tindakan.  
Pengulangan yang dilakukan misalnya ucapan selamat atau sapaan setiap kali berjumpa dengan anggota yang lain.
- 2) Adanya hubungan berbalasan.  
Hubungan yang berbalasan diperlihatkan misalnya dengan saling memenuhi kewajiban masing-masing.
- 3) Adanya norma yang mengatur hubungan itu maupun aturan yang disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat, akan memelihara keteraturan hubungan pada masyarakat itu sendiri.

Pola interaksi senantiasa mengacu pada hubungan yang lebih teratur antara individu-individu dan sekaligus dengan dirinya memperlihatkan bahwa gugusan tindakan-tindakan yang dilakukan tidak dengan asal sembarang saja. Individu mengikuti kebiasaan yang teratur ini dalam rangka menyederhanakan dan memudahkan kehidupan sosialnya. Pastilah membingungkan bagi individu bila ia harus memutuskan tindakan apa yang harus ia lakukan pada situasi yang dihadapinya. Sebenarnya lebih mudah baginya mengikuti pola yang telah tersedia. Pada kenyataannya banyak pola-pola yang dikuatkan oleh peraturan-peraturan. Aturan-aturan itu memiliki kuasa legitimasi yang sah untuk mengatur pola-pola hubungan.

## **2. Kajian Interaksionisme Simbolik**

Interaksionisme simbolik mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Bagi perspektif ini, individu bersifat aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramalkan. Paham

ini menolak gagasan bahwa individu adalah organisme pasif yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau struktur yang ada di luar dirinya. Oleh karena individu terus berubah maka masyarakat pun berubah melalui interaksi. Jadi interaksi yang dianggap variabel penting yang menentukan perilaku manusia, bukan struktur masyarakat. Struktur itu sendiri tercipta dan berubah karena interaksi manusia, yakni ketika individu-individu berpikir dan bertindak secara stabil terhadap seperangkat objek yang sama.<sup>36</sup>

Ada tiga premis yang mendasari pemikiran interaksionisme simbolik seperti dikatakan Blumer,<sup>37</sup> yaitu:

- 1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu pada mereka.
- 2) Makna tersebut berasal dari "interaksi sosial seseorang dengan orang lain".
- 3) Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.

Oetomo,<sup>38</sup> mengatakan pentingnya interaksionisme simbolik dalam penyelidikan kualitatif, adalah tekanan jelas pada pentingnya simbol dan proses yang terjadi dalam interaksi sebagai sesuatu yang mendasar untuk memahami perilaku manusia.

Beberapa prinsip yang menjadi inti dari pendekatan inter-

---

<sup>36</sup> Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), "Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 61.

<sup>37</sup> Lihat dalam Engkus Kuswarno, "Fenomenologi: Metodologi Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian", (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hal. 113.

<sup>38</sup> Dede Oetomo, "Penelitian Kualitatif: Aliran dan Tema", dalam Bagong Suyanto & Sutinah. (ed.), "Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan", (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 180.



aksionisme simbolik, seperti dikatakan Ritzer dan Goodman,<sup>39</sup> sebagai berikut:

- 1) Tidak seperti binatang, manusia dibekali kemampuan untuk berpikir.
- 2) Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial.
- 3) Dalam interaksi sosial manusia mempelajari arti dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka yang khusus itu.
- 4) Makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus dan berinteraksi.
- 5) Manusia mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi.
- 6) Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif mereka, dan kemudian memilih satu di antara serangkaian peluang tindakan itu.
- 7) Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok dan masyarakat.

### 3. Kajian Agama

#### a. Pengertian Agama

Agama merupakan suatu institusi penting yang mengatur kehidupan manusia. Istilah agama yang digunakan di sini merupakan terjemahan dari kata *religion*; suatu istilah yang ruang lingkupnya lebih luas daripada istilah agama yang digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang hanya mencakup agama yang diakui pemerintah yaitu: agama Islam,

---

<sup>39</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, "Teori Sosiologi Modern", Cetakan Ketiga. Alih bahasa Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 285.

Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, dan Budha. Untuk menghindari kerancuan antara istilah agama yang digunakan pemerintah dan istilah *religion*, ada ilmuwan sosial yang menerjemahkan istilah *religion* selain agama tersebut di atas, meliputi pula animisme, totemisme, konfusianisme, judaisme, taoisme, menjadi istilah religi. Perhatian terhadap agama telah kita jumpai dalam karya para perintis sosiologi, seperti: Durkheim, Weber, Marx. Durkheim,<sup>40</sup> terkenal karena definisinya mengenai agama, yaitu: "*Religion in a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden – beliefs and practices which unite into one single moral community called a church, all those who adhere to them.*"

Dari definisi tersebut kita dapat melihat bahwa bagi Durkheim agama ialah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, dan bahwa kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Perlu ditambahkan di sini bahwa menurut Durkheim semua kepercayaan agama mengenal pembagian semua benda yang ada di bumi ini, baik yang berwujud nyata maupun berwujud ideal, ke dalam dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu hal yang bersifat profan dan hal yang bersifat suci (*sacred*). Definisi sangat luas ini mencerminkan kesulitan yang dihadapi Durkheim – dan juga para ahli sosiologi sesudahnya – untuk mendefinisikan agama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Giddens, agama lebih luas daripada monotheisme (kepercayaan pada satu Tuhan) dan mencakup pula politeisme; ada agama yang tidak menetapkan aturan moral pada umatnya; ada agama yang

---

<sup>40</sup> Emile Durkheim, "*Suicide; A Study in Sociology*", (New York: Free Press, 1966), hal. 62.



tidak menjelaskan asal-usul alam semesta; dan ada agama yang tidak mengenal kekuatan Adikodrati.

Kita perlu pula memperhatikan pandangan ahli sosiologi agama Robert Bellah, bahwa di luar institusi agama kita mengenal adanya himpunan kepercayaan dan ritual yang dinamakannya *civil religion*. Yang dimaksudkan Bellah ialah kepercayaan dan ritual di luar agama yang dijumpai pada institusi politik seperti pemujaan pemimpin, bendera negara dan lagu kebangsaan serta upacara yang berkaitan dengannya (misalnya, upacara mengheningkan cipta di negara sosialis). Meskipun gejala ini banyak dijumpai pada negara sosialis seperti pemujaan terhadap Karl Marx, Friedrich Engels, Kim Il Sung atau Ketua Mao Zedong, namun menurut Kornblum,<sup>41</sup> upacara penyanyian lagu kebangsaan pada awal pertandingan olah raga atau pengucapan sumpah setia (*pledge of allegiance*) pada awal pelajaran yang dijumpai di Amerika dapat pula dianggap sebagai gejala *civil religion*. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa upacara resmi pada masyarakat kita seperti penghormatan pada lagu kebangsaan dan bendera pusaka serta pembacaan butir Pancasila pada upacara bendera tiap tanggal 17 di kantor pemerintah dalam masyarakat kita pun mengandung unsur *civil religion*.

Karena sukarnya mendefinisikan konsep agama, Light, Keller dan Calhoun,<sup>42</sup> memilih untuk memusatkan perhatian pada unsur dasar yang dijumpai pada agama, yaitu kepercayaan agama, simbol agama, praktik agama, umat agama, dan pengalaman agama. Setiap agama mempunyai kepercayaan, seperti kepercayaan pada satu Tuhan pada agama yang

---

<sup>41</sup> Guy O. Kornblum, "Sociology in a Changing World", (Belmont: Wadsworth, 1988), hal. 500-501.

<sup>42</sup> Suzanne Keller and Craig Calhoun, "Sociology", (McGraw-Hill, 1989), hal. 518-521.

menganut monotheisme, kepercayaan reinkarnasi pada agama Hindu, atau kepercayaan pada roh nenek moyang pada agama Shinto.

Agama pun mengenal berbagai simbol. Pada umat Islam, misalnya, pemakaian selendang bermotif kotak merah putih, tutup kepala berwarna putih atau ikat pinggang lebar berwarna hijau oleh seorang laki-laki sering dianggap sebagai tanda bahwa pemakainya pernah menjalankan ibadah haji, pemakaian busana dengan desain dan warna khusus pada umat Katholik atau Protestan sering kali memungkinkan kita untuk membedakan orang awam dengan rohaniawan. Di India keanggotaan seseorang dalam kasta dalam agama Hindu sering tampak dari busana yang dikenakan.

Setiap agama mengenal pula praktik keagamaan, seperti berdoa, bersembahyang, berpuasa atau pantang bepergian pada waktu tertentu, pantangan makan daging hewan atau daging hewan tertentu, dan sebagainya. Dari sini tampak bahwa di samping mengamati banyaknya orang yang menjadi umat suatu agama maka dalam mempelajari agama kita perlu pula memperhatikan tingkat ketaatan beragama sejauh mana praktik keagamaan dijalankan oleh umat. Dalam hubungan ini kita masih ingat pandangan Geertz yang tidak puas dengan pernyataan bahwa mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam dan kemudian mengungkapkan berbagai variasi praktik keagamaan yang dijumpai di kalangan umat Islam di Jawa.

Penganut tiap agama pun mengenal berbagai bentuk pengelompokan menjadi suatu komunitas keagamaan. Kita kenal, misalnya, adanya komunitas keagamaan yang terdiri atas anggota suatu gereja atau persekutuan do'a tertentu atau warga suatu pesantren atau kelompok pengajian tertentu. Pengalaman keagamaan pun merupakan suatu unsur dasar agama. Tiap agama mengenal berbagai bentuk pengalaman



keagamaan yang dialami penganut agama secara pribadi.

### b. Fungsi Agama bagi Masyarakat

Ketika membahas fungsi agama bagi masyarakat, Horton dan Hun,<sup>43</sup> membedakan antara fungsi manifes dan fungsi laten. Menurut mereka fungsi manifes agama berkaitan dengan segi doktrin, ritual, dan aturan perilaku dalam agama. Namun yang juga penting diketahui adalah fungsi laten agama. Dalam kaitan ini Durkheim terkenal karena pandangannya bahwa agama mempunyai fungsi positif bagi integrasi masyarakat, baik pada tingkat mikro maupun makro. Pada tingkat mikro, menurut Durkheim,<sup>44</sup> fungsi agama adalah: *"..... to make us act, to aid us to live. The believer who has communicated with his god is not merely a man who sees new truth of which the unbeliever is ignorant; he is a man who is stronger"*.

Menurut Durkheim, melalui komunikasi dengan Tuhan orang yang beriman bukan hanya mengetahui kebenaran yang tidak diketahui orang kafir tetapi juga menjadi seseorang yang lebih kuat, sehingga menurutnya fungsi agama ialah untuk menggerakkan kita dan membantu kita dalam hidup. Dari segi makro, agama pun menjalankan fungsi positif karena memenuhi keperluan masyarakat untuk secara berkala menegakkan dan memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjadi ciri dan inti persatuan masyarakat tersebut. Melalui upacara agama yang dilakukan secara berjamaah maka persatuan dan kebersamaan umat dipupuk dan dibina.

Agama juga mempunyai disfungsi, terbukti bahwa pertentangan yang membahayakan keutuhan masyarakat tidak jarang bersumber pada faktor agama. Konflik antara kaum

---

<sup>43</sup> Horton dan Hunt, *"Sociology"*, (London: Prentice Hall Hurnes IV, 1984), hal. 271-272.

<sup>44</sup> Emile Durkheim, *"Suicid: A Study in Sociology"*, (New York: Free Press, 1966), hal. 464.

Katholik dan kaum Protestan di Irlandia Utara, antara kaum Sikh dan kaum Hindu di Negara Bagian Punjab, antara kaum Muslim dan kaum Hindu di Ayodhya, antara orang Palestina yang beragama Islam dan orang Israel yang beragama Yahudi, antara kaum Muslim dan kaum Kristen di Nagorno-Karabach dan antara kaum Syi'ah dan kaum Sunni di Irak dan Pakistan menunjukkan bahwa adanya agama berlainan atau aliran berbeda dalam agama yang sama dalam satu masyarakat dapat membahayakan masyarakat. Pada masyarakat kita sendiri dapat kita lihat, misalnya, pertentangan berkepanjangan antara kelompok penganut agama Islam dan Kristen di Ambon dan daerah lain di Provinsi Maluku.

### c. Agama dan Perubahan Sosial

Para ahli sosiologi agama mengkaji hubungan antara agama dan perubahan sosial. Ada yang berpendapat, misalnya, bahwa agama menghambat perubahan sosial. Pandangan ini tercermin dari ucapan Marx bahwa "agama adalah candu bagi rakyat"; menurutnya karena ajaran agamalah maka rakyat menerima saja nasib buruk mereka dan tidak tergerak untuk berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Pandangan ini ditentang ahli sosiologi lain, yang menunjukkan bahwa dalam banyak masyarakat kaum agama merupakan kekuatan revolusioner yang memimpin gerakan sosial untuk mengubah masyarakat. Contoh yang dapat diajukan untuk mendukung pendapat demikian antara lain, berbagai gerakan perlawanan kaum ulama di tanah air kita terhadap penjajahan Belanda, kepeloporan para rohaniwan Katholik dalam menghadapi diktator dan rezim militer di berbagai negara Amerika Selatan, perlawanan para rohaniwan Katholik di Polandia terhadap rezim komunis, dan gerakan para Ayatollah yang berhasil menjatuhkan rezim Shah Iran. Kita tentu masih ingat pula tesis Weber, yang intinya ialah bahwa perkembangan se-



mangat kapitalisme di Eropa Barat berhubungan secara erat dengan perkembangan etika Protestan.

Dalam banyak masyarakat perubahan sosial sering diiringi dengan gejala sekularisme, yang oleh Giddens,<sup>45</sup> didefinisikan sebagai proses melalui mana agama kehilangan pengaruhnya terhadap berbagai segi kehidupan manusia dan oleh Light, Keller dan Calhoun didefinisikan sebagai proses melalui mana perhatian manusia beserta institusinya semakin tercurahkan, padahal duniawi dan perhatian terhadap hal yang bersifat rohaniah semakin berkurang. Para ahli sosiologi mengemukakan bahwa proses ini sering kali memancing reaksi dari kalangan agama yang dapat berbentuk perlawanan maupun penyesuaian diri. Kisah perlawanan agama terhadap perubahan sosial dapat kita temukan dalam sejarah berbagai masyarakat. Revolusi yang berlangsung di Iran di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini, misalnya, merupakan reaksi terhadap perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat kita telah diiringi dengan peningkatan keagamaan di kalangan umat Islam. Dampak perubahan sosial dapat pula berwujud dalam perubahan pada agama. Bellah, mengemukakan bahwa dalam agama secara bertahap berlangsung evolusi ke arah diferensiasi, ke komprehensifan, dan rasionalitas yang lebih besar.

#### 4. Kajian Multikultural

Dalam konteks kehidupan yang multikultural, pemahaman yang berdimensi multikultural harus dihadirkan untuk memperluas wacana pemikiran keagamaan manusia yang selama ini masih mempertahankan "egosime" keagamaan dan kebudayaan. Haviland,<sup>46</sup> mengatakan bahwa multikultural

---

<sup>45</sup> Anthony Giddens, *"Sociology"*, (Cambridge: Polity Press, 1989), hal. 451.

<sup>46</sup> William A. Haviland, *"Antropologi 2"*, terj., (Jakarta: Erlangga, 1988),

dapat diartikan pula sebagai pluralitas kebudayaan dan agama. Dengan demikian, jika kebudayaan itu sudah plural, maka manusia dituntut untuk memelihara pluralitas agar terjadi kehidupan yang ramah dan penuh perdamaian. Pluralitas kebudayaan adalah interaksi sosial dan politik antara orang-orang yang berbeda cara hidup dan berpikirkannya dalam suatu masyarakat. Secara ideal, pluralisme kebudayaan berarti penolakan terhadap kefanatikan, purbasangka, rasisme, tribalisme dan menerima secara inklusif keanekaragaman yang ada.

Fay,<sup>47</sup> mengemukakan bahwa multikulturalisme menunjukkan suatu yang krusial dalam dunia kontemporer. Dalam dunia multikultural harus mementingkan adanya berbagai macam perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya dan ada interaksi sosial di antara mereka. Para multikulturalis memfokuskan pada pemahaman dan hidup bersama dalam konteks sosial budaya yang berbeda.

Ada tiga nilai yang penting menurut Lawrence,<sup>48</sup> dalam konsep multikultural, yaitu: *pertama*, penegasan identitas kultural seseorang. Identitas kultural seseorang merupakan entitas fundamental dalam kehidupannya, dan itulah yang membedakannya dengan orang-orang di luar dirinya. Walaupun sebagai entitas fundamental dalam kehidupan seseorang, identitas tidak seharusnya eksklusif dan tidak berinteraksi dengan identitas-identitas eksternal, melainkan menampilkan wajah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan

---

hal. 289 – 290.

<sup>47</sup> Brian Fay, *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*, (Massachusetts: Blank Well Publishers Ltd, 1998), hal. 3 – 4.

<sup>48</sup> Lawrence Blum *Anti Rasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi sebuah Masyarakat Multikultural* dalam Larry May (ed.), *Etika Terapan 1 Sebuah Pendekatan Multikultural*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hal. 19 – 20.



beradab yang merupakan tujuan dari pendidikan multikultural. *Kedua*, penghormatan dan keinginan untuk memahami dan belajar dari kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya. Memahami kebudayaan sesama manusia merupakan aspek penting dalam kehidupan di era plural. Kebudayaan orang lain di luar diri dan kelompoknya harus dijadikan kawan dialogis untuk mengetahui kelebihan dan kebenaran yang hadir bersama budaya eksternal tersebut. Kelebihan dan kebenaran yang dibawa oleh budaya luar inilah yang membantu pengembangan budaya internal seseorang. *Ketiga*, perasaan senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Perbedaan adalah rahmat yang diberikan Tuhan kepada umat manusia dengan tujuan berkompetisi meraih kebaikan. Untuk itu, perbedaan harus dihargai dan disenangi bukan dibenci dan dicari-cari kesalahannya, sehingga melahirkan konflik horizontal, sosial, agama.

Dalam konteks kehidupan yang plural, Parekh,<sup>49</sup> mengklasifikasi lima model multikulturalisme, yaitu: *pertama*, multikulturalisme isolasionis" yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Contoh-contoh kelompok ini adalah seperti masyarakat yang ada pada sistem "milled" di Turki Usmani atau masyarakat Amish di A.S. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain pada umumnya. *Kedua*, "multikulturalisme akomodatif", yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi

---

<sup>49</sup> Azyumardi Azra "Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia", melalui: < <http://kongres.budpar.go.id>, > [24 Agustus 2012].

kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Sebaliknya kaum minoritas tidak menentang kultur yang dominan. Kelompok ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa Negara Eropa lainnya. *Ketiga*, "multikulturalisme otonomis" yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Konsen pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. Jenis kelompok ini didukung oleh kelompok Iuebecois di Kanada, dan kelompok-kelompok muslim imigran di Eropa, yang menuntut untuk bisa menerapkan syari'ah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam dan sebagainya. *Keempat*, "multikulturalisme kritis" atau "interaktif", yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu konsen dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara paksa untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya-budaya kelompok-kelompok minoritas. Karena itulah kelompok-kelompok minoritas menantang kelompok kultur dominan, baik secara intelektual



maupun politis, dengan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan sebuah kultur kolektif baru yang *egaliter* secara *genuine*. Jenis kelompok diperjuangkan oleh masyarakat kulit hitam di A.S, Inggris, dan lain-lain. Kelima, "multikulturalisme kosmopolitan", yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu dan begitu juga sebaliknya, secara bebas terlibat di dalam eksperimen-eksperimen *intercultural* dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Pendukung jenis ini biasanya intelektual diasporik dan intelektual liberal yang cenderung pada postmodernis.

#### **D. Pola Interaksi Masyarakat Beda Agama**

Masyarakat Desa Talang Benuang, kendati terdiri dari berbagai suku dan berbeda agama namun partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan masih terbina dengan baik, seperti kegiatan gotong royong, pembangunan sarana ibadah, perayaan HUT RI dan perayaan hari besar keagamaan. Sifat tolong menolong dalam masyarakat cukup tinggi dan kesadaran mereka melaksanakan kewajiban sebagai warga negara juga sangat baik, hal ini dapat di lihat dari ketaatan mereka dalam membayar pajak, partisipasi dalam pemilihan umum, dan kebersamaan mereka dalam menjaga keamanan, membangun harmonisasi dan kerukunan hidup.

Adat istiadat, budaya dan kesenian masih tetap dipelihara dan dilestarikan masyarakat, seperti: marhaban (*barzanji*), mengantar dan menerima leman dalam pernikahan (bagi mereka yang beragama Islam). Begitu juga dengan masyarakat Bali, mereka masih mempertahankan dan melestarikan budaya mereka, seperti memperingati galungan.

Kendati terdapat berbagai suku dan berbeda dalam keyakinan, mereka hidup berdampingan dan saling menghormati. Jumlah suku yang ada secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
Penduduk Desa Talang Benuang Berdasarkan Suku

Nomor	Suku	Jumlah Orang
1	Serawai	1.166
2	Rejang	21
3	Jawa	25
4	Bali	402
5	Padang	23
6	Batak	3
	Jumlah	1.640

Sumber: Buku Profil Desa Talang Benuang 2012.

Agama merupakan bagian yang sangat mendasar dan terpenting dalam kehidupan manusia, karena agama sebagai pedoman hidup sarat dengan nilai yang mengajarkan manusia agar berbuat baik, menjauhi perbuatan tercela, peduli dengan sesama dan membangun harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Talang Benuang berjalan sesuai keyakinan/agama yang mereka anut. Ada tiga macam agama yang dianut masyarakat, yaitu Islam, Hindu dan Kristen Protestan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2**  
Penduduk Desa Talang Benuang Berdasarkan Agama

Nomor	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	1.235
2	Hindu	402
3	Kristen Protestan	3
	Jumlah	1.640

Sumber: Buku Profil Desa Talang Benuang 2012.



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Talang Benuang yang beragama Islam jumlahnya lebih banyak bila dibandingkan dengan masyarakat yang beragama Hindu dan agama Kristen Protestan, yaitu 79,9 % (1.235), sedangkan yang beragama Hindu 19,9 % (402 orang), dan 0,9 % (3 orang) beragama Kristen Protestan.

Rumah ibadah yang ada di Desa Talang Benuang hanya rumah ibadah untuk umat Islam dan umat Hindu, sedangkan untuk umat Kristen Protestan (karena hanya 3 orang) maka mereka beribadah di Gereja Desa tetangga yang jaraknya tidak jauh dari Desa Talang Benuang (kurang lebih 35 meter). Jumlah rumah ibadah yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
Rumah Ibadah Berdasarkan Jenisnya

Nomor	Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan
1	Masjid	1 buah
2	Pura	1 buah
	Jumlah	2 buah

Sumber: Buku Profil Desa Talang Benuang 2012.

Sejak ditetapkannya Desa Talang Benuang sebagai salah satu desa trans lokal (38 tahun yang lalu) untuk menampung warga transmigrasi berasal dari daerah Bali yang *notabene* beragama Hindu, maka kemajemukan dan pluralitas agama tidak dapat dihindari, karena masyarakat asli pada umumnya beragama Islam.

Menurut Rado,<sup>30</sup> "semenjak tahun 1978 saya menetap di Talang Benuang dan belum pernah terjadi konflik, apalagi kekerasan anarkis sampai jatuhnya korban jiwa yang dibungkus dengan isu SARA". Begitu juga dengan pernyataan yang

<sup>30</sup> Nyoman Rado adalah tokoh masyarakat Hindu, wawancara tanggal 05 September 2012.

disampaikan oleh Subandi,<sup>51</sup> “Saya melihat bahwa proses interaksi dan komunikasi dengan warga pendatang yang beragama Hindu terjalin begitu akrab dikarenakan ada titik temu yang positif, dalam artian warga pribumi bisa menerima warga pendatang dengan semangat kebersamaan dan warga pendatang bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan, adat dan agama yang dianut oleh pribumi. Kondisi seperti inilah yang diharapkan semua warga masyarakat Talang Benuang, bisa mewujudkan interaksi yang positif”.

Interaksi masyarakat beda agama di Desa Talang Benuang, khususnya masyarakat yang beragama Islam dengan masyarakat yang beragama Hindu berlangsung secara sirkuler – timbal balik. Interaksi dibingkai dengan saling menghargai, menghormati, toleransi dan tidak menyinggung/melibatkan agama. Hal ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

**Diagram 1**  
Model Interaksi Masyarakat Beda Agama

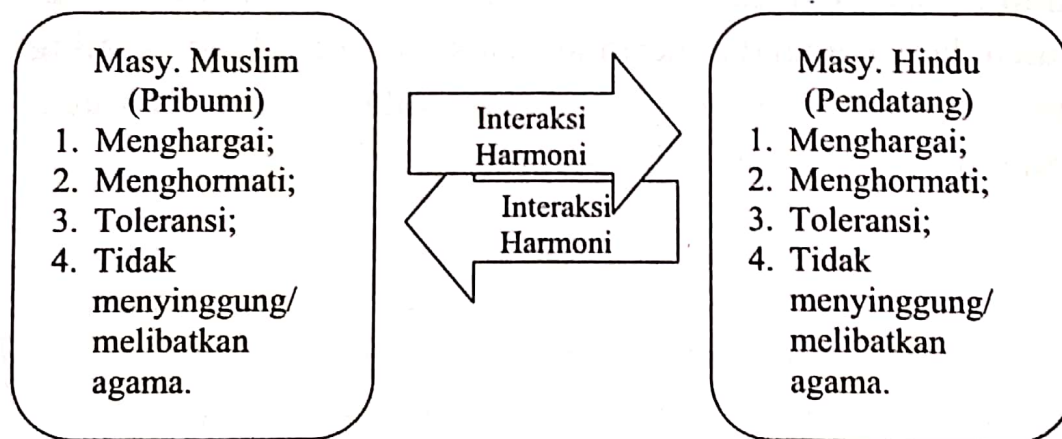


Diagram di atas dapat dipahami bahwa masyarakat pribumi yang mayoritas beragama Islam dengan masyarakat Bali sebagai pendatang yang beragama Hindu dalam menja-

---

<sup>51</sup> Endang Subandi adalah tokoh masyarakat Islam, wawancara tanggal 07 September 2012.

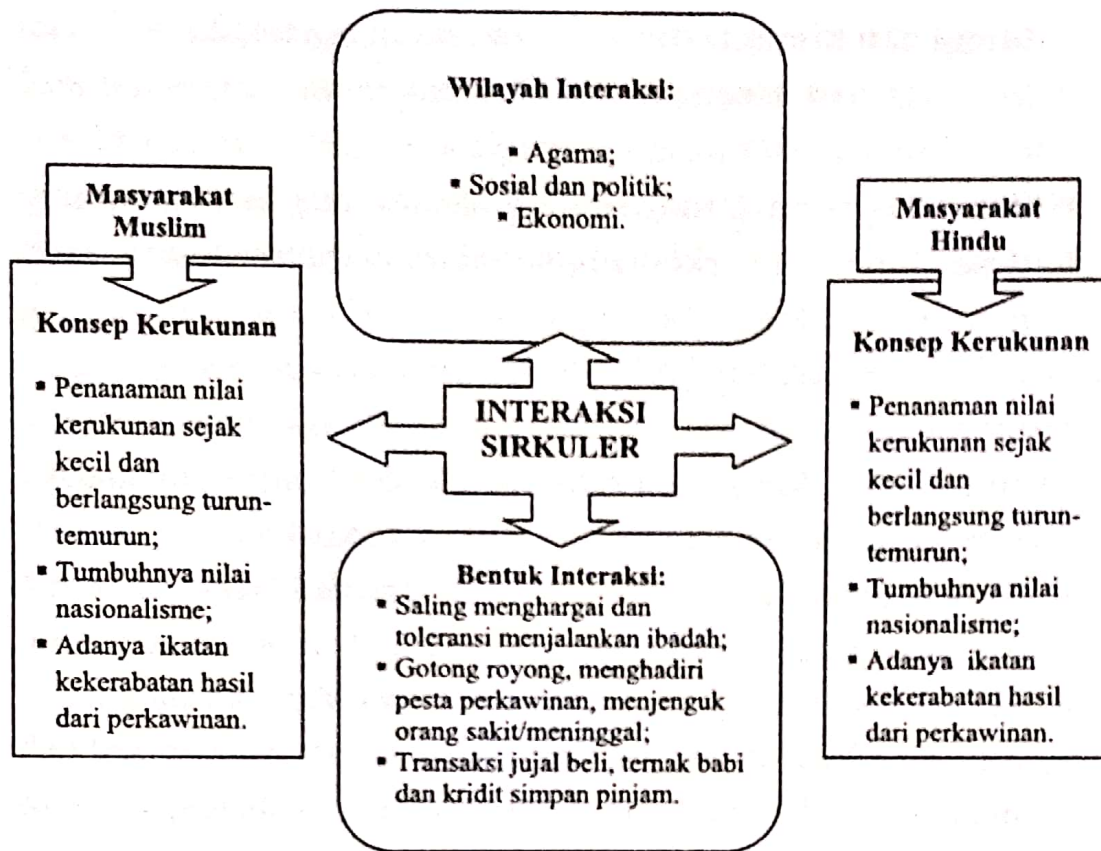


lankan interaksi dan komunikasi, kedua belah pihak yang berbeda agama memberikan sikap dan perlakuan yang sama, yakni senantiasa mengedepankan sikap menghargai, saling menghormati, toleransi dan tidak menyinggung atau melibatkan persoalan agama.

Sejak lahir manusia mempunyai naluri untuk hidup bergaul dan berdampingan dengan manusia lainnya. Naluri ini merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri untuk bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Keterikatan tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang secara sosiologis membutuhkan interaksi dan hubungan timbal balik, yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, cair dan mengalir yang di dalamnya membawa muatan nilai, budaya, etika, dan bahkan agama.

Masyarakat beda agama di Desa Talang Benuang memiliki pola interaksi yang unik sebagai perekat dalam menciptakan kerukunan dan harmonisasi kehidupan dengan saling menghormati dan menghargai. Pola interaksi mereka dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

**Diagram 2**  
**Pola Interaksi Masyarakat Beda Agama**



### Konsep Kerukunan

Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat Muslim dan masyarakat Hindu memiliki konsep dan penerapan yang sama dalam membangun interaksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat Muslim dan masyarakat Hindu, kedua belah pihak sama-sama memiliki pemahaman tentang pentingnya penanaman nilai kerukunan hidup beragama, dan ini sudah ditanamkan sejak kecil dan berlangsung turun – temurun. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan ketika anak-anak mereka bermain kelereng bersama, ke kebun bersama dan ke sekolah bersama. Jika terjadi keributan mereka segera menyelesaikan dan mendamaikannya,



tanpa ada menyinggung masalah agama.

- b. Nilai-nilai nasionalisme dalam masyarakat dijunjung tinggi dan tumbuh dengan baik, sehingga terjalin keharmonisan dan kebersamaan. Dampak positif lainnya dari nilai-nilai nasionalisme berupa kesadaran masyarakat dalam kegiatan gotong royong, siskamling, musyawarah desa, aktif dan berkontribusi dalam kegiatan sosial dan memperingati hari besar nasional.
- c. Ikatan kekerabatan yang dihasilkan dari perkawinan juga menjadi bagian penting dari pola interaksi masyarakat beda agama. Ketika ada keluarga Muslim yang akan menikah dengan keluarga Hindu atau sebaliknya, mereka melakukan musyawarah untuk mengambil kesepakatan tentang status agama yang akan dianut. Ikatan pernikahan inilah yang juga menjadi salah satu pendukung dan perekat terjadinya interaksi yang positif antar masyarakat beda agama di Desa Talang Benuang.

Pemaparan di atas jika dipotret dan dianalisis menggunakan pisau sosiologi maka akan tampak benang merahnya, di mana interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis dan cair yang menyangkut hubungan antar orang – perorang, kelompok– kelompok manusia dalam sebuah komunitas masyarakat yang sarat dengan nilai, budaya, etika dan adat – istiadat yang hidup dan dipertahankan.

### **Interaksi Pada Wilayah Agama**

Interaksi masyarakat beda agama di Desa Talang Benuang pada wilayah agama berlangsung harmonis dan terbangun hubungan yang saling toleran serta menghormati agama dan ibadah yang mereka lakukan. Masyah,<sup>52</sup> mengatakan:

---

<sup>52</sup> Akhir Masyah adalah tokoh masyarakat Islam, wawancara tanggal 07 September 2012.

"toleransi antar umat beragama harus tercermin pada tindakan-tindakan atau perbuatan yang menunjukkan umat saling menghargai, menghormati, menolong, mengasihi, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya menghormati agama dan iman orang lain; menghormati ibadah yang dijalankan oleh orang lain; tidak merusak tempat ibadah; tidak menghina ajaran agama orang lain; serta memberi kesempatan kepada pemeluk agama menjalankan ibadahnya".

Hal senada diungkapkan Santer,<sup>53</sup> tokoh masyarakat Hindu, Ia mengatakan bahwa: "toleransi dan kerukunan antar umat beragama bagaikan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Kerukunan berdampak pada toleransi; atau sebaliknya toleransi menghasilkan kerukunan; keduanya menyangkut hubungan antar sesama manusia. Artinya, jika toleransi antar umat beragama dapat terjalin dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan masyarakat yang rukun satu sama lain".

Bentuk interaksi masyarakat beda agama di Desa Talang Benuang pada wilayah agama dapat dilihat ketika masyarakat muslim merayakan hari besar Islam, mereka tetap menghargai Kepala Desa yang beragama Hindu dengan menyampaikan undangan untuk menghadiri. Kepala Desa karena dan rasa tanggung jawab dan toleransinya mengutus perangkat desa yang beragama Islam untuk mewakilinya menghadiri acara dimaksud.

Pada bulan suci Ramadhan, saat umat Islam melakukan kewajiban ibadah puasa, masyarakat Hindu sangat toleransi kepada umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa dan amalan lainnya. Mereka menasihati anak – anaknya untuk

---

<sup>53</sup> Ayan Santer adalah tokoh masyarakat Hindu, wawancara tanggal 13 September 2012.



tidak makan dan minum ketika di sekolah. Begitu juga pada malam hari, aktivitas warga di RT 11 dan RT 12 yang dihuni masyarakat Bali tidak mengadakan acara-acara yang bersifat gebyar dan keramaian.

### **Interaksi Pada Wilayah Sosial dan Politik**

Kehidupan sosial masyarakat Desa Talang Benuang berjalan sangat luwes dan fleksibel. Luwes dalam arti bahwa proses interaksi yang berlangsung di tengah masyarakat belum atau tidak pernah terjadi konflik/ketegangan yang berarti. Fleksibel artinya, interaksi dalam masyarakat berlangsung tanpa ada diskriminasi dan kalangan mana pun dapat berbaur di tengah masyarakat. Sujana,<sup>54</sup> menjelaskan: "bahwa proses interaksi masyarakat tergambar dalam pergaulan sehari-hari pada anggota masyarakat yang sangat cair dan membaur, tidak ada sentimen agama dan tendensi kesukuan yang mencolok, kami semua diikat dengan sebuah pemahaman kebangsaan yang tinggi, kami ini warga masyarakat Indonesia".

Berkenaan dengan pemilihan Kepala Desa yang merupakan ranah sosial dan politik, Eko,<sup>55</sup> menjelaskan: "proses demokrasi dan politik lokal di Desa Talang Benuang berjalan dengan baik. Ia memaparkan ketika pemilihan Kepala Desa di tahun 2008 sangat terlihat kecerdasan warga. Di mana ada 2 (dua) calon yang muncul dan mereka berbeda agama, yaitu Made Sujana (asal Bali beragama Hindu) dan lawannya Akhir Mansyah (pribumi beragama Islam). Secara logika, calon yang beragama Islam pasti menang jika dilihat dari jumlah penduduk yang mayoritasnya Islam (79,9%) jika dibandingkan dengan

---

<sup>54</sup> Made Sujana adalah Kepala Desa Talang Benuang, wawancara tanggal 05 September 2012.

<sup>55</sup> Suprih Eko adalah Sekretaris Desa Talang Benuang, wawancara tanggal 05 September 2012.

penduduk yang beragama Hindu (19,9 %). Tetapi fakta dan realita yang terjadi adalah calon dari agama minoritas (Hindu) Made Sujana berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan itu. Ini menunjukkan kedewasaan dalam proses politik lokal, bahwa calon pemimpin yang mereka pilih adalah yang memiliki kemampuan dan kompetensi, bukan masalah agama atau suku”.

Kemenangan Made Sujana (kaum migran yang beragama Hindu) menjadi Kepala Desa tidak terlepas dari sosoknya yang sederhana dan peduli dengan lingkungan serta aktif dalam kegiatan masyarakat, seperti dikatakan Nurhayati,<sup>56</sup> bahwa: “kemenangan Made Sujana menjadi Kepala Desa karena Ia memiliki jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, dirinya sangat akrab dan dekat dengan semua warga dan itu dilakukannya jauh sebelum pemilihan Kepala Desa. Bukan itu saja, Ia juga sebagai sosok yang sangat ramah. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat Ia lakukan dengan musyawarah dan kekeluargaan”.

Made Sujana sebagai Kepala Desa menunjukkan sikap yang netral dan tidak pilih kasih serta sangat toleransi kepada pemeluk agama lain, sebagaimana disampaikan Dalman,<sup>57</sup> “sebagai Kepala Desa dirinya membangun dan menumbuhkan sikap kebersamaan dalam masyarakat dan tanpa ada diskriminasi. Ini bisa dilihat ketika ada kegiatan-kegiatan desa seperti: kerja bakti setiap minggu dan perayaan hari-hari nasional. Setiap 17 Agustus kami gotong royong membuat gapura dan hiasan lainnya, dan kami pun memeriahkannya

---

<sup>56</sup> Nurhayati adalah masyarakat Desa Talang Benuang, wawancara tanggal 05 September 2012.

<sup>57</sup> Dalman adalah Ketua RT. 8 Desa Talang Benuang, wawancara tanggal 13 September 2012.



dengan pesta rakyat yaitu panjat pinang, dan acaranya bergantian di setiap RT, tapi tahun ini tidak digelar karena umat muslim lagi puasa”.

Berkaitan dengan masalah musibah kematian, orang sakit dan acara perkawinan, mereka sangat toleransi dan saling mengunjungi, seperti yang dikatakan Kanten,<sup>58</sup> “dalam hal musibah kematian dan musibah sakit masyarakat saling berkunjung, walaupun beda agama. Begitu juga pada acara pesta perkawinan mereka saling mengundang dan menghadiri. Ia mencontohkan, ketika warga Bali mengadakan resepsi perkawinan, warga muslim diundang dan mereka menghadiri acara tersebut tanpa ada keraguan dalam hal makanan, karena tuan rumah telah menyiapkan hidangan (katering khusus) untuk undangan yang beragama Islam, tempatnya tersendiri dan mereka dilayani oleh sesama orang Islam”.

### **Interaksi Pada Wilayah Ekonomi**

Kegiatan ekonomi di Desa Talang Benuang tidak membedakan agama penjual atau pembeli. Pada masing-masing RT terdapat warung sebagai mata pencaharian warga, pembelinya tidak saja warga RT tersebut, tetapi juga warga RT yang lainnya. Warung milik warga beragama Hindu juga sering dibeli oleh warga yang beragama Islam, begitu juga sebaliknya. Seperti dikatakan seorang warga yang identitasnya tidak mau disebutkan “saya sering membeli rokok di warung orang Bali yang beragama Hindu saat mau ke kebun, karena jalan ke kebun saya melewati warungnya”.

Berkenaan dengan jajanan dan makanan olahan, pedagang warga Bali mengatakan bahwa “anak-anak jarang membelinya dan kami maklum, tetapi untuk jajanan dan makanan

---

<sup>58</sup> I Made Kanten adalah Ketua RT. 12 Talang Benuang, wawancara tanggal 13 September 2012.

kemasan anak-anak mereka biasa membelinya, seperti jajanan ringan”.

Usaha ekonomi lain yang ditekuni warga Bali adalah usaha ternak babi. Meski begitu, masyarakat Bali memahami keberadaan ternak babi yang mereka pelihara dekat masyarakat Islam. Mereka membuat kandang khusus agar babi peliharaannya tidak bebas atau liar. Ternak babi hanya dipelihara di 2 (dua) RT yaitu tempat masyarakat Bali bermukim.

Sikap toleransi yang tinggi ditunjukkan oleh warga muslim, walaupun dalam ajaran Islam babi adalah hewan yang diharamkan, tetapi usaha ternak tersebut menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat Bali, maka orang Islam bisa memakluminya. Kegiatan ekonomi lainnya berupa program Kredit Usaha Tani yang menyediakan dana bergulir. Dalam pelaksanaannya tidak ada diskriminasi bagi peminjam/penerima, dana tersebut didistribusikan secara profesional dan proporsional.

### **E. Perspektif Sosiologi dan Interaksionisme Simbolik**

Dalam perspektif sosiologi, harmonisasi interaksi masyarakat beda agama tidak terlepas dari proses saling memahami dan menghormati agama masing-masing yang mereka anut. Kerukunan umat beragama dalam masyarakat harus dibentuk dan diciptakan bersama, dan ini melalui proses yang berkesinambungan.

Disadari, bahwa salah satu pemicu munculnya konflik antar umat beragama adalah tidak adanya kesadaran untuk memahami dan memberikan toleransi terhadap orang lain yang berbeda agama. Dalam konteks inilah pentingnya dikembangkan kesadaran akan pemahaman dan toleransi beragama, yaitu kemauan dan kemampuan untuk menghargai



agama lain serta mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan bersikap saling menghormati dan memberikan kebebasan setiap pemeluk agama menjalankan ajarannya.

Dari perspektif interaksionisme simbolik, kehidupan komunitas masyarakat beda agama dalam berinteraksi sarat dengan nilai dan simbol. Begitu juga dengan proses interaksi masyarakat beda agama di Desa Talang Benuang, mereka berusaha memahami agama, budaya dan simbol yang berlangsung dan mewarnai interaksi di antara mereka. Kesadaran masing-masing pihak untuk menghadirkan kerukunan dan toleran terbangun dengan interaksi dan komunikasi yang efektif.

Berlandaskan pada pola interaksi dan komunikasi yang efektif, kerukunan, toleransi dan kebersamaan terpelihara dengan baik dalam pergaulan hidup antar warga masyarakat yang berbeda agama. Dengan demikian, kerukunan dan harmonisasi hidup beragama pada dasarnya sebuah pengakuan adanya kebebasan masyarakat dalam memeluk agama yang diyakini sepanjang tidak mengganggu aktivitas agama lain. Interaksi antar umat beragama menjadi bagian penting yang harus diperhatikan agar kerukunan dan toleransi beragama dapat tercapai dan kehidupan yang harmoni di tengah masyarakat berbeda agama dapat terwujud. Kerukunan dan harmonisasi kehidupan inilah yang sebenarnya terbangun pada masyarakat beda agama di Desa Talang Benuang sehingga tidak ada konflik dan permusuhan.

#### **F. Faktor Pendukung Harmonisasi Masyarakat Beda Agama**

Beberapa faktor pendukung terwujudnya interaksi dan harmonisasi masyarakat beda agama di Desa Talang Benuang

Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma adalah: (1) Interaksi terjalin melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong, kelompok tani, kredit simpan pinjam, pesta perkawinan, musibah kematian dan berbagai kegiatan hari besar nasional. Selain itu, harmonisasi dalam masyarakat terbangun karena mereka saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan toleransi dan tidak menyinggung masalah agama dalam kehidupan masyarakat. (2) Terbangunnya pola interaksi masyarakat beda agama didukung oleh beberapa faktor, yaitu: *pertama*, adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya kerukunan hidup beragama, dan ini ditanamkan sejak kecil secara turun-temurun oleh pendahulunya; *kedua*, tumbuhnya jiwa nasionalisme dalam kehidupan masyarakat; dan *ketiga*, adanya ikatan kekerabatan yang dihasilkan dari pernikahan yang sebelumnya beda agama.



## **BAGIAN 2**

# **DAKWAH DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTURAL**

### **A. Pendahuluan**

Dahulu kita dengan mudah mendapatkan suatu daerah yang dihuni oleh satu komunitas atau satu etnik tertentu dengan budaya dan agama yang sama. Sekarang keadaannya sudah berubah dan berbeda, satu kota kecil, Bengkulu misalnya, sudah dihuni oleh banyak penduduk dengan etnik, budaya dan agama yang berbeda. Semua ini karena dinamisasi mobilitas manusia yang bergerak begitu cepat dan dinamis serta didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik teknologi komunikasi maupun teknologi transportasi.

Saat ini diberbagai kota/daerah dihuni oleh masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki keberagaman dalam berbagai hal, baik etnik, budaya, agama, bahasa, simbol yang digunakan, kebiasaan dan adat-istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Heterogenitas masyarakat itu menuntut kesadaran yang tinggi, kepedulian, saling pengertian dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya agar tercipta kehidupan bersama yang harmoni, damai dan saling mengayomi.

Berangkat dari realita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh keragaman, masyarakatnya tersebar di 17.000 lebih pulau, terdiri dari puluhan etnik dengan bahasa, tradisi dan agama yang tidak sama. Pancasila dan UUD 1945 telah mencoba merangkul semua unsur keragaman itu, sebagaimana juga terukir tegas pada simbol (Garuda) dengan kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* "berbeda-beda tetapi tetap satu", sungguh merupakan semboyan yang paling pas untuk merangkum prinsip-prinsip multikulturalisme. Sayangnya kita baru berkuat pada slogan tetapi lemah dalam tindakan, sehingga multikulturalisme masih terasa asing atau bahkan ditakuti.<sup>1</sup>

Salmadanis,<sup>2</sup> mengatakan "di negara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa ini, berdiam tidak kurang dari 300 etnis dengan identitas kulturalnya masing-masing, lebih dari 250 bahasa dipakai, beraneka adat istiadat serta beragam agama yang di anut. Memahami kemajemukan harus dengan melibatkan sikap diri yang penuh empati, jujur dan adil menempatkan perbedaan pada tempatnya, yaitu dengan menghormati, memahami dan mengakui eksistensi orang lain, sebagaimana menghormati dan mengakui eksistensi diri sendiri".

Dalam suatu masyarakat multikultural, setiap kelompok berhak mengembangkan diri sesuai dengan "jalan" jati diri atau karakteristik kelompoknya. Dalam masyarakat multikultural dibutuhkan adanya jaminan terhadap hak-hak kelompok minoritas untuk mengembangkan martabat atas dasar jati diri mereka. Jadi dibutuhkan adanya kesadaran kolektif

---

<sup>1</sup> Nasruddin Harahap. "Pembangunan Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Islam". Makalah, (Yogyakarta, 16 Maret 2005), hal. 2.

<sup>2</sup> Salmadanis. "Kearifan Dakwah dalam Kemajemukan Umat". Makalah pada acara Seminar Nasional "Dakwah dan Radikalisme" dan Temu Dekan/Kajur Dakwah se-Indonesia di IAIN Imam Bonjol, (Padang, 3 Nopember 2012), hal. 3.



yang mendorong munculnya kebudayaan politik yang ditandai oleh kehormatan timbal balik atas hak-hak manusia.<sup>3</sup>

Menarik disimak pernyataan Ismail,<sup>4</sup> "para da'i atau lembaga-lembaga dakwah harus memahami sosiologi dakwah, yaitu mempelajari dan memahami lingkungan sosial atau keadaan komunitas yang akan menerima dakwah. Setiap kelompok masyarakat mempunyai sifat, watak, tradisi, perangai, kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Itu semua harus dipelajari dan dipahami oleh para da'i atau lembaga-lembaga dakwah agar dakwah yang mereka laksanakan di tengah-tengah suatu kelompok masyarakat (etnis) tertentu bisa berhasil dengan baik".

## B. Pluralitas Masyarakat

Pluralitas dan perbedaan sudah menjadi kodrat kehidupan manusia (*sunnatullah*) yang tak terbantahkan dan tidak akan pernah berubah selamanya. Toleran terhadap pluralitas dan perbedaan menuntut manusia untuk bersikap saling memahami (*mutual understanding*) dan saling menghargai (*mutual respect*) antara satu dengan yang lainnya.

Ismail,<sup>5</sup> berpandangan "pluralitas masyarakat (yang me-wujud dalam keberagaman dan kemajemukan ras, bangsa dan etnis) telah melahirkan keberagaman bahasa, adat istiadat, tradisi dan budaya. Pluralitas masyarakat ini memang

---

<sup>3</sup>Nasruddin Harahap. "Pembangunan Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Islam". Makalah, (Yogyakarta, 16 Maret 2005), hal. 1.

<sup>4</sup>Faisal Ismail. "Tantangan dan Peluang Dakwah di Tengah Masyarakat Plural". Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Temu Dekan Dakwah se Indonesia di Hotel UIN Sunankalijaga, (Yogyakarta, 28 - 30 Oktober 2011), hal. 6.

<sup>5</sup>Faisal Ismail. "Tantangan dan Peluang Dakwah di Tengah Masyarakat Plural". Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Temu Dekan Dakwah se Indonesia di Hotel UIN Sunankalijaga, (Yogyakarta, 28 - 30 Oktober 2011), hal. 3.

dikehendaki oleh Allah dengan maksud agar kelompok-kelompok masyarakat yang hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu bisa saling kenal mengenal satu sama lain. Pluralitas masyarakat tidak saja menampilkan manifestasinya pada bentuk-bentuk fisik (tubuh), bahasa, tradisi dan budayanya, akan tetapi juga terefleksikan dalam pola kepegangan agama, ideologi, politik atau paham”.

Kemajemukan merupakan sunnatullah dan ini dapat dipahami dari al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 dan surat Ar-Ruum ayat 22 yang membicarakan masalah keragaman, perbedaan, multikultural, kemajemukan atau pluralisme, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat: 13).

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَافُ ألْسِنَتِكُمْ وَالْوَنَائِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui” (QS. Ar-Ruum: 22).



Kedua ayat di atas memberikan pemahaman bahwa umat manusia diciptakan dengan perbedaan jenis kelamin, beragam bangsa, berbeda suku, beraneka bahasa dan warna kulit. Perbedaan tersebut berimplikasi pada perbedaan budaya – antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Ini berarti ketika manusia melakukan interaksi akan terjadi komunikasi antarbudaya.<sup>6</sup>

Ismail,<sup>7</sup> mengatakan “menurut kodratnya, pluralitas (sifat atau keadaan beragam) adalah merupakan ciri utama kehidupan suatu masyarakat di mana saja dan kapan saja. Pluralitas sudah menjadi kodrat kehidupan manusia dan merupakan asal kejadian pembentukan kehidupan masyarakat. Pluralitas tidak hanya dikenal pada zaman modern sekarang ini, tetapi pluralitas itu sudah dikenal dan eksis sejak zaman dulu kala. Tidak ada kehidupan masyarakat di dunia ini yang tidak memiliki dan tidak mengandung unsur pluralitas. Dengan kata lain, pluralitas itu pasti ada dalam setiap kehidupan masyarakat/bangsa”.

Agar seorang juru dakwah bisa mengoptimalkan kegiatannya, sebaiknya dia mempertimbangkan perspektif sosial budaya dalam melihat proses dakwah. Dalam konteks ini, dia akan memahami bahwa umat akan memberi makna terhadap pesan yang dia sampaikan. Agar makna ini tidak melenceng jauh dari yang diharapkan sang juru dakwah, sebaiknya dia *mem-framing* dakwahnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ujang Mahadi. 2015. “Komunikasi dan Dakwah Kontemporer: Pendekatan Fenomenologi, Interaksi Simbolik dan Dramaturgi”, (Bogor: IPB Press), hal. 163.

<sup>7</sup>Faisal Ismail. “Tantangan dan Peluang Dakwah di Tengah Masyarakat Plural”. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Temu Dekan Dakwah se Indonesia di Hotel UIN Sunankalijaga, (Yogyakarta, 28 – 30 Oktober 2011), hal. 3.

<sup>8</sup>Ana Nadhya Abrar. Makalah “Bagaimana Memframing Dakwah Is-

Fenomena global yang menumbuhkan masyarakat multikultural meyakinkan orang mukmin akan universalitas Islam. Nabi mengajarkan tentang: (1) keberanian untuk memasuki masyarakat multikultural (*ummah*) secara terbuka, percaya diri dan menjunjung tinggi martabat Islam, (2) konsolidasi internal dengan membangun *ukhuwah Islamiyah*, (3) interaksi sosial dengan kelompok-kelompok lain atas dasar saling menjaga diri dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, (4) membangun *ukhuwah wathoniyah dan bashariyah* antarkelompok etnik-agama yang ada, (5) melakukan dakwah Islam *bilhikmah*, untuk menyemaikan kebenaran Tuhan ke seluruh sel masyarakat.<sup>9</sup>

### C. Komunikasi Dakwah

Komunikasi dakwah merupakan pertemuan dua disiplin ilmu, yaitu "komunikasi" dan "dakwah". Pengertian komunikasi, mengutip pendapat Effendy,<sup>10</sup> adalah "proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media". Sedangkan pengertian dakwah, mengutip pendapat Amin,<sup>11</sup> adalah "suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada orang lain agar mereka menerima ajaran Islam

---

lam". Disampaikan pada Seminar Nasional dan Temu Dekan Fakultas Dakwah se Indonesia di UIN Sunankalijaga. (Yogyakarta, 29 Oktober 2011), hal. 7.

<sup>9</sup>Nasruddin Harahap. "Pembangunan Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Islam". Makalah, (Yogyakarta, 16 Maret 2005), hal. 8.

<sup>10</sup>Onong Uchjana Effendy. 2000. "Dinamika Komunikasi". (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 5.

<sup>11</sup>Samsul Munir Amin. 2008. "Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam". (Jakarta: Amzah), hal. 7.



tersebut dan menjalankannya dengan baik dalam kehidupan individual maupun bermasyarakat untuk mencapai kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan menggunakan berbagai media dan cara-cara tertentu”.

Komunikasi dan dakwah memiliki kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kesamaannya, baik komunikasi maupun dakwah adalah penyampaian pesan, baik informatif maupun persuasif. Sedangkan perbedaannya adalah komunikasi bermuatan pesan umum, sedangkan dakwah berkonotasi pesan khusus ajaran agama Islam.<sup>12</sup>

Menurut Mubarak,<sup>13</sup> semua hukum yang berlaku dalam sistem komunikasi berlaku juga pada dakwah, hambatan komunikasi adalah hambatan dakwah pula, dan bagaimana cara mengungkap apa yang tersembunyi di balik perilaku manusia dakwah, sama pula dengan apa yang harus dikerjakan terhadap manusia komunikan. Adapun perbedaan *dakwah* dengan *komunikasi* terletak pada muatan pesannya, pada komunikasi sifatnya netral, sedangkan pada dakwah agama terkandung nilai keteladanan. Seorang pemain sandiwara dianggap hebat manakala ia dapat memerankan dirinya sebagai orang lain, dan pesannya dinilai komunikatif meskipun kehidupannya di luar panggung sangat jauh kualitasnya dibanding tokoh yang diperankannya di atas panggung, karena ukuran keberhasilan seorang aktor adalah keberhasilannya menjadi orang lain. Adapun seorang da'i, ia bukan hanya seorang komunikator, tetapi juga motivator dan contoh sehingga ia dituntut untuk *sinkron* antara apa yang disampaikan di atas mimbar dengan apa yang dilakukannya dalam kehidupan

---

<sup>12</sup> M. Bahri Ghazali. 1997. “*Dakwah Komunikatif: Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah*”. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hal. 5.

<sup>13</sup> Ahmad Mubarak. 2008. “*Psikologi Dakwah*”. Cetakan keempat. (Jakarta: Pustaka Firdaus), hal. 21.

kesehariannya. Seorang da'i adalah komunikator sekaligus teladan".

Letak perbedaan antara "komunikasi" dan "komunikasi dakwah" yang sangat menonjol sebenarnya terletak pada muatan yang terkandung di dalam pesannya. Dalam hal ini, komunikasi sifatnya lebih netral dan umum, sedangkan dalam dakwah terkandung nilai kebenaran dan keteladanan Islam. Di samping itu, perbedaan pada tujuan dan efek yang diharapkan.<sup>14</sup>

Mahadi,<sup>15</sup> berpendapat bahwa "komunikasi dakwah merupakan proses penyampaian pesan dakwah (pesan moral/ajaran agama) yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang dilakukan da'i secara ikhlas, sadar dan terencana dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, dan/atau perilaku ke jalan yang benar menurut ajaran Islam dengan menggunakan media yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam proses dakwah, memberikan kesempatan kepada jama'ah yang masih ragu dan/atau belum memahami pesan agama yang disampaikan untuk mendiskusikannya secara lebih mendalam. Komunikasi dakwah dapat juga diartikan sebagai upaya da'i/ulama/kyai/buya atau mubaligh dalam menyampaikan pesan-pesan kebenaran kepada jama'ah agar mereka dapat mengetahui, memahami, menghayati, menyadari dan mengamalkannya secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dan petunjuk hidupnya".

Menurut Ilaihi,<sup>16</sup> ada beberapa peran komunikasi dalam

---

<sup>14</sup> Wahyu Ilaihi. 2010. "Komunikasi Dakwah". (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 24.

<sup>15</sup> Ujang Mahadi. 2015. "Komunikasi dan Dakwah Kontemporer: Pendekatan Fenomenologi, Interaksi Simbolik dan Dramaturgi", (Bogor: IPB Press), hal. 34-35.

<sup>16</sup> Wahyu Ilaihi. 2010. "Komunikasi Dakwah". (Bandung: Remaja



dakwah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan memasukkan nilai-nilai persuasif Islam, sikap mental Islam, dan bentuk perilaku Islam.
- 2) Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan pendidikan Islam.
- 3) Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan.
- 4) Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang dialami diri sendiri sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk menciptakan kepribadian Islam (*amar ma'ruf nahi munkar*).
- 5) Komunikasi dapat meningkatkan apresiasi yang merupakan perangsang untuk bertindak secara riil.
- 6) Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan Islam dan tentang pengetahuan Islam dalam mengatasi perubahan.
- 7) Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan di tengah kehidupan masyarakat.
- 8) Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan masyarakat pada masyarakat yang awam ke masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan kepada massa.
- 9) Komunikasi dapat menciptakan umat menjadi loyal terhadap Islam.
- 10) Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program dan strategi dakwah.
- 11) Komunikasi dapat membuat dakwah menjadi proses yang berlangsung secara mandiri.

#### **D. Etika Komunikasi Dakwah**

Kata etika berasal dari kata "*ethos*" (bahasa Yunani), dalam

bahasa Inggris "*ethics*" yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat (*costum*). *Ethic* (bahasa Inggris) berarti etika, tata-susila, *ethical* berarti etis, pantas, layak, beradab, susila. Sebagai suatu subjek etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya salah atau benar, buruk atau baik.<sup>17</sup>

Secara terminologis, menurut Ahmad Amin, etika berarti ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan yang seharusnya diperbuat. Secara lebih spesifik, Ki Hajar Dewantara mengartikan etika, sebagai ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan, sehingga dapat mencapai tujuannya dalam bentuk perbuatan".<sup>18</sup>

Fran Magnis Suseno,<sup>19</sup> mengatakan terdapat sekurang-kurangnya empat alasan mengapa etika diperlukan, yaitu:

- 1) Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral dan untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral maka refleksi kritis etika diperlukan.
- 2) Kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan itu dibawa hantaman kekuatan

---

Rosdakarya), hal. 40.

<sup>17</sup> Melalui: < <http://azrieipo.blogspot.com/2011/01/etika-dakwah-dan-komunikasi.html> > [16/10/2011].

<sup>18</sup> Melalui: < <http://zonaislam.net/?p=12383> > [16/10/2011].

<sup>19</sup> Lihat dalam Enjang dan Aliyudin. 2009. "*Dasar-dasar Ilmu Dakwah*". (Bandung: Widya Padjadjaran), hal. 134.



- yang mengenai semua segi kehidupan kita, yaitu gelombang modernisasi. Dalam kondisi seperti ini etika mau membantu agar kita jangan kehilangan orientasi, dapat membedakan antara apa yang hakiki dan apa saja yang boleh berubah, dan dengan demikian tetap sanggup untuk mengambil sikap yang dapat kita pertanggungjawabkan.
- 3) Tidak mengherankan bahwa proses perubahan sosial budaya dan moral yang kita alami ini dipergunakan oleh pelbagai pihak untuk memancing di air keruh. Etika dapat membuat kita sanggup untuk membentuk penilaian sendiri, agar kita tidak terlalu mudah terpancing.
  - 4) Etika juga diperlukan oleh kaum agamawan yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, dipihak lain sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah.

Dalam konteks masyarakat multikultural, etika komunikasi dakwah harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dan serius bagi pelaku dakwah jika ingin pesan dakwah yang disampaikan mendapatkan respon positif dan diterima masyarakat. Oleh karena itu, dalam berdakwah da'i harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat atau komunitas tertentu serta mengetahui mana perilaku yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan, yang pantas dan tercela menurut ukuran masyarakat di mana dakwah itu disampaikan. Seperti dikatakan Ismail,<sup>20</sup> 'dalam masyarakat pluralistik (seperti masyarakat Indonesia) perlu dihindari pe-

---

<sup>20</sup> Faisal Ismail. "Tantangan dan Peluang Dakwah di Tengah Masyarakat Plural". Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Temu Dekan Dakwah se Indonesia di Hotel UIN Sunankalijaga, (Yogyakarta, 28 - 30 Oktober 2011), hal. 5.

nyajian materi, tema atau pesan-pesan dakwah yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan)".

Menurut Amir,<sup>21</sup> "etika komunikasi mengacu pada pengertian bagaimana berkomunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat atau golongan tertentu. Pengertian seperti ini tentu tidak saja diukur dari nilai keyakinan atau agama masyarakat itu sendiri, tetapi juga diukur dari nilai-nilai adat – istiadat yang berlaku dalam masyarakat".

Dakwah hendaklah disampaikan dengan cara yang baik, bijak, penuh hikmah dan bermuatan pelajaran yang berharga. Dakwah akan sampai kepada jama'ah manakala penyampaian materi dakwah dikemas dengan seni dan teknik berkomunikasi yang cerdas. Da'i sejatinya adalah seorang komunikolog yang membawa pesan-pesan Ilahiah untuk disampaikan kepada umat (jama'ah). Pemahaman dan pengetahuan akan etika komunikasi dakwah bagi seorang da'i menjadi sesuatu yang penting dan mutlak dimiliki, terlebih pada masyarakat multikultural yang dinamis dan terbuka (seperti Indonesia).

### **E. Materi, Media dan Metode Dakwah**

Di era modern, ketika kehidupan manusia dan masalah-masalahnya begitu kompleks, peran dakwah sangat dibutuhkan untuk memberi topangan nilai. Dakwah tidak lagi hanya berkuat pada masalah-masalah spiritual dan eskatologis, tetapi juga harus beranjak ke aspek-aspek riil masyarakat pemeluknya. Dengan menanamkan nilai-nilai moral sehingga manusia memiliki kemampuan tinggi untuk mengatasi masalahnya dengan tanpa merusak harmoni dengan lingkungan-

---

<sup>21</sup> Lihat dalam Enjang dan Hajir Tajiri. 2009. *"Etika Dakwah: Suatu Pendekatan Teologis dan Filosofis"*. (Bandung: Widya Padjadjaran), hal. 127.



nya. Dengan nilai-nilai moral agama, manusia memiliki kecakapan mengatasi dan ketajaman membaca tanda-tanda zaman berikut kemampuan menciptakan seperangkat nilai untuk melestarikannya, seperti hukum dan sejumlah peraturan.<sup>22</sup>

Berdakwah tidaklah cukup hanya dengan menyampaikan materi dakwah, tetapi harus juga memastikan bahwa materi dakwahnya bisa mengubah sebuah masyarakat. Tanggung jawab besar seperti ini semakin menunjukkan bahwa kegiatan dakwah bukanlah sesuatu yang remeh, main-main, atau dilakukan cukup sekadarnya saja. Dalam konteks ini, manajemen dengan segala macam evolusi teori dan aplikasinya yang fleksibel di semua zaman sangat dibutuhkan untuk membantu tercapainya target dakwah.<sup>23</sup>

Era ini menuntut para da'i untuk memformat materi dakwah yang bersifat logis, rasional, aktual, ilmiah dan materi yang relevan dengan kebutuhan serta budaya yang sedang berlangsung. Selama ini materi dakwah sering mengambang dan kurang mengarah, sehingga sulit disimpulkan. Terkadang materi dakwah terkesan apologi, dogmatis, normatif dan tidak responsif terhadap perkembangan budaya. Terdapat tiga kategori muatan materi dakwah secara rasionalitas, *pertama*: materi yang ada merupakan pentransformasian materi yang tekstual ke kontekstual; *kedua*: materi yang bersifat doktrin ke sains dan teknologi; *ketiga*: materi tersebut merupakan reinterpretasi terhadap ajaran Islam mengenai masalah-masalah

---

<sup>22</sup> Wahyu Ilaihi. "Dakwah Sebagai Solusi Perdamaian Global". Lihat dalam Congress Proceeding "Dakwah dan Pembangunan Bangsa: Strategi Transformatif Masyarakat Multikultural". Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel - APDI, (Surabaya, 15 s.d. 17 Mei 2009), hal. 300.

<sup>23</sup> Aun Falestien Faletehan. "Mengapa Harus Menggunakan Manajemen dalam Kegiatan Dakwah?". Lihat dalam Congress Proceeding "Dakwah dan Pembangunan Bangsa: Strategi Transformatif Masyarakat Multikultural". Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel - APDI, (Surabaya, 15 s.d. 17 Mei 2009), hal. 223.



yang aktual dan faktual dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Ismail,<sup>25</sup> mempertegas bahwa "yang perlu diubah oleh umat Islam adalah penyajian materi dakwah yang kelihatan kurang menarik menjadi lebih menarik. Materi dakwah sebaiknya tidak saja dapat menyentuh lubuk hati orang-orang yang didakwahi, tetapi juga harus mampu menggugah akal pikiran mereka. Jadi, emosionalitas dan rasionalitas orang-orang yang didakwahi perlu secara serentak disentuh agar pemahaman dan penerimaan mereka terhadap Islam berjalan secara seimbang dan simultan".

Media massa mempunyai peran yang urgen dalam menopang aktivitas dakwah di tengah masyarakat. Pesan-pesan dakwah yang dipublikasikan melalui media massa dapat menjangkau mad'u dalam jumlah besar dan jarak yang jauh sekalipun. Pesan dakwah dapat diketahui dengan cepat oleh masyarakat luas dan diharapkan dapat mempengaruhi serta menggugah pikiran mereka untuk mengikuti nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pesan dakwah.

Sebagai media yang sangat populer dalam kehidupan masyarakat modern, internet bisa menjadi alternatif media yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Banyak fitur-fitur yang disajikan sehingga akan menjangkau lebih banyak mad'u yang dibidik. Masing-masing fitur memiliki kelebihan, tinggal bagaimana para da'i memanfaatkannya. Dari kelebihan fitur yang ditonjolkan internet menjadikan media tersebut mampu menyajikan dakwah dalam bentuk yang berbeda.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hamidah. Makalah "Dakwah Islam Era Global". (t.t.), hal. 7.

<sup>25</sup> Faisal Ismail. "Tantangan dan Peluang Dakwah di Tengah Masyarakat Plural". Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Temu Dekan Dakwah se Indonesia di Hotel UIN Sunankalijaga, (Yogyakarta, 28 - 30 Oktober 2011), hal. 4.

<sup>26</sup> Advan Navis Zubaidi. "Adopsi Teknologi dalam Dakwah". Lihat dalam



Dalam konteks media dakwah, teknologi informasi dan internet bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Salah satunya adalah memudahkan transformasi data baik berupa tulisan, opini, artikel atau data dalam format apa pun yang berisi tema-tema Islam atau dakwah melalui elektronik dan internet. Akhirnya kemudian muncul istilah E-Dakwah, yaitu aktivitas dakwah yang didukung oleh teknologi elektronik atau teknologi informasi.<sup>27</sup>

Zubaidi,<sup>28</sup> menambahkan "dalam konteks dakwah, banyak hal yang bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi. Untuk berkomunikasi dengan para jamaah muslim di Belanda, kita cukup duduk di depan komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan dilengkapi dengan *webcam* (kamera yang terhubung dengan komputer), sehingga satu sama lain bisa saling berhubungan dan bisa melihat wajah masing-masing.

Berkenaan dengan penggunaan media dakwah, secara lebih gamblang dan lengkap disampaikan oleh Ismail,<sup>29</sup> "dalam masyarakat pluralistik di masa modern sekarang ini, para da'i dan organisasi-organisasi dakwah Islam harus terus mengembangkan kiat-kiat baru dalam mengembangkan kiprah dan

---

Congress Proceeding "Dakwah dan Pembangunan Bangsa: Strategi Transformatif Masyarakat Multikultural". Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel – APDI, (Surabaya, 15 s.d. 17 Mei 2009), hal. 94.

<sup>27</sup> Yusuf Amrozi. "Sumbangsih Teknologi Informasi untuk Pengembangan Dakwah Islam". Lihat dalam Congress Proceeding "Dakwah dan Pembangunan Bangsa: Strategi Transformatif Masyarakat Multikultural". Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel – APDI, (Surabaya, 15 s.d. 17 Mei 2009), hal. 76.

<sup>28</sup> Advan Navis Zubaidi. "Adopsi Taknologi dalam Dakwah". Lihat dalam Congress Proceeding "Dakwah dan Pembangunan Bangsa: Strategi Transformatif Masyarakat Multikultural". Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel – APDI, (Surabaya, 15 s.d. 17 Mei 2009), hal. 90.

<sup>29</sup> Faisal Ismail. "Tantangan dan Peluang Dakwah di Tengah Masyarakat Plural". Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Temu Dekan Dakwah se Indonesia di Hotel UIN Sunankalijaga, (Yogyakarta, 28 – 30 Oktober 2011), hal. 4-5.

gerakan dakwahnya. Selain tetap menggunakan media tradisional (yang dipakai untuk kalangan masyarakat tradisional), umat Islam perlu pula menggunakan segala macam media modern dalam mengembangkan dan merealisasikan dakwahnya. Majalah, surat kabar, radio, film, televisi, internet dan media modern lainnya perlu dimanfaatkan oleh umat Islam dalam mengembangkan dan melaksanakan dakwahnya. Penggunaan media modern semacam ini tentunya akan sangat efektif karena dapat menembus jarak yang jauh dan sampai kepada para pendengar, pembaca dan pemirsa di tempat yang jauh pula”.

Aktivitas dakwah selain harus memperhatikan “materi dan media” dakwah, tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan “metode” dakwah yang digunakan. Dalam beberapa literatur yang mengkaji “ilmu dakwah” ketika membahas “metode dakwah” pada umumnya para ahli dakwah merujuk pada al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125, yaitu:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم  
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ  
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. An-Nahl: 125).

Metode dakwah pada ayat 125 di atas, untuk menyeru manusia (kepada Islam) dengan salah satu dari tiga cara, yaitu dengan *hikmah*, *mau'izhah al-hasanah* dan *mujadalah bil al-thariq*



*al-ihsan*. Ketiga metode itu disesuaikan dengan kemampuan intelektual masyarakat yang dihadapi. Namun bukan berarti masing-masing metode tertuju untuk masyarakat tertentu pula, akan tetapi secara prinsip semua metode dapat dipergunakan kepada semua masyarakat. Pada ayat tersebut bukan hanya berbicara seputar metode dakwah, akan tetapi meliputi faktor-faktor lainnya, yaitu tentang subjek dan materi yang disampaikan. Bahkan secara tersirat juga terkandung objek dakwah, karena perintah dakwah dalam ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad saw.<sup>30</sup>

Menurut Daroini,<sup>31</sup> ada beberapa hal yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu:

- 1) Mengajak, maksudnya mengajak menuju ke jalan Tuhan;
- 2) Hikmah, maksudnya mengajak ke jalan Tuhan dengan hikmah, yaitu dengan bijaksana, sesuai dengan kondisi dan situasi *mad'u* yang menjadi objek dakwah;
- 3) Hasanah, yaitu berdakwah dengan nasihat-nasihat yang baik; dan
- 4) Berdebat, tetap dengan perdebatan yang baik, dari segi cara dan proses maupun isi dari diskusi itu.

Ismail,<sup>32</sup> mengatakan bahwa "contoh baik yang pantas ditiru adalah dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Mereka ber-

---

<sup>30</sup> Salmadani. "Kearifan Dakwah dalam Kemajemukan Umat". Makalah pada acara Seminar Nasional "Dakwah dan Radikalisme" dan Temu Dekan/Kajur Dakwah se Indonesia di IAIN Imam Bonjol, (Padang, 3 Nopember 2012), hal. 14.

<sup>31</sup> Ahmad Daroini, lihat dalam Ujang Mahadi. 2015. "Komunikasi dan Dakwah Kontemporer: Pendekatan Fenomenologi, Interaksi Simbolik dan Dramaturgi", (Bogor: IPB Press), hal. 131.

<sup>32</sup> Faisal Ismail. "Tantangan dan Peluang Dakwah di Tengah Masyarakat Plural". Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Temu Dekan Dakwah se Indonesia di Hotel UIN Sunankalijaga, (Yogyakarta, 28 - 30 Oktober 2011), hal. 6.

dakwah dengan menggunakan metode “kultural edukatif”, tidak secara membabi buta menyerang keras paham dan praktik-praktik yang tidak Islami, tetapi mereka melakukan secara persuasif, edukatif, etis dan humanis. Cara-cara santun, bijak, arif dan edukatif mereka terapkan dalam metode dakwah mereka sehingga kalbu orang-orang yang didakwahi tersentuh dan akhirnya masuk Islam”.

Aktivitas dakwah di tengah masyarakat multikultural menuntut pelaku dakwah (da'i, ustadz, kyai, buya) memperhatikan etika komunikasi dakwah agar pesan dakwah yang disampaikan dapat diterima, dipahami dan selanjutnya diaplikasikan dalam kehidupan. Etika komunikasi dakwah harus mempertimbangkan karakteristik *mad'u* atau jama'ah yang berkaitan dengan budaya, bahasa, adat-istiadat, system simbol dan juga harus mengetahui hal-hal yang dibolehkan dan dilarang, mengetahui perkataan dan perbuatan yang terpuji dan tercela di mana dakwah disampaikan.



## BAGIAN 3

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM DENGAN PENDEKATAN KOMUNIKASI ANTARBUDAYA

### A. Pendahuluan

Komunikasi antarbudaya dalam konteks pemberdayaan masyarakat Islam menjadi penting mengingat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki beragam suku, bahasa, dan adat istiadat. Seperti dikatakan Widodo<sup>1</sup>, Indonesia adalah negara kepulauan, yang terdiri dari 17.508 pulau, 485 suku bangsa dan 583 bahasa daerah.

Keberagaman suku bangsa dan bahasa daerah yang sangat fantastis itu akan berimplikasi pada cara dan efektivitas komunikasi antarbudaya, dan tidak mudah untuk dapat melakukan komunikasi antarbudaya yang efektif jika tidak memahami perbedaan latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Terlebih dalam konteks pemberdayaan masyarakat, sangat dibutuhkan kemampuan tenaga motivator dalam berkomunikasi antarbudaya untuk dapat mempersuasi dan menstimulasi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Dewi Widowati. Melalui: < <http://nr67.wordpress.com/2009/05/08/komunikasi-antarbudaya/> > [6/04/2012].

## B. Memahami Hakikat Komunikasi

Banyak orang beranggapan bahwa melakukan komunikasi itu merupakan hal yang mudah, karena sudah terbiasa dilakukan sejak kecil "ketika mulai bisa bicara". Setelah orang mengalami "hambatan" atau bahkan "kegagalan" ketika melakukan komunikasi barulah dirasakan dan disadari bahwa komunikasi itu bukanlah persoalan yang mudah, apalagi dalam konteks komunikasi antarbudaya.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan multidimensional jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, karena manusia di samping dibekali nafsu juga dianugerahi akal pikiran dan kemampuan berinteraksi untuk dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, secara kodrati bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa mengisolasi diri dari kehidupan manusia lainnya.

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, secara kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial "*social relations*".<sup>2</sup> Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas komunikasi karena komunikasi merupakan bagian integral dari sistem dan tatanan kehidupan sosial manusia dan masyarakat. Aktivitas komunikasi dapat dilihat pada setiap aspek kehidupan sehari-hari manusia yaitu sejak dari bangun tidur sampai manusia beranjak tidur pada malam hari. Bisa dipastikan sebagian besar dari kegiatan kehidupan kita menggunakan komunikasi baik komunikasi verbal maupun nonverbal.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3.

<sup>3</sup> Melalui: < <http://www.google.co.id/search?q=definisi%20komunikasi&ie=utf-8&oe=utf> > [28/01/2012].



Hasil penelitian yang diungkapkan Adhim,<sup>4</sup> "dari bangun tidur di pagi hari hingga berbaring kembali menjelang tengah malam, 70 % waktu bangun, kita gunakan untuk berkomunikasi. Ini berarti, kualitas hidup kita banyak ditentukan oleh bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama. Larasati,<sup>5</sup> menegaskan dengan komunikasi orang berhubungan dengan orang lain untuk menyampaikan perasaan, pendapat, pikiran, informasi, nasihat dan lain-lain. Menurut sebuah penelitian 70 % waktu bangun manusia atau kurang lebih 11 jam digunakan untuk berkomunikasi baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung melalui media tertentu seperti media cetak ataupun media elektronik.

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin yakni "*communicatio*" dan bersumber dari kata "*communis*" yang berarti "sama".<sup>6</sup> Menurut Effendy,<sup>7</sup> kata "sama" maksudnya adalah "sama makna". Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan lain perkataan, mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Jelas bahwa percakapan dapat dikatakan *komunikatif* apabila kedua-duanya, selain mengerti bahasa yang di-

---

<sup>4</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hal. 564.

<sup>5</sup> Larasati, melalui: < <http://www.google.co.id/#sclient=psy-ab&hl=id&site=&source=hp&q=komunikasi+efektif+dalam+penelitian> > [27/01/2012].

<sup>6</sup> Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 19.

<sup>7</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 9.

pergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercepatkan.

Setiap masyarakat memiliki struktur, stratifikasi, bahasa, adat-istiadat dan budaya yang berbeda. Keberagaman budaya dalam masyarakat merupakan sunnatullah dan karunia yang harus disyukuri. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, faktor penting yang harus diperhatikan adalah memahami komunikasi antarbudaya agar tujuan dari pemberdayaan dapat terwujud dengan maksimal dan berhasilguna.

### C. Budaya dan Multikulturalisme dalam Al-Qur'an

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.<sup>8</sup> Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.<sup>9</sup> Abidin,<sup>10</sup> mengatakan secara mendasar, budaya/kultur bertalian dengan sikap dan kepercayaan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan hukum. Lingkungan budaya termasuk faktor yang berhu-

---

<sup>8</sup> Melalui: < <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya> > [27/09/2011].

<sup>9</sup> Melalui: < <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya> > [27/09/2011].

<sup>10</sup> Yusuf Z. Abidin, *Analisis Lingkungan dalam Penyusunan dan Penyajian Program Dakwah*, dalam *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. Vol. 3 No. 9/Januari-Juni 2007, (Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2007), hal. 709.



bungan terhadap kesukuan, agama, status sosial, dan latar belakang pengalaman keagamaan.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Budaya diciptakan, dibentuk, ditransmisikan, dan dipelajari melalui komunikasi; sebaliknya praktik-praktik komunikasi diciptakan, dibentuk, dan ditransmisikan melalui budaya.<sup>11</sup> Budaya dan komunikasi saling berkaitan sehingga sangat mudah untuk berpikir bahwa komunikasi itu adalah budaya dan budaya adalah komunikasi.<sup>12</sup> Rogers dan Stainfart,<sup>13</sup> menjelaskan budaya dapat diberi batasan sebagai keseluruhan cara hidup orang (*the total way of life*) yang tersusun berdasarkan pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan objek-objek material yang mereka pelajari dan pertukarkan. Meskipun budaya merupakan sebuah konsep yang sangat umum, tetapi budaya memiliki efek yang sangat kuat terhadap perilaku individu, termasuk perilaku komunikasi. Budaya tidak hanya dimiliki oleh kelompok bangsa atau kelompok etnis, tetapi juga komunitas, organisasi, dan sistem-sistem lain. Budaya mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu:

- 1) Istilah budaya merujuk pada keragaman *pool of knowledge*, realitas-realitas yang dipertukarkan, dan norma-norma yang dikelompokkan yang membentuk sistem-

---

<sup>11</sup> Turnomo Rahardjo, *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 51.

<sup>12</sup> Larry A. Samovar, *Komunikasi Lintas Budaya (Communication Between Cultures)*, Edisi VII, Penerjemah Indri Margaretha Sidabalok, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 55.

<sup>13</sup> Turnomo Rahardjo, *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 48.

- sistem makna yang dipelajari dalam masyarakat partikular;
- 2) Sistem-sistem makna yang dipelajari tersebut dipertukarkan dan ditransmisikan sehari-hari di antara para anggota kelompok kultural dan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
  - 3) Budaya memfasilitasi kapasitas para anggota untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal mereka.

Dalam al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 dan surat Ar-Ruum ayat 22 juga membicarakan masalah multikulturalisme, bahwa manusia itu diciptakan tidak sama, berlainan suku, beragam bangsa, warna kulit yang tidak sama, dan bahasa yang berbeda.

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat: 13).*

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui” (QS. Ar-Ruum: 22).*

Kedua ayat di atas memberikan pemahaman bahwa umat manusia diciptakan dengan perbedaan jenis kelamin, beragam bangsa, berbeda suku, beraneka bahasa dan warna kulit. Perbedaan tersebut berimplikasi pada perbedaan budaya – antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Ini berarti ketika manusia melakukan interaksi akan terjadi komunikasi antarbudaya.



Menarik untuk diperhatikan pernyataan Sutaryo,<sup>14</sup> bahwa dalam setiap bahasa itu terdapat komponen-komponen yang dapat menyebabkan arti sebuah lambang menjadi berbeda (dialek, aksen, logat, jargon, dan ragam lainnya). Perbedaan makna lambang bahasa dari orang-orang yang berbeda latar belakang sosial budaya inilah yang kemungkinan menjadi penyebab distorsi komunikasi.

Menurut Omar,<sup>15</sup> Seorang yang menganggap suatu perbuatan itu baik belum tentu dianggap baik pula oleh pandangan orang lain, bergantung pada adat kebiasaan yang dipakai oleh tiap-tiap kelompok. Praktik Komunikasi sering kali mengalami distorsi yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi pesan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Perbedaan interpretasi pesan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain oleh adanya perbedaan latar belakang sosial budaya.<sup>16</sup>

Budaya yang dimiliki seseorang sangat menentukan bagaimana cara mereka berkomunikasi, karena budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karakteristik budaya yang sudah tertanam sejak kecil sulit untuk dihilangkan, dan itu akan berpengaruh pada pola komunikasi.

#### **D. Komunikasi Antarbudaya (KAB)**

Berbicara tentang komunikasi antarbudaya tidak dapat dipisahkan dari pengertian kebudayaan (budaya) sebagai-

---

<sup>14</sup>Sutaryo, *Sosiologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2005), hal. 56.

<sup>15</sup>Toha Yahya Omar, *Islam dan Dakwah*, (Jakarta: Zakia Islami Press, 2004), hal. 92.

<sup>16</sup>Sutaryo, *Sosiologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2005), hal. 65.

mana dijelaskan di atas. Komunikasi dan kebudayaan tidak hanya sekadar dua kata tetapi dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Sementara komunikasi itu sendiri begitu beragam dan kontroversi dalam pendefinisannya, atau dengan kata lain di antara para ahli komunikasi belum ada keseragaman/ kesepakatan tentang definisi komunikasi itu sendiri.

Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antara orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya berbeda.<sup>17</sup> Komunikasi antarbudaya (*intercultural communication*) adalah proses komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya (baik dalam arti ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosio ekonomi).<sup>18</sup> Stewart,<sup>19</sup> mengatakan komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, nilai-nilai, adat, kebiasaan.

Menurut Mulyana dan Rakhmat,<sup>20</sup> bila komunikasi terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial atau bahkan jenis kelamin, komunikasi demikian disebut komunikasi antarbudaya. Orbe,<sup>21</sup> mengatakan dalam komunikasi antarbudaya, satu teori yang menggunakan pendekatan fenomenologi dan memberi

---

<sup>17</sup> Larry A. Samovar, *Komunikasi Lintas Budaya (Communication Between Cultures)*, Edisi VII, Penerjemah Indri Margaretha Sidabalok, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 55.

<sup>18</sup> Melalui < [http://faculty.petra.ac.id/ido/courses/3b\\_tantangan-komunikasi.pdf](http://faculty.petra.ac.id/ido/courses/3b_tantangan-komunikasi.pdf) > [31/10/2007].

<sup>19</sup> Stewart dalam Suranto Aw., *Komunikasi Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 32.

<sup>20</sup> Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. v.

<sup>21</sup> Orbe dalam Turnomo Rahardjo, *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 46.



penekanan pada persoalan akomodasi atau adaptasi adalah *co-cultural theory* yang merupakan hasil pemikiran Orbe. Orbe lebih memilih kata *co-cultural* daripada terminologi lain seperti *subcultural*, *subordinate*, dan *minority* untuk menegaskan pemahaman bahwa tidak ada satu pun budaya dalam masyarakat yang superior terhadap budaya-budaya lain.

Menurut Fajar,<sup>22</sup> komunikasi antarbudaya di samping memang tidak mungkin lagi dapat dihindari, juga sesungguhnya sangat penting bagi penduduk semua negeri di era globalisasi dewasa ini. Kemunculannya sangat mendesak karena interdependensi antar bangsa semakin nyata, apakah itu di bidang ekonomi, iptek, politik, kebudayaan dan lain-lain. Di samping tentu saja karena mobilitas penduduk dunia ini semakin tinggi dan luas, kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa pesat. Suatu hal yang juga perlu disadari adalah di dalam proses komunikasi antarbudaya itu antara sumber dan komunikan (yaitu mereka yang terlibat di dalam komunikasi) berasal dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dari sinilah kadang-kadang muncul sifat-sifat keunikan dari komunikasi antarbudaya tersebut.

Sutaryo,<sup>23</sup> mengatakan bahwa komunikasi antarbudaya sering kali menampilkan keunikan-keunikannya tersendiri. Biasanya, pemahaman terhadap budaya lawan bicara atau kawan berkomunikasi itu relatif tidak sempurna, tak seberapa mendalam, kurang paham, atau bahkan samasekali tidak saling mengerti. Tetapi keadaan dan minat untuk berkomunikasi itu tidak dapat ditunda lagi. Di situlah keunikan-keunikan tersebut muncul.

---

<sup>22</sup> Marhaeni Fajar, *Ilmu Komunikasi: Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu dan Universitas Mercu Buana, 2009), hal. 297 mm

<sup>23</sup> Sutaryo, *Sosiologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2005), hal. 193.

Tidak seperti studi-studi komunikasi lain, maka hal yang terpenting dari komunikasi antarbudaya yang membedakannya dari kajian keilmuan lainnya adalah tingkat perbedaan yang relatif tinggi pada latar belakang pengalaman pihak-pihak yang berkomunikasi (*the communicators*) karena adanya perbedaan-perbedaan kultural.<sup>24</sup>

Berdasar pendapat yang dikemukakan para ahli di atas, dapat diformulasikan bahwa komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berbeda latarbelakang budaya, seperti bahasa, suku, adat istiadat, kebiasaan, agama, tingkat pendidikan, status sosial, atau bahkan jenis kelamin.

Dalam proses komunikasi, apalagi dalam komunikasi antarbudaya memahami kultur, cara pandang dan pengalaman orang lain secara cerdas merupakan bagian penting dan bahkan menjadi landasan dalam membangun komunikasi antarbudaya yang efektif. Harus disadari bahwa setiap individu memiliki cara yang berbeda dan sudut pandang yang tidak sama tentang suatu masalah.

Tujuan dari mempelajari komunikasi antarbudaya adalah sebagai berikut:

- a. Memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi;
- b. Mengomunikasikan antar orang yang berbeda budaya;
- c. Mengidentifikasi kesulitan – kesulitan yang muncul dalam komunikasi;
- d. Membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya;
- e. Meningkatkan keterampilan verbal dan nonverbal dalam

---

<sup>24</sup> Turnomo Rahardjo, *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 52.



- komunikasi; serta
- f. Menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif.

## E. Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pemberdayaan adalah suatu cara, di mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.<sup>25</sup> Pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan (*empowerment*) atau pembangunan (*development*). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*people centred development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal.<sup>26</sup>

Fatimah,<sup>27</sup> berpendapat bahwa manusia diciptakan penuh dengan perbedaan, baik secara vertikal atau horizontal. Secara vertikal orang dapat berbeda dalam tingkat kemampuan teknis dan manajerial serta sejarah hidupnya. Sedangkan secara horizontal setiap orang berbeda dalam kesempatan, baik karena waktu maupun kemampuan yang dimiliki sehingga berakibat pada perbedaan rezeki yang diterima seseorang.

Fenomena dan problem kemiskinan secara akademik merupakan masalah yang menggelisahkan, tetapi di sisi lain merupakan tantangan bagi kiprah Lembaga Sosial Masyarakat (LSK) yang berbasis Islam untuk menajamkan visi – misi dan meningkatkan program aksi. LKS dihadapkan pada

---

<sup>25</sup> Rappaport, dalam Siti Fatimah, *Pemberdayaan Klien dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal PMI Vol. III Nomor 2, Maret 2006 (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006), hal. 176.

<sup>26</sup> Melalui: < <http://komunitas.wikispaces.com/file/view/PEMBERDAYAAN+MASYARAKAT+ISLAM+.pdf> > [11/06/2012].

<sup>27</sup> Siti Fatimah, *Pemberdayaan Klien dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal PMI Vol. III Nomor 2, Maret 2006 (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006), hal. 176.

tuntutan adanya pengembangan atau bahkan perubahan-perubahan paradigma dan orientasi yang baru. Selain menjadi pengembang organisatoris, dengan melihat dampak kemiskinan yang luar biasa, ternyata harus menyiapkan civitasnya menjadi agen sosial dan pengabdian masyarakat, menjadi *center of excellence* dalam bidang keislaman.<sup>28</sup>

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam, menurut Istiqomah,<sup>29</sup> merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat. Oleh karena itu hal ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat Islam harus dilakukan secara sungguh-sungguh, terprogram/terencana (melalui proses dan tahap-tahap tertentu), dilakukan terus menerus dan berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat Islam, harus ada skala prioritas program yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan analisis yang matang, sesuai kultur masyarakat, potensi alam dan pertimbangan strategis lainnya. Tujuan pemberdayaan adalah upaya melakukan perubahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik, mandiri, sejahtera lahir dan batin dan mampu memecahkan masalahnya sendiri.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam bukan

---

<sup>28</sup> Muhsin Kalida, *Networking: Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSK) dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Jurnal PMI Vol. III Nomor 2, Maret 2006 (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006), hal. 189.

<sup>29</sup> Istiqamah, melalui: < <http://komunitas.wikispaces.com/file/view/pemberdayaan+dalam+konteks+pengembangan+masyarakat+islam.pdf> > [11/06/2012].



saja memuat nilai-nilai humanistis, moral dan sosial, tetapi juga sarat dengan motivasi kerja keras, menghargai waktu, menolong sesama dalam hal kebaikan, membantu yang lemah dan menyantuni yang miskin. Ini semua hendaknya menjadi inspirasi bagi kita dalam upaya membangun masyarakat Islam melalui berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan serius dan perencanaan matang guna mengangkat dan meningkatkan harkat – martabat masyarakat yang berada pada lapisan tidak mampu (masyarakat miskin dan terbelakang dari berbagai aspeknya) menjadi masyarakat yang mandiri dan maju. Apalagi Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat Islam, tentu pemberdayaan masyarakat harus menjadi skala prioritas program pemerintah, ormas Islam dan berbagai Partai Politik Islam lainnya yang dilakukan secara bersama dan terpadu.

Upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Islam dengan mempertimbangkan budaya masyarakat yang berpijak pada nilai-nilai universal kemanusiaan menjadi sebuah tuntutan dan keharusan, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya dengan beranekaragam budaya, baik bahasa daerah, adat-istiadat dan tradisi maupun agama. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat akan berjalan sesuai dengan tujuan/harapan jika menggunakan pendekatan komunikasi antarbudaya.

## **F. Komunikasi Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam**

Sebelum mendefinisikan komunikasi yang efektif, barangkali kita harus merujuk dulu kepada kata “efektif” itu sendiri. Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai men-

capai sasaran yang diinginkan (*memproduksi desired result*), berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual dan nyata (*actual dan real*). Dengan demikian, pengertian komunikasi yang efektif dapat diartikan sebagai penerimaan pesan oleh komunikan atau *receiver* sesuai dengan pesan yang dikirim oleh sender atau komunikator, kemudian penerima pesan atau komunikan memberikan respon yang positif sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, komunikasi efektif itu terjadi ketika ada aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut yaitu komunikator dan komunikan.<sup>30</sup>

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang terjadi apabila suatu pesan yang dikirimkan komunikator kepada penerima pesan (komunikan) dapat diterima dengan baik atau sama dengan pesan yang dimaksudkan oleh pengirim pesan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Pada saat menyampaikan pesan, pengirim perlu memastikan apakah pesan yang disampaikan telah diterima dengan baik oleh penerima pesan. Sementara penerima pesan perlu berkonsentrasi agar pesan dapat diterima dengan baik dan memberikan umpan balik (*feedback*) kepada pengirim. Umpan balik menjadi penting sebagai proses klarifikasi untuk memastikan tidak terjadi salah interpretasi terhadap pesan yang disampaikan.

Menurut Tubbs dan Moss,<sup>31</sup> komunikasi dianggap efektif jika menghasilkan 5 hal sebagai berikut:

a. Menghasilkan Pengertian. Artinya penerimaan yang baik

---

<sup>30</sup> Melalui: < <http://id.shvoong.com/humanities/linguistics/2198716-pengertian-komunikasi-yang-efektif/> > [30/01/2012].

<sup>31</sup> Tubbs, Stewart L dan Sylvia Moss, *Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar (Buku Pertama)*, terjemahan Dedy Mulyana dan Gembirasari, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).



- dari isi pesan, dimaknai sama seperti yang dimaksud oleh sumber/pengirim pesan.
- b. Menghasilkan Kesenangan. Artinya komunikasi yang dilancarkan membuat hubungan semakin hangat, akrab dan menyenangkan.
  - c. Mempengaruhi Sikap. Artinya pesan yang disampaikan membawa pengaruh sikap pada pribadi penerima pesan.
  - d. Menghasilkan Hubungan Sosial yang Baik. Artinya komunikasi yang dilancarkan membuahkan hubungan sosial yang lebih baik dan akrab.
  - e. Mempengaruhi Tindakan. Keberhasilan komunikasi biasanya diukur dari tindakan nyata yang dilakukan penerima pesan.

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi, secara sederhana terangkum dalam satu kata REACH (*Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble*), yang berarti merengkuh atau meraih. *Pertama* adalah *Respect* yaitu sikap hormat dan menghargai (komunikasikan) lawan bicara kita. Pada prinsipnya manusia ingin dihormati, dihargai dan keberadaannya dianggap penting. Jika harus mengkritisi seseorang, lakukan dengan cara yang tidak menyinggung dan menyakiti perasaannya. *Kedua* adalah *Empathy*, yaitu kemampuan menempatkan diri kita pada posisi dan situasi/kondisi yang dihadapi orang lain. Sebelum membangun komunikasi/mengirimkan pesan, terlebih dulu harus mengerti dan memahami suasana hati calon penerima pesan sehingga pesan yang disampaikan tidak mengalami hambatan psikologis atau penolakan dari komunikasikan. Prinsip ini sama dengan "memperlakukan orang lain seperti diri kita ingin diperlakukan". *Ketiga* adalah *Audible*. Makna dari *audible* antara lain: dapat didengar/dimengerti dengan baik. Kunci utama *audible* adalah: mengemas pesan agar mudah dimengerti; fokus pada informasi yang

penting; gunakan ilustrasi untuk membantu memperjelas isi dari pesan; berikan perhatian pada fasilitas dan lingkungan yang ada di sekitar; antisipasi kemungkinan masalah yang akan muncul; dan selalu menyiapkan rencana atau pesan cadangan. *Keempat* adalah *Clarity* yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan. Pesan yang akan disampaikan harus jelas sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berbeda. *Clarity* juga sangat tergantung pada kualitas suara dan bahasa yang digunakan. Penggunaan bahasa yang tidak dimengerti, akan membuat isi dari pesan tidak dapat mencapai tujuan. Beberapa cara menyiapkan pesan agar jelas yaitu: tentukan goal yang jelas; luangkan waktu untuk mengorganisasikan ide, pikiran atau gagasan sebelum disampaikan; penuhi tuntutan kebutuhan format bahasa yang dipakai; buat pesan yang jelas, tepat dan meyakinkan serta penyampaian yang fleksibel. *Kelima* adalah *Humble* yaitu sikap rendah hati. Sikap ini terkait dengan prinsip dasar yang pertama "*Respect*" (rasa menghormati dan menghargai orang lain). Rendah hati bisa berarti tidak sombong dan tidak menganggap diri paling sempurna.

Selain lima prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi, hal lain yang juga penting diperhatikan adalah cara dalam melakukan komunikasi yang efektif,<sup>32</sup> sebagai berikut:

- a. Menguasai ragam komunikasi. Mulai dari menulis sampai berbicara. Teknik komunikasi yang dipakai bergantung pada siapa yang dihadapi. Penguasaan ragam komunikasi meminimalisasi terjadinya ketidaktepatan memakai cara komunikasi.

---

<sup>32</sup> Melalui: < <http://www.anneahira.com/komunikasi-efektif.htm> > [28/01/2012].



- b. Terbuka. Dalam artian bersedia untuk dikoreksi kalau itu memang keliru. Siap meminta maaf jika terbukti salah.
- c. Fleksibel. Anda tidak harus melulu serius dengan pembawaan gaya yang formal dan kaku. Anda sekali-kali memakai gaya informal dengan selipan rasa humor agar terlihat santai dan *fresh*.
- d. Lugas dan ringkas. Pergunakan kata yang *to the point* dan diringkas, sedapat mungkin dalam susunan kata yang pendek. Pemakaian kata yang bertele-tele membuat komunikasi menjadi membosankan.
- e. Memahami komunikasi nonverbal. Anda perlu tahu *gesture* tubuh dari komunikan. Terkadang bahasa tubuh lebih bermakna ketimbang bahasa verbal karena sulit dimanipulasi.
- f. Pendengar yang baik. Perhatikan dan simak dengan baik saat orang berbicara dengan anda.
- g. Konsisten. Tidak *plin-plan* dan mengubah begitu saja apa yang sudah diucapkan.
- h. Egaliter. Menghilangkan sekat-sekat pembatas yang mungkin muncul. Mulai dari struktur formal (atasan-bawahan) hingga aspek kultural.

Dalam melancarkan aksi pemberdayaan masyarakat, komunikasi antarbudaya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip komunikasi efektif sebagaimana disebutkan di atas harus menjadi perhatian jika program pemberdayaan masyarakat akan diterima dan mencapai hasil yang diharapkan.

Komunikasi antarbudaya menjadi faktor penting dalam upaya mencapai tujuan dan keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat Islam. Dalam pemberdayaan masyarakat pasti akan bersentuhan dengan pemahaman keagamaan masyarakat, bahasa yang berbeda, serta budaya dan adat istiadat yang melingkupinya, semua itu harus disikapi dengan

hati-hati dan perhitungan yang cerdas. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam konteks komunikasi antarbudaya tentu sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Islam.



## BAGIAN 4

# PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI PESANTREN

### A. Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan salah satu model dari pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini mengingat kebanyakan pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Pesantren dengan cara hidupnya yang bersifat kolektif barangkali merupakan perwajahan atau cerminan dari semangat dan tradisi lembaga gotong royong yang umum terdapat di pedesaan.<sup>1</sup> Nilai-nilai keagamaan seperti *ukhuwah* (persaudaraan), *ta'awun* (kerja sama), *jihad* (berjuang), taat, sederhana, mandiri, ikhlas dan berbagai nilai eksplisit dari ajaran Islam lain yang mentradisi di pesantren ikut mendukung kelestariannya.

Pesantren berhasil mempertegas eksistensinya sebagai pusat belajar masyarakat atau *community learning centre*. Pada konteks ini, pesantren memiliki otonomi dengan menggunakan model manajemen sendiri (*self management*) yang bela-

---

<sup>1</sup> Zamacksyari Dhofier. "Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai". Jakarta: LP3ES. 1982: 60.

kangan dikenal dengan istilah manajemen pendidikan berbasis masyarakat. Dalam sejarahnya, ketika lembaga-lembaga sosial yang lain belum berjalan secara fungsional maka pesantren telah menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam belajar agama, beladiri, mengobati orang sakit, konsultasi pertanian, mencari jodoh sampai pada menyusun perlawanan terhadap kaum penjajah. Tegasnya, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang unik, tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan agama ini yang khas. Pesantren ini memiliki jaringan sosial yang kuat dengan masyarakat dan dengan sesama pesantren karena sebagian besar pengasuh pesantren tidak saja terikat pada kesamaan pola pikir, paham keagamaan, namun juga memiliki hubungan kekerabatan yang cukup erat.<sup>2</sup>

Seiring dengan derasnyanya arus perubahan sosial akibat modernisasi-industrialisasi, mau tidak mau menuntut pesantren untuk memberikan reaksi atau respon secara memadai. Reaksi pesantren menghadapi perubahan yang berjalan selama ini ada yang lunak dan ada yang keras. Ada yang membuka dan ada yang menutup diri. Namun meski ada yang mendefinisikan zaman sekarang sebagai zaman edan atau *jahiliyah modern*, ternyata tidak sedikit yang mencoba melakukan transformasi dengan melakukan mobilitas budaya yang menyebabkan doktrin, lembaga dan pranata sosial menjadi tetap relevan. Selain itu, pesantren juga selalu dituntut untuk melakukan *adjustment and rejustment*,<sup>3</sup> mulai dari melakukan diversifikasi program dengan membuat yayasan, memasuk-

---

<sup>2</sup> M. Dawam Rahardjo. "Pesantren dan Pembaharuan". Jakarta: LP3ES. Cet. IV. 1988: 9

<sup>3</sup> Azyumardi Azra. "Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru". Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999: 108.



kan sistem sekolah, kontekstualisasi kitab kuning, memodernisasi manajemen pengelolaan dan lain-lain.

Pesantren dalam menghadapi perubahan dituntut melakukan kontekstualisasi tanpa harus mengorbankan watak aslinya selaku institusi pendidikan, keagamaan dan sosial. Pesantren harus membenahi kelemahannya di antaranya dengan menerapkan manajemen pendidikan berbasis masyarakat. Apalagi berdasarkan tuntutan modernisasi setiap lembaga pendidikan termasuk lembaga pesantren harus bertumpu pada masyarakat.

Pembaruan pesantren dilakukan dalam upaya merefungsionalisasi pesantren agar peranan dan sumbangannya sebagai pelaku pembangunan masyarakat dirasakan secara nyata. Pada konteks ini, lembaga pesantren menempatkan diri sebagai institusi dinamisator dan katalisator pembangunan masyarakat desa bukan hanya di bidang keagamaan, namun juga di bidang-bidang kehidupan sosial lainnya. Gejala tumbuhnya minat pesantren untuk mengembangkan program kemasyarakatan secara sederhana dipetakan dalam dua bagian. *Pertama*, program kemasyarakatan yang tumbuh dan dikembangkan oleh inisiatif pihak pesantren sendiri sedangkan yang *kedua* adalah pendekatan program kemasyarakatan yang dikembangkan atas suatu kerja sama dengan pihak luar.<sup>4</sup> Pesantren dalam kaitan dengan proses pengembangan masyarakat dituntut memposisikan dirinya sebagai pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan dan pusat pemberdayaan bidang masyarakat, di samping tugasnya sebagai lembaga pendidikan keagamaan.

---

<sup>4</sup> Muhamad Ali. "Pendidikan Pluralis-Multikultural" dalam *Kompas*, (Jakarta, PT. Kompas, 26 April 2002), hal. 4.



Megawati Soekarno Putri ketika menjabat Presiden pernah menginstruksikan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) untuk mengembangkan pola pendidikan agama yang berwawasan multikultural.<sup>5</sup> Sayang, himbauan itu belum mendapat tanggapan secara sungguh-sungguh. Wacana pendidikan multikulturalisme memang sempat menghangat di mass media dan menjadi bahan diskusi di sejumlah forum, hanya dalam perkembangannya tidak diikuti dengan sejumlah upaya secara sungguh-sungguh dan continue untuk memformulasikannya ke dalam gagasan yang lebih membumi. Bahkan dapat dikatakan, upaya mempromosikan konsep pendidikan multikultural sebagai bagian dari upaya meredam potensi konflik horisontal maupun vertikal bangsa akibat salah paham soal SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) belum berjalan secara memadai. Sebaliknya, para elit politik, elit agama, atau pakar ilmu sosial dalam menganalisis akar persoalan konflik cenderung menjadikan kesenjangan ekonomi dan sosial sebagai kambing hitam. Amat sedikit yang mau mengakui kalau persoalan konflik dan kekerasan itu amat berkait erat dengan praktik pengajaran (pendidikan) agama dan moral yang belum memupuk kerukunan bersama.

Sebagai implikasinya, upaya-upaya memperlunak kebekuan dan mencairkan kekakuan pemikiran keagamaan dan kemanusiaan dari masing-masing agama dan budaya belum dianggap terlalu penting untuk digiring ke ranah pendidikan. Mulai dari segi materi sampai metodologi yang diajarkan di sekolah, pesantren, seminar, simposium memiliki kecenderungan untuk mengajarkan pendidikan agama secara parsial (kulitnya saja). Materi pendidikan agama misalnya lebih ter-

---

<sup>5</sup> Busman Edyar. "R Sisdiknas dan Pendidikan Pluralis-Multikultural", dalam *Kompas*, (Jakarta, PT. Kompas, 31 Maret 2003), hal. 4.



fokus pada mengurus masalah *private affairs* (*al ahwal al syakhsiah*) semacam masalah keyakinan seorang hamba dengan Tuhannya *face to face*. Seakan masalah surga atau kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan ibadah atau akidah saja. Sebaliknya pendidikan keagamaan kurang peduli dengan isu-isu umum semacam sikap antikorupsi, wajibnya transformasi sosial, dan kepedulian terhadap sesama.<sup>6</sup> Fenomena di atas tentu saja patut disesalkan. Pasalnya, saat ini konsep pendidikan multikulturalisme yang berintikan penekanan upaya internalisasi dan karakterisasi sikap toleransi terhadap perbedaan agama, ras, suku, adat dan lain-lain di kalangan peserta didik sangat dibutuhkan. Alasannya, kondisi-situasi bangsa saat ini belum benar-benar steril dari ancaman konflik etnis dan agama, radikalisme agama, separatisme, dan disintegrasi bangsa. Bahkan dapat dikatakan, serangkaian kerusuhan yang memakan ribuan korban tewas seperti kasus Pekalongan (1995), Tasikmalaya (1996), Rengasdengklok (1997), Sanggau Ledo, Kalimantan Barat (1996 dan 1997), Ambon dan Maluku sejak 1999, sampai Sampit - Kalimantan Timur (2000) sewaktu-waktu bisa meledak jika tanpa langkah antisipatif secara dini. Untuk itu, menghadirkan konsep pendidikan multikultural merupakan bagian dari usaha komprehensif dalam mencegah dan menanggulangi konflik bernuansa SARA.

Pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, soliditas, dan intimitas di antara beragamnya etnik, ras, agama, budaya, serta kebutuhan di antara kita. Paparan di atas juga memberi dorongan dan spirit bagi lembaga pendidikan nasional untuk mau menanamkan sikap kepada anak didik untuk menghargai orang, budaya,

---

<sup>6</sup> Megawati Soekarnoputri. "UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional", (Jakarta, Lembaran Negara, 8 Juli 2003), hal. 9.

agama, dan keyakinan yang dianut orang lain. Diharapkan, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural dapat membantu siswa mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, dan keperibadiannya. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah akan menjadi salah satu medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, seyogyanya kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan didesiminasikan melalui lembaga pendidikan serta jika mungkin ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang, baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu perhatian utama dari Pasal 4 Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal itu dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.<sup>7</sup>

Tulisan ini diramu dari hasil penelitian tentang "Penanaman Paham Multikulturalisme (Toleransi Beragama) Bagi Santri di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu dari Aspek Model Komunikasi, Pendekatan dan Materi Pendidikan yang diberikan". Secara akademis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep pendidikan multikultural yang dapat menjadi sebuah solusi dalam menciptakan harmonisasi (kerukunan hidup) di tengah elemen bangsa yang

---

<sup>7</sup> Manfred Open dan Wolfgang Karcher. *"Dinamika Pesantren"*. Jakarta: P3M. 1988: 92-93.



sangat kompleks dan beragam dari berbagai aspek. Sedangkan dari sisi praktis berguna dalam upaya internalisasi dan karakterisasi sikap toleransi terhadap perbedaan agama, ras, suku, adat dan lain-lain, terutama di kalangan peserta didik. Selain itu, dapat menjadi bahan untuk membuat formulasi yang lebih membumi oleh pihak-pihak yang berkompeten.

## B. Paradigma Pendidikan Multikultural

Ketika kehidupan berbangsa dan bernegara belum steril dari berbagai konflik sosial seperti sekarang maka pendidikan multikultural menjadi salah satu bahan perbincangan yang cukup penting. Sebagaimana pandangan dari sebagian sosiolog yang mengatakan bahwa upaya tepat dalam menciptakan harmonisasi, kerukunan dan kedamaian bagi masyarakat bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama dan yang lainnya adalah dengan pendidikan multikultural.

Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidaktoleranan (*intorelable*) seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sah-tidaknya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, serta hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

Soenarjo,<sup>8</sup> menyatakan penanaman sikap toleransi dan kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan serta latar belakang sosial-budaya berbeda-beda sebagaimana ditekankan dalam

---

<sup>8</sup> R. H. A. Soenarjo. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI), hal. 94.

pendidikan multikultural tampaknya sejalan dengan ajaran dan nilai etis al-Qur'an. Hal ini antara lain dapat kita simak dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13, yang artinya:

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu (manusia) dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertawa di antara kamu. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*

Perbedaan pandangan hidup, dan keyakinan hendaknya menjadi penyemangat untuk saling berlomba menuju kebaikan. Kelak di akhirat, Allah yang akan menerangkan mengapa dirinya berkehendak seperti itu dan keputusan yang paling adil di tangan-Nya (Q.S. al-Maidah: 48). Pemahaman yang didasarkan kesadaran kemajemukan secara sosial, budaya dan agama telah menjadi dasar dalam membangun gagasan pendidikan multikulturalisme.

Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan yang kosong, namun ada kepentingan politik, sosial, ekonomi dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Wacana pendidikan multikultural pada awalnya sangat bias Amerika karena punya akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak lacakan sejarah atau asal-usul pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik diskriminasi di lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Paul Gorski. 2003. *"Multicultural Philosophy Series, Part 1: A Brief History of Multicultural Education"* dalam *The McGraw Hill Education Papers online*, (The McGraw-Hill Companies), hal. 1.



Didorong oleh tuntutan warga Amerika keturunan Afrika Latin/Hispanic, warga pribumi dan kelompok marjinal lain terhadap persamaan kesempatan pendidikan serta didorong oleh usaha komunitas pendidikan profesional untuk memberikan solusi terhadap masalah pertentangan ras serta rendahnya prestasi kaum minoritas di sekolah, menjadikan pendidikan multikultural sebagai slogan yang sangat populer pada tahun 1990-an.<sup>10</sup> Selama dua dekade konsep pendidikan multikultural menjadi slogan yang sangat populer di sekolah-sekolah AS. Secara umum, konsep ini diterima sebagai salah satu strategi penting dalam mengembangkan toleransi dan sensitivitas terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka macam di negara ini.

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar AS khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik.<sup>11</sup>

Pada konteks Indonesia, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru karena hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa Indonesia namun juga mem-

---

<sup>10</sup> Cameron McCharthy. 1994. "Multicultural Discourses and Curriculum Reform: A Critical Perspective" dalam *Journal Winter Online*, (Illinois, University of Illinois, Number 1 Volume 44), hal. 1.

<sup>11</sup> William, H. Watkins. 1994. "Multicultural Education: Toward a Historical and Political Inquiry" dalam *Journal Winter Online*, (Illinois, University of Illinois, Number 1 Volume 44), hal. 9.

beri peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu dirasakan perlu kita menerapkan paradigma pendidikan multikultur untuk menangkal semangat primordialisme tersebut.<sup>12</sup>

Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.<sup>13</sup>

*“The goal of multicultural education is an education for freedom. . . . Multicultural education should help students to develop the knowledge, attitudes, and skills to participate in a democratic and free society. . . . Multicultural education promotes the freedom, abilities and skills to cross ethnic and cultural boundaries to participation in other cultures and groups”* (Tujuan pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan. Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk membantu para siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam berpartisipasi dalam masyarakat yang bebas dan demokrasi. Pendidikan multikultural mengembangkan kebebasan, ke-

---

<sup>12</sup> Conny Semiawan. “Memelihara Integrasi Sosial dan Menegakkan HAM Melalui Pendidikan Multikultural” dalam *Sari Makalah Seminar Integrasi Sosial dan Penegakkan HAM*, (Ditjen HAM.: 14 September 2003), hal. 10.

<sup>13</sup> James A. Banks. 1997. “Multicultural education: Characteristics and goals” In J. A. Banks and C. A. M. Banks (Eds.) *Multicultural education: Issues and perspectives*, (Boston, Allyn and Bacon), hal. Xi.



mampuan dan keterampilan dalam menerobos batas-batas budaya dan etnis dalam berpartisipasi dengan kebudayaan dan kelompok lain).<sup>14</sup>

Menurut Banks,<sup>15</sup> substansi pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan (*as education for freedom*) sekaligus sebagai penyebar-luasan gerakan inklusif dalam rangka mempererat hubungan antar sesama (*as inclusive and cementing movement*). Jadi pendidikan multikultural bersifat antirasial, mendasar, penting (berguna) untuk semua siswa, pervasif (dapat meresap, menembus, dan merembes), untuk keadilan sosial serta merupakan sebuah proses dan pedagogi kritis.

Salah satu ciri utama pendidikan multikultural adalah tidak adanya kebijakan dari lembaga pendidikan (sekolah) yang menghambat toleransi termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis, dan jenis kelamin. Pendidikan multikultural harus menumbuhkan toleransi di kalangan anak didik terhadap perbedaan budaya, misalnya menyangkut tata cara atau adat istiadat berpakaian, musik, makanan kesukaan, memberikan kebebasan bagi mereka dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh kesadaran mereka agar mau terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.<sup>16</sup>

Sebagai konsekuensinya, agar pendidikan lebih multikultural, pendidikan dan pengajaran harus memperkokoh

---

<sup>14</sup>Rose Reissman. 1994. "The Evolving Multicultural Classroom" dalam *ASCD Publication*, (New York, ASCD), hal. 3.

<sup>15</sup>James A. Banks. 1997. "Multicultural education: Characteristics and goals" In J. A. Banks and C. A. M. Banks (Eds.) *Multicultural education: Issues and perspectives*, (Boston, Allyn and Bacon).

<sup>16</sup>Jennifer Romanowski. 2002. "Exploring My Practicum Community A Critical Analysis of Multicultural Education Initiatives" in the *Winning Paper*, (Nipissing University), hal. 2.

pluralisme dan menentang adanya rasisme, diskriminasi gender dan bentuk-bentuk lain dari intoleransi serta dominasi sosial. Pada konteks ini tentu harus dilakukan transformasi kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstra-kurikuler, dan peran guru menjadi multikultural. Menurut Gay's, prinsip-prinsip penting dalam menerapkan pendidikan multikultural adalah kurikulum berdasarkan sejarah dan berpusat pada keragaman, berorientasi pada perbaikan, pengajaran mengarah pada keragaman, kurikulum tergantung pada konteks, bersifat menyerap keragaman dan dapat diterapkan secara luas, bersifat komprehensif serta mencakup semua level pendidikan.<sup>17</sup>

Penggunaan strategi *cooperative learning* dalam pendidikan multikultural diasumsikan bisa mendorong anak untuk saling belajar tentang segi-segi positif dari temannya. Dengan cara ini, mereka akan terkondisikan dengan proses pembelajaran di mana seorang siswa belajar hidup bersama siswa lain dalam suasana saling menghormati, saling toleransi dan saling memahami.<sup>18</sup>

Penerapan paradigma pendidikan multikultural dengan strategi *cooperative learning* diyakini dapat memupuk nilai-nilai baru (*co-creating new values*) pada diri anak didik berupa kesediaan untuk mau hidup rukun dengan sesama dalam suasana kemajemukan. Proses pembelajaran ini diakui akan dapat mengubah cara berpikir anak didik dari sebelumnya bersifat sempit dan fanatis dengan membanggakan budaya mereka

---

<sup>17</sup> Lihat dalam Francisco Hidalgo. 2003. "*Multicultural Education Landscape For Reform In Twenty First Century*", (New Mexico, New Mexico State University), hal. 51.

<sup>18</sup> Conny Semiawan. "*Memelihara Integrasi Sosial dan Menegakkan HAM Melalui Pendidikan Multikultural*" dalam *Sari Makalah Seminar Integrasi Sosial dan Penegakkan HAM*, (Ditjen HAM.: 14 September 2003), hal. 1.



sendiri (*microculture*) menjadi demokratis, multikulturalis-pluralis serta mampu menghargai budaya orang lain.

Pada akhirnya, bisa tidaknya wacana pendidikan multikulturalisme diterapkan dalam lembaga pendidikan tergantung pada ikhtiar kita bersama. Pada konteks ini, Depdiknas RI agaknya sebagai pihak yang pantas ditunggu peran aktifnya. Setidak-tidaknya Depdiknas RI mau mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Pandangan multikulturalisme sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum sekolah, sebagai mata pelajaran ekstra-kurikuler atau secara formal dibakukan menjadi bagian dari kurikulum sekolah (khususnya untuk daerah-daerah bekas konflik berdarah antar sukubangsa, seperti di Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan berbagai tempat lainnya. Penerapan pandangan multikulturalisme dalam dunia pendidikan diharapkan menjadi upaya preventif dan antisipatif terhadap kemungkinan munculnya konflik berdarah antar sukubangsa.<sup>19</sup>

Pendidikan multikultural merupakan pelembagaan filsafat pluralisme budaya dalam proses pendidikan, yang dalam praktiknya pengelolaan pendidikan didasarkan pada semangat menjunjung tinggi prinsip persamaan, saling menghargai, penerimaan, pemahaman serta komitmen moral untuk keadilan sosial.<sup>20</sup>

Pendidikan multikultural perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat. Sejauh ini, ada empat pendekatan dalam

---

<sup>19</sup> Parsudi Suparlan. 2003. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural" dalam *Artikel CMDD*, (Jakarta, CMDD Online, Melalui: [http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel\\_ps.htm](http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm)), hal. 1.

<sup>20</sup> Geneva Gay. 1994. "A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education" dalam *Urban Education Monograph Series*, (Washington, NCREL's Urban Education Program), hal. 2.

pendidikan multikultural yang dapat dipertimbangkan oleh pendidik dalam mengajarkan pendidikan multikultural. *Pertama*, pengajaran tentang eksistensi dan peranan berbagai kelompok budaya dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pendekatan tambahan, di mana pelajaran multikultural dan unit-unit kajian multikultural melengkapi kurikulum yang ada. *Ketiga*, pendekatan transformasi, di mana sifat dasar kurikulum dan pengajaran yang sudah berjalan diubah dengan merefleksikan pandangan dan pengalaman kebudayaan, etnik, ras dan kelompok sosial yang beragam. *Keempat*, pendekatan tindakan sosial dan pengambilan kebijakan, dengan mengajarkan para siswa bagaimana menjelaskan nilai-nilai budaya dan etnis mereka serta menggunakan tindakan sosial politik untuk meningkatkan persamaan, kebebasan dan keadilan bagi setiap orang.

Sleeter dan Grandt telah mengkaji berbagai literatur tentang pendidikan multikultural untuk menentukan bagaimana bidang pendidikan multikultural dikonseptualisasikan. Analisis mereka menghasilkan empat pendekatan umum dalam pendidikan multikultural. *Pertama*, pengajaran kepada siswa yang berbeda-beda secara budaya untuk menyesuaikan dengan arus besar masyarakat. *Kedua*, pendekatan hubungan kemanusiaan yang menekankan keanekaragaman masyarakat yang mau hidup bersama secara harmonis. *Ketiga*, pendekatan kajian kelompok tunggal yang berkonsentrasi pada pengembangan kesadaran, penghargaan, penerimaan satu kelompok pada satu waktu. *Keempat*, memusatkan pada penghilangan prasangka, memberikan persamaan kesempatan dan keadilan sosial untuk semua kelompok dan mempengaruhi distribusi kekuasaan secara wajar terhadap kelompok budaya dan etnis. Berdasarkan hal ini, mereka menambahkan pendekatan *Kelima*, pendidikan dilaksanakan secara multikultural dan



menyusun kembali masyarakat serta mengajarkan siswa menjadi pemikir kritis, analitis dan pembaharu sosial yang berkomitmen untuk meredistribusikan kekuasaan dan sumber-sumber lain di antara kelompok yang berbeda-beda.

Model pendidikan multikultural yang lain adalah mereformasi sistem pembelajaran, bukan merevisi materi pembelajaran. Pada konteks ini, dilakukan *affirmative action* (tindakan khusus) misalnya dengan memfasilitasi pembauran dan interaksi antar siswa baru dari berbagai latar belakang budaya serta menyusun berbagai program kelas lintas etnis.

Jika mengaca pada konteks sosial Indonesia yang majemuk maka model pendidikan multikultural yang digunakan bisa memadukan dua model pembelajaran multikultural di atas. Model penambahan informasi dilakukan dengan menyusun teks sejarah baru yang mengakomodasikan kontribusi dan partisipasi warga dari berbagai latar belakang dalam pembentukan Indonesia secara lebih fair. Sementara itu, model reformasi sistem pembelajaran antara lain dilakukan dengan menciptakan sistem pembelajaran yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai toleransi, kepekaan sosial dan mengurangi prasangka antar kelompok.

Secara terminologis, istilah pesantren sudah mengisyaratkan adanya interaksi yang harmonis antara Islam dengan budaya lokal (Nusantara). Konon, "pesantren" merupakan pinjaman dari bahasa sangsekerta : *santri*, yang berarti orang yang pandai membaca kitab suci. "Pesantren" sendiri dimaknai sebagai tempat penganut agama Hindu dan Budha yang menyelenggarakan pembelajaran dalam rangka memahami kitab suci mereka. Pada gilirannya, istilah tersebut lebih sering digunakan dan bahkan menjadi istilah khas Islam Indonesia.

Dalam pengertian yang lebih dalam, artikulasi konsep *Tawassuth* (modernisasi) yang diyakini para ulama pemangku

pesantren telah menempatkan mereka pada satu posisi untuk menerima tradisi dan budaya lokal yang berkembang di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam bahkan menjadikannya *wasilah* (media) strategis bagi penanaman dan pengembangan nilai-nilai aqidah ajaran Islam itu sendiri. Jelasnya, pesantren lokal dengan budaya lokal telah memosisikan pesantren khususnya pesantren di Jawa sebagai bagian dari instansi budaya setempat yang sangat penting dan tidak terpisahkan.

Karakteristik Islam yang ditampilkan oleh para Ulama pemangku pesantren sebagaimana Nabi saw mengajarkannya adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai *intifak* (inklusif), *tawassuth* (moderat), *musawah* (persamaan), dan *tawazun* (seimbang). Karena itu maka pesantren tampil pula sebagai agen pembudayaan nilai, norma sekaligus pesan-pesan keagamaan yang sarat dengan harmoni, kerukunan, persatuan dan kedamaian, bahkan para ahli menilai pesantren mempunyai peran yang cukup signifikan dalam melestarikan budaya lokal, termasuk memelihara nilai-nilai dan tatanan sosial yang harmonis di sekelilingnya.

Prinsip-prinsip ajaran damai dalam Islam ini bercermin pada *uswah hasanah* yang tercermin pada akhlak sosial Rasulullah, pada abad kesembilan hijriyah Rasul saw mengikat perjanjian dengan Kabilah Taghlib, padahal saat itu kaum muslimin dalam keadaan kuat dan orang-orang Arab takluk padanya, tetapi Rasul saw menghormati mereka tetap dalam agamanya, Kristen. Rasul saw berdamai dengan warga Kristen Najran dan membiarkan mereka bebas menganut agamanya. Ia pun mengambil *jizyah* dari orang-orang Yaman yang tetap dalam agamanya, Kristen.

Begitu pula dengan para sahabat, mereka melakukan apa yang dilakukan Rasul saw. Abu Bakar berpesan kepada



Usman ibn Zaid ketika di utus ke Syiria agar bersikap bijak terhadap orang yang mengikat perjanjian dengannya, menunjukkan akhlak yang baik ketika berperang, menjaga harta mereka, dan membebaskan para rahib mengimani apa yang mereka yakini.

Pada masa Abu Bakar, Kahlid ibn Walid menyepakati dengan warga Kristen Khairat di mana gereja-gereja dan istana mereka tidak dihancurkan dan Ia tidak melarang mereka membunyikan lonceng gereja atau mengeluarkan salib di hari raya. Disepakati pula agar saling tolong menolong dan tidak saling menggunjing. Sementara itu, para orangtua yang sudah tidak bisa bekerja tidak dikenakan biaya pajak, bahkan Ia sendiri dan anak-anaknya mendapatkan santunan dari Baitul Mal kaum Muslimin.

Apa yang dikemukakan di sini, hanyalah sebagian contoh kecil dari sekian banyak *testimony* betapa Islam dengan kekuatan nilai dan kemuliaan ajaran yang dikandung harus senantiasa diposisikan dan diimplementasikan secara elegan dan bermartabat di manapun dan dalam situasi apa pun. Inilah salah satu alasan mengapa pesan-pesan yang disampaikan Rasul saw dapat diterima dengan baik oleh umat di muka bumi ini, dan teladan ini pula yang di contoh dan dipraktikkan oleh para ulama pemangku pesantren di Indonesia.

Mengingat risalah *samawiyat* yang dibawa Rasul saw adalah *minadz dzulumat ilan-nur*, mereka jauh sebelumnya, model ini pula yang digunakan Nabi Musa as dan Nabi Harun as saat menghadapi Fir'aun (Q.S. Thaha: 44). Sementara sikap lunak dan lemah lembut adalah keniscayaan dalam sebuah dakwah tidak menghindar, bahkan diupayakan dengan cara-cara elegan dengan membangun komunikasi yang baik (Q.S. Ali Imran: 159). Artinya jelas, bahwa Islam dikembangkan dengan cara dan nuansa yang penuh kedamaian dan lemah

lembut, bukan dengan cara sebaliknya; menakutkan dan penuh kekerasan.

### C. Ayat-ayat al-Qur'an tentang Perdamaian

Membaca al-Qur'an dan juga teks-teks keagamaan Islam sama dengan memasuki sebuah supermarket (ini hanya perumpamaan) yang di dalamnya tersedia segala macam barang yang dibutuhkan manusia. Untuk memilih barang tidak begitu saja mengambilnya, melainkan harus terlebih mengetahui barang apa yang akan diambilnya, apa fungsinya, masa berlakunya, *made in* mana, dan seterusnya. Kesalahan memilih barang akan berakibat fatal dan merugikan, bukan hanya pada pemilih tetapi juga orang lain.

Al-Qur'an mempersiapkan segala apa saja yang dibutuhkan umat manusia khususnya kebutuhan spiritual. Ayat-ayat soal perdamaian dapat dengan mudah kita temukan dalam Al-Qur'an. Begitu pula ayat-ayat yang sepintas mengajarkan tindakan kekerasan terhadap orang/pihak lain. Ayat tentang toleransi dan pengakuan keberadaan agama dan keyakinan yang berbeda juga mudah kita temukan begitu juga sebaliknya. Demikian pula ayat tentang keadilan gender dan sebaliknya. Misalnya ayat-ayat berikut:

- (1) *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (Q.S. al-Mumtahanah [6]: 8).*
- (2) *Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula)*



- mereka bersedih hati (Q.S. al-Baqarah [2]: 62).*
- (3) *Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik. dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "sesungguhnya kami ini orang Nasrani". yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri (Q.S. al-Maidah [5]: 82).*
  - (4) *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang Musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (Q.S al-Hajj [22]: 17).*
  - (5) *Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku (Q.S. al-Kafirun [109]: 6).*
  - (6) *Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu (Q.S. al-Baqarah [2]: 120).*
  - (7) *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Q.S. al-Baqarah [2]: 190).*
  - (8) *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu (Q.S. al-Hajj [22]: 39).*

(9) *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (Q.S. al-Taubah [9]: 29).*

Ayat ke 1-5 secara harfiyah mengandung pesan untuk saling menghargai seseorang yang berbeda keyakinan. Ayat pertama misalnya mengatakan bahwa kaum muslimin tidak dilarang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap komunitas lain yang tidak mengganggu kedamaian mereka. Sementara ayat 9 mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya wajib diperangi.

Demikian pula ayat ke 6 yang mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani selama (atau dalam waktu yang cukup lama) tidak akan pernah merestui (agama) Nabi Muhammad. Sementara ayat ke 3 di atas menandakan bahwa di antara pemeluk agama lain terdapat sekelompok orang yang memiliki ikatan persahabatan yang kuat (*aqrabah mawaddatan*) dengan kaum muslimin.

Bagaimana kita melakukan pembacaan dengan cerdas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang secara harfiyah terkesan kontradiktif. Maka, membaca konteks sebuah teks di samping harfiyahnya, menjadi sebuah keharusan tidak boleh ditinggalkan jika tidak ingin membiarkan umat melakukan pilihan-pilihan ayat yang sesuai dengan kepentingan kelompoknya (*hawa nafsu*). Sekadar contoh, dalam konteks seperti ayat "*orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan meridhai (agama) mu*". Apa arti huruf "Ia"? Yahudi dan Nasrani seperti apa yang



tidak diresmikan agama Nabi Muhammad.

Dalam riwayat *Tsa'labi* yang bersumber dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwa Yahudi Madinah dan kaum Nashara Najran mengharap Nabi saw shalat menghadap kiblat mereka. Ketika Allah SWT membelokkan kiblat itu ke arah Ka'bah, mereka merasa keberatan. Mereka berkomplot dan berusaha agar Nabi saw menyetujui kiblat sesuai dengan agama mereka. Maka turunlah ayat di atas (Q.S. 2: 120) yang menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada Nabi Muhammad saw walaupun keinginannya dikabulkan.

Dalam *asbabu al-nuzul* ditemukan satu jawaban bahwa yang dimaksud Yahudi dan Nasrani adalah Yahudi Madinah dan Nasrani Najran. Apakah mereka masih memiliki keinginan sebagaimana Yahudi Madinah dan Najran. Huruf 'tan' dalam ayat ini memberikan kemungkinan bahwa kebencian kaum Yahudi Madinah dan Nasrani Najran bisa jadi bersifat temporal tidak berlangsung selamanya. Sebab huruf *ian* "*ia tufidu taukida an-nafyi wala ta'bidahu*". Jadi bisa jadi yahudi dan Nasrani saat ini tidak lagi membenci agama kaum muslimin sebagaimana Yahudi Madinah dan Nasrani Najran saat itu.

Demikian pula ayat perang (al-Baqarah, 2: 190) difirmankan berkenaan dengan "perdamaian Hudaibiyah", yaitu ketika Rasulullah saw dicegat oleh kaum Quraisy untuk memasuki Baitullah. Adapun isi perdamaian tersebut antara lain agar kaum Muslimin menunaikan umrahnya pada tahun berikutnya. Ketika Rasulullah saw beserta sahabatnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan umrah pada tahun sesuai dengan yang dijanjikan, para shahabat khawatir kalau-kalau orang-orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan merangsi dan menghalangi mereka masuk di Masjidil Haram, padahal kaum muslimin enggan melakukan peperangan pada

bulan-bulan haram (diriwayatkan oleh al-Wahidi dari al-Kalbi, dari Abi Shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas).

Jadi perintah berperang "*wa qatilu fi sabilillahil ladzina...*" (Q.S. 2: 190) sampai (Q.S. 2: 193) memberikan izin berperang sebagai upaya membalas serangan musuh, orang-orang kafir Quraisy. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *qital* (*jihad qitali*) dalam al-Qur'an bersifat *difa'i* (tindakan defensif) bukan ofensif-represif (memulai terlebih dulu). Wazan "*qaatala*" yang digunakan al-Qur'an mendukung kesimpulan ini.

Alhasil, teks-teks pesantren hasil ijtihad Ulama terdahulu yang berpotensi menimbulkan konflik, diskriminatif dan menyimpang dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang damai, berkeadilan, demokratis dan berspektif kesetaraan manusia dihadapan Allah, harus segera diijtihadi ulang untuk menampilkan wajah Islam yang benar-benar "*rahmatan lil alamin*".

Menurut al-Qur'an, *Islam* bukanlah sekadar sebuah nama yang diberikan kepada suatu sistem keyakinan atau agama, tetapi juga nama tindakan pasrah kepada kehendak Tuhan. Segala yang pasrah kepada kehendak secara sukarela atau terpaksa pun disebut *Muslim*.

Al-Qur'an menegaskan tidak ada paksaan dalam beragama. Ini merupakan salah satu prinsip unik al-Qur'an yang dimaksudkan untuk mengatur kebebasan beragama dalam Islam.

*"Tidak ada paksaan dalam agama. Kebenaran akan tampak jelas dari kesalahan. Siapa saja yang menolak kejahatan dan beriman kepada Allah, ia telah menangkap ikatan kuat yang tak pernah putus. Dan Allah mendengar dan mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah[2]: 256).*

*Katakanlah: "kebenaran itu dari Tuhanmu." Siapa yang ingin beriman, berimanlah, dan siapa yang ingin menolak, hendaklah menolak (kebenaran itu) (Q S.Al-Kahfi [18]: 20).*



..... semua yang ada di muka bumi. Lalu apakah kamu akan memaksa mereka agar menjadi orang-orang yang beriman (Q.S. Yunus [10]: 99).

Sejumlah penafsir mengutip beberapa peristiwa yang di dalamnya Nabi mengimplementasikan ketentuan dalam sura al-Baqarah: 256, dan melarang sahabatnya memaksa orang agar menerima Islam. Thabari, misalnya, menyebutkan bahwa ketika dua suku Yahudi Qainuqah dan Nadr diusir dari Madinah, mereka memiliki tanggungan atas anak-anak Ansur yang telah di tempatkan bersama keluarga Yahudi. Orangtua mereka meminta izin kepada Nabi agar mengambil kembali anak mereka dan membesarkan mereka sebagai Muslim, tetapi Nabi menjawab, "*tidak ada paksaan dalam beragama.*"

Ayat ini sendiri berperan sebagai hukum, guna melindungi kebebasan beragama sepanjang sejarah Islam. Perintah al-Qur'an seperti itulah yang menjadi alasan bagi toleransi keagamaan yang menjadi ciri sejarah Islam. Oleh karena itu, penganiayaan terhadap penganut agama lain nyaris tidak pernah terjadi. Namun, bukan merupakan hal yang tepat jika menyatakan bahwa kaum Muslim menganggap agama Yahudi dan Kristen seautentik Islam dalam menuju kebenaran. Seperti semua agama dan ideologi, Islam dalam memandang dirinya lebih unggul ketimbang agama lain saat memaparkan kebenaran. Akan tetapi, yang membuat Islam berbeda dengan agama dan ideologi lain adalah ia bersikap toleran terhadap eksistensi agama lain *ketika berkuasa*. Dampak dari prinsip ini adalah bahwa, meskipun telah berkuasa selama sekitar seribu tahun atas orang Kristen dan Yahudi, Islam tidak mendorong suatu "Islamisasi sistematis". Seperti agama lain, Islam pun mendakwahkan keyakinannya, tetapi yang membedakan dengan agama lain bahwa ia tidak membentuk organisasi atau institusi bagi dakwahnya. Dalam sejarahnya, Islam tidak

memiliki kelompok misionaris. Tugas dakwah selalu tidak terorganisasi secara sistematis. Ini berbeda dengan agama Kristen yang memiliki organisasi yang rapi dalam melaksanakan misinya.

Di samping ayat-ayat yang menunjukkan bentuk 'Pluralisme Islam', ada juga beberapa ayat yang menunjukkan eksklusivisme Islam. Dalam konteks ini, al-Qur'an menyatakan, *Agama di sisi Tuhan adalah Islam (Q.S. Ali 'Imran [3]: 19). Siapa saja yang mencari agama selain Islam, tidaklah akan diterima; di akhirat ia akan tergolong ke dalam orang-orang yang kehilangan (semua kebaikan spiritual) (Q.S. Ali 'Imran [3]: 85).*

Akan tetapi, hal yang menarik di sini adalah bahwa ayat-ayat yang menunjukkan sikap eksklusif dalam Islam bersifat ambigu dan terbuka untuk ditafsirkan. Ayat-ayat tersebut bisa ditafsirkan, baik dari perspektif pluralisme Islam maupun eksklusivisme Islam. Ayat-ayat ini bisa ditafsirkan bahwa Islam berarti *istislam*, yakni sikap pasrah kepada kehendak Allah, yang tidak dimaksudkan untuk menunjuk pada wahyu al-Qur'an tertentu.

Gagasan Islam tentang keselamatan tidak dapat disamakan dengan pembebasan Buddha atau pencerahan atau keselamatan Kristen. Gagasan Islam tentang keselamatan sesungguhnya sangat sederhana dan tidak rumit. Islam percaya bahwa manusia dilahirkan ke dunia sebagai tabularasa, tanpa dosa, tetapi dengan keagamaan bawaan (*fitrah*). Dalam pengertian ini, *fitrah* merupakan kemampuan yang telah diciptakan Allah dalam diri manusia untuk mengenal Allah. Inilah bentuk alami yang dengannya seorang anak tercipta dalam rahim ibunya, sehingga dia mampu menerima agama yang hak.

#### **D. Teologi Multikultural**

Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan



pada semua umat manusia, termasuk mereka para pengikut agama-agama, menuju satu cita-cita bersama kesatuan manusia (*unity of humankind*) tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, kebudayaan dan agama. Karena umat manusia tak ubahnya waktu, keduanya maju tak tertahankan, sama seperti tak ada jam tertentu yang mendapat kedudukan khusus, begitu pula tak ada satu pun orang, kelompok, atau bangsa manapun yang dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan Allah SWT (*the chosen people*). Ini dapat berarti bahwa dominasi ras dan diskriminasi atas nama apa pun merupakan kekuatan antitesis terhadap tauhid, dan karenanya harus dikecam sebagai kemusyrikan dan sekaligus kejahatan atas kemanusiaan. Pesan kesatuan ini secara tegas disinyalir al-Qur'an "katakanlah: Wahai semua penganut agama (dan kebudayaan)! Bergegaslah menuju dialog dan perjumpaan multikultural (*kalimatun sawa'*) antara kami dan kamu".

Dialog bukan semata percakapan bahkan juga pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen bersama yang tujuannya agar setiap partisipan dapat belajar dari yang lain sehingga dapat berubah dan berkembang. "Berubah" artinya dialog yang terselenggara secara terbuka, jujur dan simpatik dapat membawa kesaling-sepahaman (*mutual understanding*) melalui prasangka, stereotip, dan celaan dapat dikurangi dan dieliminir. Dikatakan "tumbuh" karena dialog mengantarkan setiap partisipan memperoleh informasi, klarifikasi dan semacamnya dari sumber primer dan dapat mendiskusikannya secara terbuka dan tulus. Dialog merupakan pangkal pencerahan nurani dan akal pikiran (*tanwir al-quuib wa al-'uqul*) menuju kematangan cara beragama yang menghargai "kelainan" (*the otherness*). Dengan demikian "kalimatun sawa" adalah menyangkut cara manusia melakukan perjumpaan dengan dan memahami diri sendiri dan dunia



lain (*the other*) pada tingkat terdalam (*from within*), membuka kemungkinan-kemungkinan untuk menggali dan menggapai selaksa makna fundamental kehidupan secara individual dan kolektif dengan berbagai dimensinya.

Dengan toleransi, pluralitas dan perbedaan dipandang sebagai sunnatullah yang tidak akan pernah berubah sekali dan selamanya. Karena merupakan kodrat Allah SWT dan kenyataan kehidupan yang tak terbantahkan, toleran terhadap pluralitas dan perbedaan menghendaki pula sikap saling memahami (*mutual understanding*) dan saling menghargai (*mutual respect*).

*“Hai manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berkelompok-kelompok dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling memahami dan menghargai. Sesungguhnya orang yang paling bermartabat di sisi Allah adalah mereka yang paling dapat memahami dan menghargai perbedaan di antara kamu”* (Q.S. Alhujurat: 13).

Ayat ini setidaknya mengandung tiga prinsip utama berkaitan dengan hidup dalam keragaman dan perbedaan. Pertama, *prinsip plura is usual*. Yakni, kepercayaan dan praktik kehidupan bersama yang menandakan kemajemukan sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan apalagi dipertentangkan. Keragaman cara berpikir dan cara bertindak umat manusia dalam konteks ruang dan waktu selalu dan selamanya akan terus eksis. Keberbedaan – apakah dalam agama dan kebudayaan – selalu saja hadir memberi nuansa dan spektrum kehidupan yang tidak monoton, ia selalu dinamis dan dialektis. Dengan demikian, Islam tidak mengenal kejumudan dan dogmatisme. Karena keduanya mengingkari kenyataan bagi kemungkinan-kemungkinan terbukanya kebenaran dari pintu manapun yang bisa diakses oleh orang beriman. Sebagaimana nasihat Ya'qub terhadap putra-putranya:



"Dan Ya'qub berkat: "Hai anak-anakku janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu, dan masuklah dari pintu-pintu yang berlainan".

Kedua, prinsip *equal is usual*. Ayat tersebut merupakan normatifitas bagi kesadaran baru umat manusia mengenai realitas dunia yang plural. Kesadaran ini bukan hanya karena manusia telah mampu melihat jumlah etnis dan bangsa yang sangat beragam di dunia ini. Namun kesadaran itu telah mengalami perkembangan sesuai dengan episteme zamannya. Bila kesadaran pluralisme modern memahami keragaman sebagai akibat langsung perubahan sosial yang diarahkan oleh semangat pembangunan dan modernisasi, kesadaran post-modern menandai keragaman sebagai suatu kenyataan yang *taken for granted* diakui eksistensinya. Kesadaran pertama pada hakikatnya cenderung mengarah pada penyeragaman wacana dalam berbagai bidang kehidupan dan mengalami kesulitan dalam melakukan dialog.

Kerangka kerja teologi pluralis memusatkan diri pada kepercayaan bahwa realitas mutlak secara esensial tetap beragam. Pluralisme berarti penghargaan terhadap sistem keimanan agama atau kebudayaan lain. Pluralisme mengajak pada agama-agama (dan kebudayaan-kebudayaan) untuk berpindah dari pemusatan atas "diri" kepada "Yang Suci" untuk mengeliminir perbedaan-perbedaan yang ada dan menumbuhkan ko-eksistensi. Secara perennial, perbedaan-perbedaan hanya tampak pada level eksoteris, namun dapat bertemu pada satu titik yang sama, yakni dunia yang syarat pesona esoterisme. Budhy Munawar Rahman dengan cermat menggarisbawahi, bahwa pluralisme tidak semestinya dipahami sekadar sebagai kebaikan negatif (*negatif good*) yang semata-mata hanya dipandang dari sisi kegunaannya untuk mengikis primordialisme, fanatisme dan radikalisme. Namun lebih dari itu,



pluralisme adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*civility*), bernilai positif dan merupakan rahmat.

Seorang multikulturalis, menurut Islam, perlu menunjukkan sikap-sikap positif dalam konteks relasi antar manusia. Relasi yang manusiawi ditandai dengan kerja sama untuk saling menjaga perasaan dan kepercayaan. Kecurigaan dan khianat merupakan titik awal yang buruk dalam membangun komunikasi lintas batas. Sebaliknya, senantiasa berprasangka baik (*husnuzhan*), memenuhi janji dan memelihara kepercayaan (*ri'ayah al-'ahd wa al-amanah*) sangat ditekankan. Secara normatif dua sikap ini dinyatakan secara tegas dalam ayat-ayat berikut:

“Hai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah menggunjing sebagian yang lainnya”.

“Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah pada langit, bumi dan gunung-gunung, semuanya enggan memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh”.

Baik prasangka maupun janji dan amanah, keduanya tidak semata berhubungan dengan relasi horizontal antar manusia, bahkan juga hubungan vertikal dengan Allah. Berprasangka baik pada manusia berarti tidak memvonis dan selalu mengedepankan klarifikasi (*tabayyun*) dalam kehidupan masyarakat yang plural, sementara berprasangka baik pada Allah adalah tidak mencerca nasib manusia yang berjalan sesuai dengan ketetapan-Nya dalam sunnatullah.

Menepati janji dan menjaga kepercayaan (*mutual trust*) orang lain adalah suatu kebutuhan bagi terwujudnya kehidup-



an harmoni. Karena pentingnya dua masalah ini, Rasulullah pernah menekankan bahwa pengingkaran atas amanah dan janji adalah salah satu tanda orang tidak beriman, tanda orang tidak beragama, atau tanda orang munafik. Dalam maknanya yang sederhana, harmoni adalah menghargai komitmen dan janji personal. Bentuk transaksi dan kontrak apa pun yang terjadi antara dua orang atau lebih mensyaratkan adanya saling percaya (*mutual trust*). Tiada akad atau kontrak tanpa amanah. Sebagian ulama memberikan interpretasi yang cukup luas tentang ajaran al-Qur'an mengenai menepati janji dan amanah. Menepati janji dan amanah adalah bentuk dari pertemuan antara kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) dan kewajiban agama seseorang (*fard al-'ayn*). Manusia wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ia juga punya kewajiban terhadap keluarga, tetangga dan masyarakat. Membuang limbah industri misalnya, berarti membuat lingkungan hidup tercemar, mengganggu keseimbangan sistem ekologis dan ini bertentangan dengan kewajiban terhadap masyarakat, karena itu menghalangi tercapainya langkah masyarakat menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Masyarakat tidak dapat mencapai tujuan tertingginya (*summum bonum*) hingga penduduknya memenuhi perjanjian dan amanah yang mereka buat sendiri.

Muslim menegaskan, multikulturalis memandang Islam sebagai agama egalitarian sekaligus terbuka atas solidaritas dan ketergantungan sosial (*takaful, ta'awun*). Islam mengakui secara gamblang hak semua manusia untuk hidup secara layak dan jaminan kesehatan, pakaian, makanan, perumahan serta usaha-usaha sosial yang diperlukan. Islam juga menekankan hak setiap orang atas jaminan sosial di waktu mengalami pengangguran, sakit, cacat, janda/duda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain karena keadaan di luar kekuasaannya. Standar hidup semacam ini hanya mungkin

dalam sebuah tatanan sosial yang sehat, di mana individu-individu dan kelompok-kelompok yang sangat plural saling memelihara hubungan sosial kuat. Maha berat sangsi sosialnya”.

Secara etimologis, Islam berasal dari kata *salima* yang berarti ketenangan, keselamatan, keamanan, harmoni, kebebasan dari unsur-unsur yang mengganggu, dan kedamaian dalam penyerahan diri. Spirit nirkekerasan dan perdamaian adalah inti dari Islam itu sendiri. Islam adalah sebuah tradisi perdamaian dan harmoni yang hidup (*living tradition of peace and harmoni*), suatu totalitas sistem tradisi yang hidup penuh damai dan harmoni dengan Tuhan (*hablun min Allah*), dengan diri sendiri dan sesama (*hablun min an-nas*) dan dengan lingkungan (*hablun min al-'alam*). Harmoni adalah ta'aluf, yakni keakraban (*familiarity*), kekariban, kerukunan dan kemesraan (*intimacy*), dan saling pengertian (*understanding*). Harmoni juga *tawafuq*, yaitu persetujuan, permufakatan, perjanjian (*agreement*) dan kecocokan, kesesuaian, keselarasan (*conformity*). Jadi, Islam adalah agama damai dan harmoni, dan setiap yang meyakini Islam disebut Muslim. Muslim sejati adalah mereka yang cinta damai, mengedepankan harmoni dan rasa aman bagi semua makhluk.

Ada dua peristiwa penting dalam hidup Nabi yang menggambarkan bahwa Ia adalah seorang yang menghargai jalan damai daripada konflik dan kekerasan. *Pertama* berkaitan dengan masa pra kenabiannya, suatu fase penting yang menyebabkannya dijuluki dengan gelar *al- Amin* (orang yang terpercaya dan rekonsiliator). Peristiwa ini bermula dari pembangunan kembali ka'bah, sebagai rumah Allah yang telah didirikan oleh Ibrahim dan menjadi tempat suci bagi tradisi agama-agama monoteisme (*hanfiyah samhah*). Di dalam ka'bah terdapat batu hitam suci yang disebut Hajar Aswad.



Ka'bah dibangun kembali karena rusak terkena banjir besar. Karena ka'bah adalah tempat suci bagi seluruh suku yang ada di Makkah pada saat itu, maka pembangunan ini juga melibatkan seluruhnya. Mereka bekerja sama dan saling bahu untuk menegakkan kembali bangunan ini. Namun, konflik mulai terjadi di antara suku-suku itu ketika Hajar Aswad hendak diletakkan. Setiap suku mengklaim paling berhak untuk menempatkannya kembali sembari mengabaikan keberadaan suku-suku lainnya. Hampir saja peristiwa ini menyulut pertumpahan darah. Atas kebijakan seseorang yang dipandang tertua di antara mereka, lalu diambillah suatu kesepakatan, yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya adalah dia yang datang paling awal melalui *Bab al-Shafa* pada esok harinya. Ternyata, Muhammad adalah orang pertama yang memasuki gerbang tersebut.

Dengan ketulusan dan kejujurannya, Muhammad menunjukkan sikap yang bisa diterima oleh semua suku. Ia tidak mempergunakan haknya untuk kepentingannya sendiri, atau kepentingan sukunya Bani Hasyim. Muhammad dengan arif membuat jalan keluar yang baik untuk semua. Ia meletakkan sebuah jubah besar di atas tanah dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah jubah tersebut. Ia memerintahkan kepada semua kepala suku agar memegang ujung-ujung jubah, kemudian mengangkatnya secara bersama-sama sampai ke tempat yang dimaksud, dan Muhammad kemudian meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Dengan keputusan ini, pembangunan Ka'bah dapat berlanjut dan konflik dapat didamaikan.

*Kedua*, peristiwa penting penaklukan Makkah oleh Nabi Muhammad dan pasukannya yang setia. Setelah selama delapan tahun berjuang dan berperang dengan penduduk Makkah, ia kembali dengan sepuluh ribu tentara menuju Makkah. Penduduk Makkah mengira bahwa Muhammad akan melaku-

kan balas dendam atas semua tindakan kejahatan dan kekerasan yang pernah dilakukan mereka kepadanya dan umatnya. Mereka juga menduga akan diusir oleh Muhammad sebagaimana mereka pernah mengusirnya hingga hijrah ke Madinah. Mereka dalam ketakutan luar biasa, seolah kematian sudah diurat leher.

Kembali Muhammad menunjukkan teladan utama dengan sifat terpuji. Ia berkata kepada penduduk Makkah dengan kata-kata yang pernah diucapkan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang pernah berbuat salah dan menemuinya di Mesir: "sesungguhnya aku berkata seperti yang diucapkan saudaraku Yusuf: pada hari ini tidak ada celaan dan dendam yang ditimpakan atas kalian. Allah akan mengampuni kalian, dan Dialah yang maha penyayang di antara penyayang". Sebuah peristiwa penaklukan tanpa cucuran darah dan derai air mata orang-orang tak berdosa.

Peristiwa ini menggambarkan paradigma penciptaan perdamaian yang diperoleh dari praktik Muhammad ketika ia sama sekali tidak memiliki kekuasaan politik: yakni kesabaran, penghargaan atas martabat kemanusiaan universal, berbagi bersama, dan kreativitas dalam resolusi konflik.

Pada peristiwa penaklukan Makkah ada nilai utama yang disampaikan oleh Islam melalui Nabi, yakni bahwa perdamaian tidak akan pernah terwujud tanpa pengampunan atau memaafkan. Pemberian ampun atau maaf dalam rekonsiliasi adalah tindakan tepat dalam situasi konflik. Ini tidak hanya praktik Nabi Muhammad, bahkan secara tegas al-Qur'an menjelaskan:

*"Balasan untuk suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengannya. Tetapi jika seseorang memberi maaf dan melakukan rekonsiliasi, balasannya adalah dari Allah. Dia tidak menyukai orang-orang yang melakukan kezaliman".*



Pandangan moral al-Qur'an secara tegas memberikan pesan bahwa kekuasaan Allah memberi ampunan, seyogyanya menjadi sifat kemanusiaan dalam relasi satu dengan yang lain; ampunan-Nya membawa pada perbaikan harga diri yang dapat menciptakan relasi antar manusia yang lebih sejuk.

*"Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah: "kedamaian adalah jalan hidupmu". Allah telah menciptakan atas dirinya kasih sayang. Dan barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kami lantaran kebodohan, kemudian meminta ampunan setelah mengerjakan dan mengadakan perbaikan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Memaafkan dan memberi ampunan berarti melupakan semua serangan, kejahatan, perbuatan salah dan dosa yang dilakukan orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja terhadap anda, seperti mencerca melalui lisan, mengambil atau merampas hak milik anda. Memaafkan itu ada dua macamnya. *Pertama*, memaafkan seseorang ketika kita tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan pembalasan. Memaafkan seperti ini pada dasarnya serupa dengan kesabaran dan menahan diri, dan bukan memberikan maaf. Dengan kata lain, ia adalah semacam ketidakberdayaan dan kelemahan, semacam toleransi. *Kedua*, kita memaafkan seseorang ketika kita memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan balas dendam.

#### **E. Keberadaan Pondok Pesantren Pancasila.**

Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu diresmikan tanggal 18 Nopember 1974 oleh Menteri Agama RI. Prof. Dr. H. Mukti Ali, MA. mewakili Presiden Republik Indonesia ke 2 H. Muhammad Soeharto. Presiden mengamanatkan kepada Menteri Agama agar pondok yang diresmikan diberi nama "Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu". Modal awal pembangunan

Pondok ini berasal dari masyarakat Kelurahan Jembatan Kecil berupa tanah wakaf seluas  $\pm 9$  Ha (sekarang tinggal  $\pm 6$  Ha) dan uang bantuan Presiden HM. Soeharto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Pemda Provinsi (Gubernur H. Ali Amin, SH) pada waktu kunjungan beliau ke Bengkulu tahun 1972.

Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu yang luasnya 6 hektar ini letaknya sangat strategis di tengah Kota Bengkulu, tepatnya Jl. Rinjani Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Telp. (0736) 20262. Berdirinya Pondok ini dilatar belakangi oleh keinginan kuat para sepuh/kiyai dan masyarakat Bengkulu untuk memiliki sebuah lembaga pendidikan Islam yang bertujuan mencetak kader-kader muslim, berilmu pengetahuan dan mempunyai keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada awal berdirinya, Pondok Pesantren Pancasila dipimpin oleh seorang Kiyai yang Kharismatik, yaitu K.H. Nawawi, beliau alumni Darul Ulum Makkah, Karena faktor usia (K.H. Nawawi sudah sepuh) beliau mengundurkan diri. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Ustadz H. Muhammad Rusly sebagai direktur, beliau alumni Pondok Pesantren Candung Sumatera Barat. Adapun wakil direkturnya dijabat oleh K.H. Ahmad Daroini, beliau alumni pondok Pesantren Kerapyak Jogjakarta. Karena kesibukan H. Muhammad Rusly di DPR maka Pondok Pesantren Pancasila dipimpin oleh Prof. Dr. K.H. Djamaan Nur sebagai Direktur dengan wakil Ustadz. Yakin Sabri. HS. Karena adanya gejolak, akhirnya pihak Yayasan memberhentikan Prof. Dr. K.H. Djamaan Nur dan Ustadz. Yakin Sabri. HS dari kepemimpinan Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu dan mengangkat Drs. H.M. Asy'ari Husein sebagai direktur, dan Rozian Karnedi, M. Ag sebagai wakil direktur.

Pada awal berdirinya (1974) Pondok Pesantren Pancasila



Bengkulu memiliki satu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 untuk MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan kelas 5 sampai dengan kelas 6 untuk MA (Madrasah Aliyah). Baru pada tahun 1977 dibentuk menjadi dua jenjang pendidikan yaitu MTs setingkat SMP dan MA setingkat SMA. Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu terus berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pada tahun 1987 mendirikan sekolah umum tingkat SMP dan SMA. Saat penelitian ini dilakukan (tahun 2009) Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu memiliki santri 395 orang putra/putri, lebih jelasnya sebagaimana tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
Jumlah Santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu  
Agustus 2009

No	Sekolah	Agustus		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	49	90	139
2.	SLTP	34	46	80
3.	Madrasah Aliyah (MA)	22	49	71
4.	SMU	19	86	105
Jumlah Santri				395

Kurikulum Pondok yang digunakan untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SLTP disebut dengan *Takhassus Dinniyyah 'Ula*. Sedangkan untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) dan SMA disebut dengan *Takhassus Dinniyyah Wustho*. Adapun mata pelajaran pondok dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu**  
**Agustus 2009**

Mata Pelajaran Pondok			
MTs	SLTP	MA	SMU
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nahwu</li> <li>2. Syarof</li> <li>3. Hadits Arba'in</li> <li>4. Al-Qur'an</li> <li>5. Tafsir</li> <li>6. Mustalah Hadits</li> <li>7. Bahasa Arab Pondok</li> </ol>		Mata Pelajaran MTs & SLTP ditambah <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balagha</li> <li>2. Mantik</li> <li>3. Bayyan</li> <li>4. Tafsir Jalalain</li> </ol>	

Adapun Jumlah Ustadz/Guru di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu sebanyak 83 orang dan didukung oleh 18 orang tenaga Tata Usaha. Secara fisik bangunan yang ada masih harus terus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitas. Saat ini Pondok telah memiliki laboratorium, seperti: laboratorium bahasa, biologi dan fisika dan dilengkapi dengan alat-alat teknologi sebagai penunjang pendidikan. Selain itu, masing-masing sekolah memiliki perpustakaan sendiri. Pada tahun 2001 – 2003, Pondok Pesantren Pancasila mendapatkan bantuan dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan dana Loan IDB Jeddah, dalam bentuk sarana gedung dan alat laboratorium komputer, bahasa, biologi, kimia, fisika dan buku-buku perpustakaan.

Pada awal berdirinya, organisasi yang ada di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu masih sangat sederhana, bahkan menurut K.H. A. Daroini saat itu belum ada istilah lurah pondok. Perlahan organisasi di pondok Pesantren Pancasila mulai dibenahi, seperti: Pimpinan Pondok, Wakil Pimpinan, Kepala TU dan Lurah Asrama. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, saat ini Pondok Pesantren Pancasila telah memiliki organisasi kelembagaan yang memadai dengan struktur sebagai berikut:



1. Pimpinan Pondok  
Direktur : Drs. H. M. Asy'ari Husein.  
Wakil Direktur : Rozian Karnedi, M. Ag.  
Lurah Pondok : K. H. Ahmad Daroini.
2. Sekretariat  
Dikepalai oleh Ka. TU Sekretariat.
3. Madrasah/Sekolah
  - a. Madrasah Tsanawiyah.
  - b. SMP.
  - c. Madrasah Aliyah.
  - d. SMA.
  - e. Madrasah Takhasus Diniyah Ula & Wustho.
4. Asrama Santri
  - a. Asrama Putra.
  - b. Asrama Putri.Masing-masing asrama dikepalai 1 orang kepala asrama.
5. Lembaga – lembaga
  - a. Lembaga Pengembangan Bahasa Arab (LPBA).
  - b. Lembaga Perekonomian (Kompontren).
  - c. Lembaga Keterampilan.
  - d. Lembaga Da'wah.

Beberapa prestasi yang telah diraih santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu seperti utusan Provinsi Bengkulu mengikuti MTQ tingkat Nasional di Pontianak tahun 1984; Juara I Lomba Pidato Pemuda Pertasikencana tingkat Provinsi Bengkulu tahun 1988 dan diutus mengikuti Lomba Pidato tingkat nasional mewakili Provinsi Bengkulu; Juara III Lomba Pidato tingkat SLTA se Propinsi Bengkulu tahun 1999, juara I Fahmil Qur'an pada MTQ tingkat Kota Bengkulu tahun 2002, dan berbagai prestasi lainnya.

Bukan hanya itu, alumni Pondok Pesantren Pancasila banyak yang telah berhasil dan meraih sukses di tengah ma-

syarakat, baik di bidang politik, pemerintahan, maupun bidang lainnya. Tidak sedikit pula mereka yang sukses dan berprestasi di dunia pendidikan, ada di antara mereka yang menjadi guru dan dosen di berbagai perguruan tinggi.

Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu menyelenggarakan pendidikan formal dan informal yaitu:

### 1. Pendidikan Formal.

Dalam menyelenggarakan pendidikan formal untuk setiap jenjang pendidikan dipadu dua kurikulum, yaitu kurikulum negeri (Depag/Diknas) dan kurikulum diniyah (Pondok). Adapun jenjang dan bentuk sekolah yang diselenggarakan secara formal pada Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu terdiri dari 4 sekolah/madrasah yaitu: Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), SLTP, dan SMA.

Keempat sekolah/madrasah tersebut waktu belajarnya dari pukul: 07.15 s.d 14.15 WIB pada hari sabtu s.d kamis (6 hari Perminggu), sedangkan liburnya pada hari jum'at. Adapun kurikulum yang digunakan sebagaimana tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
Kurikulum yang Digunakan Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu Agustus 2009

NO	SEKOLAH	KURIKULUM YANG DIGUNAKAN	
1.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Kementerian Agama	Pondok
2.	Madrasah Aliyah (MA)		
3.	SLTP	Kementerian Pend. Nasional	
4.	SMU		

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pendidikan Pondok (kurikulum sendiri) pelaksanaannya dipadukan melalui madrasah/sekolah formal, untuk SMP/MTs menggunakan Kurikulum Takhashush Diniyah Ula (awaliyah) dan untuk SMA/MA menggunakan Kuriulum Takhashush Diniyah



Wustho, yang isinya adalah pengajian dan membahas kitab salaf/kitab kuning.

Untuk pendalaman pengkajian dan pembahasan kitab salaf/kitab kuning menggunakan waktu di luar pendidikan formal, yaitu di asrama pada malam hari dengan Ustadz/guru yang berkompeten.

### 3. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler bagi siswa/siswi (santriwan/santriwati) di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu dilaksanakan pada waktu sesudah shalat ashar sampai dengan menjelang waktu maghrib. Berbagai kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- Bidang Al-qur'an melalui LPTQ.
- Bidang Bahasa Arab Melalui LPBA.
- Bidang Keterampilan.
- Bidang Olahraga.
- Pramuka.
- Kesenian.
- Pidato/Da'wah.

Dalam mengantisipasi perkembangan ke depan, Pimpinan Pondok telah membuat rencana strategis dan melakukan perbaikan pada berbagai sektor, terutama bidang-bidang yang sangat mendesak, seperti:

Bidang fisik:

- Rehabilisasi sarana prasarana yang ada.
- Membuat rencana pembangunan gedung baru untuk lokal belajar, asrama, kantor, perpustakaan, laboratorium dan pembangunan masjid.

Non Fisik (SDM):

- Meningkatkan kualitas tenaga pengajar baik umum maupun diniyah. Tenaga pengajar diusahakan mini-

mal berpendidikan S.1 dan khusus untuk Kurikulum Takhashush Diniyah diambil dari dosen STAIN Bengkulu (sekarang sudah IAIN) yang berbasis pendidikan pondok pesantren.

- Menempatkan tenaga administrasi berpendidikan sarjana/SLTA yang berpengalaman dalam bidangnya.
- Mengadakan penataan dan pemetaan, baik tenaga pengajar maupun administrasi sesuai dengan keahliannya.
- Untuk jangka panjang, Pimpinan Pondok telah membentuk tim pembaharuan, bidang kurikulum melalui bagian litbang kurikulum dan bidang sarana/prasarana melalui bagian Litbang sarana fisik.

Di samping mengelola pendidikan, Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu juga menekuni bidang ekonomi untuk menggali sumber dana guna kesejahteraan kehidupan Pondok secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan berupa:

- Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Pancasila yang mendapat klasifikasi A mantap (th 1999).
- Usaha Ekonomi Produktif, bentuk kegiatan yang dirancang adalah usaha peternakan kambing (baru dimulai).

Pondok Pesantren Pancasila berusaha untuk dekat dan menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar, untuk itu kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- Pengajian Majelis Ta'lim untuk orang dewasa dan anak-anak bagi masyarakat sekitar pondok.
- Menyediakan tenaga Da'i/Khatib bagi masyarakat yang membutuhkan, baik dalam kota maupun luar Kota Bengkulu.



## F. Kyai dan Pemahamannya tentang Multikultural

KH. A. Daroini,<sup>21</sup> adalah Lurah Pondok Pesantren Pancasila yang kesehariannya dekat dengan santri. Ketika ditanya soal "bagaimana penanaman nilai-nilai multikulturalisme kepada santri di pesantren?" beliau menjelaskan bahwa pada awal beliau mengajar di Pondok Pesantren Pancasila (1979) belum dibahas masalah multikultural, mengingat masalahnya ketika itu belum mengemuka. Perkembangan terakhir, setelah masalah multikulturalisme muncul kepermukaan, maka multikultural diajarkan kepada santri melalui khutbah jum'at, muhadharah, dan kesempatan lain. Pembelajaran di kelas hanya disampaikan jika kebetulan materi yang dibahas menyangkut ayat-ayat yang berkaitan dengan multikulturalisme.

Ketika beliau menjelaskan Q.S. al-Hujurat: 13, beliau katakan "*lita'arafu*" itu tidak hanya sekadar saling kenal mengenal, tetapi lebih dari itu, mengenali orang yang ada di hadapannya bahwa dia adalah manusia yang satu keturunan dengan kita dari Adam dan Hawa. Mengenali orang yang ada di hadapan kita adalah orang yang dapat menolong kita. Mengenali bahwa orang yang ada di hadapan kita itu adalah orang yang bisa bekerja sama bisnis dengan kita, kalau mau membeli mobil tidak perlu ditanya yang punya mobil orang Islam atau bukan, sama dengan kita akan menjual getah karet tidak perlu ditanya yang mau membeli karet orang Islam atau bukan, yang penting orang mau membeli karet dan kita menjual karet, tanpa harus ditanya agamanya. Orang yang ada di hadapan kita adalah orang yang perlu kita tolong atau tidak perlu. Agama bukan menghalangi "*lita'arafu*" tetapi makin apiknya hubungan sesama manusia, meskipun tidak berada

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan KH. A. Daroini, hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2009.

dalam satu naungan agama.

Dalam salah satu teks khutbahnya, KH. A. Daroini menjelaskan bahwa ajaran Islam sangat menganjurkan kepada seluruh umat manusia di permukaan bumi ini tanpa adanya batasan apa pun sepanjang kita tidak dizolomi.

*“Wahai manusia sesungguhnya aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang teramat bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal” (Q.S. al-Hujurat: 13).*

Ayat 13 surat al-Hujurat di atas pada dasarnya menyadarkan kita untuk bersikap saling hormat menghormati setelah kita saling mengenal. Kadang-kadang suatu bangsa karena sesuatu dan lain hal sangat membutuhkan bantuan kita. Mereka tidak bisa menghasilkan karet, tidak pula bisa bertanam kelapa sawit ataupun kopi coklat karena komoditi itu hanya tumbuh di daerah seperti tanah air kita ini padahal mereka sangat membutuhkan. Sebaliknya, tidak bisa dipungkiri mesin-mesin pesawat, mesin-mesin kapal, mesin-mesin pabrik sudah diproduksi secara besar-besaran oleh bangsa tertentu sementara kita belum mampu membuatnya padahal mesin-mesin itu sangat kita butuhkan untuk kepentingan bangsa tercinta ini.

Karnedi,<sup>22</sup> adalah Wakil Direktur Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu. Saat diwawancarai tentang kapan para santri diberikan paham multikulturalisme? Karnedi menjawab bahwa paham kulturalisme diberikan kepada santri tidak secara klasikal saat mereka belajar, tetapi melalui kegiatan muhadharah,

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Rozian Karnedi, hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2009.



kuliah subuh, dan tausiyah. Pada saat natal para santri diberikan pemahaman tentang multikultural terhadap agama orang lain dan tetap menjalin persahabatan. Artinya, materi multikultural tidak terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah. Sejauh ini Pondok Pesantren Pancasila belum ada niatan untuk mengintegrasikan materi multikulturalisme ke dalam kurikulum sekolah, kecuali jika ada petunjuk dari pemerintah.

Ketika memaknai al-Qur'an Surat al-Kafirun "*lakum dinukum waliadin*" Karnedi mengatakan bahwa ayat ini lebih menekankan kepada "aqidah" dan "ibadah" sehingga tidak ada toleransi dalam urusan ini, karenanya tidak diperbolehkan umat Islam mengikuti ritual natal dan perayaan palentin. Jika masalahnya muamalaah atau membangun pergaulan, berarti sudah di luar konteks ayat tersebut.

Adapun kitab-kitab yang agak banyak membicarakan masalah multikultural adalah tafsir-tafsir kontemporer, seperti al-Manar. Belum ditemukan pada kitab apa multikultural itu dibahas secara luas dan detil. Menyinggung masalah jihad, Karnedi menjelaskan bahwa ketika berperang Rasulullah saw "melarang membunuh wanita dan anak-anak" dan "melarang menebang pohon yang sedang berbuah".

Taufik,<sup>23</sup> adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs), beliau mulai mengajar di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu sejak tahun 1993. Taufik menjelaskan masalah sikap tasamuh sudah ada dalam ajaran Islam. Sikap ini menurut Taufik sangat penting dan sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para santri di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu. Para santri diajarkan sikap saling tenggang rasa, dalam kehidupan masyarakat menumbuhkan sikap saling bantu membantu,

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Hanafie Taufik, hari Senin, tanggal 24 Agustus 2009.

karena negara kita ini berdasarkan Pancasila, walaupun agama kita mayoritas, kita harus bersatu.

Mengenai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariyah, ketiga ukhuwah ini tidak bisa dipisahkan, dan harus sejalan. Kita rukun sesama umat Islam, tetapi dengan umat lain tidak boleh bersiteru. Untuk itu, Peranan Pondok Pesantren Pancasila dalam membentuk kerukunan umat beragama di antaranya melalui kegiatan ceramah atau pengajian kepada masyarakat. Dalam kehidupan santri sudah kita terapkan sikap toleransi, hal itu dibuktikan dengan kondisi mereka yang berlainan daerah.

Untuk saat ini, kerukunan umat beragama di provinsi Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Munculnya masalah bukan dari luar agama kita, tapi sesama kita umat Islam hanya karena berbeda pendapat (masalah khilafiyah) dan tidak perlu diperdebatkan, itu yang menyebabkan runtuhnya persatuan umat Islam, yang lebih penting bagaimana membangun hablumminannas secara lebih baik.

Sikap pemerintah sudah baik dengan tidak membedakan pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya, misalnya dalam pengamalan hari besar agama. Berkenaan dengan jihad, jangan salah kaprah tentang pengertian jihad. Jihad bukan hanya diartikan perang, tapi jihad dapat berupa pengamalan ibadah, berinfaq, membangun masjid atau belajar menuntut ilmu, semuanya merupakan bagian dari jihad.

Adzhim,<sup>24</sup> adalah tenaga pengajar di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu. Adzhim mulai mengabdikan diri di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu sejak tahun 2000. Menurut Adzhim yang menjadi program unggulan adalah ibadah kemasyarakatan, dan sistem pengajaran yang disebut dengan "ban-

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Adzhim, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2009.



dongan" dan "serogan". Bandongan yaitu Ustadz/guru menjelaskan per kata dan santri/murid mendengarkan dan mencatat. Adapun Serogan di mana santri/murid membaca dan menjelaskan sedangkan Ustadz/guru mendengarkannya.

Berkaitan dengan penafsiran surat al-Kafirun ayat: 6, menurutnya bahwa Islam merupakan suatu agama yang "*rahmatan lil'alamin*". Manusia harus menghargai keyakinan dalam memeluk agama manapun, tidak ada paksaan dalam beragama. Oleh karena itu, dalam mengajarkan sikap "*tasamuh*" kepada santri berkaitan dengan ayat tersebut, lebih menekankan kepada sikap saling menghormati antar umat beragama, tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang yang sudah beragama.

Islam jelas mengajarkan sikap tasamuh. Sikap ini penting karena kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi kita ketahui di Indonesia banyak agama dan beragam corak suku bangsa. Menanggapi masalah kerukunan antar umat beragama di provinsi Bengkulu, menurutnya hubungan antar umat beragama saat ini sudah sangat baik. Gejala-gejala yang menunjukkan adanya potensi yang akan mengganggu kerukunan umat beragama di Bengkulu belum kelihatan, keadaannya masih kondusif dan relatif aman.

Aziz,<sup>25</sup> adalah santri/pelajar SMA Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu kelas III IPA. Menurut Aziz, di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu sudah diajarkan sikap toleransi beragama kepada umat agama lain. Dirinya mengaku sudah menerapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari sikap toleransi baik kepada teman sekelas atau teman di lingkungannya. Ia mengaku mempunyai banyak teman yang ber-

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ismi Aziz, hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2009.

lainan agama. Pelajaran tentang toleransi antar umat beragama ia dapatkan dalam mata pelajaran PPKn. Gurunya tidak pernah mengajarkan sikap fanatis, namun juga tetap selalu menjaga aqidah Islam. Kami diajarkan jangan menikah dengan orang yang non muslim, tapi kalau bergaul tidak ada larangan, kami diperbolehkan untuk bergaul dengan siapa saja.

Penjelasan multikulturalisme yang disampaikan K.H. A. Daroini dan pengelola Pondok Pesantren lainnya, terlihat bahwa ajaran Islam begitu indah, sangat toleran, dan menghargai perbedaan agama. Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13, ternyata muatannya tidak hanya sebatas dasar untuk saling mengenal tetapi lebih dari itu, mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, menghargai, menolong, dan bahkan menjalin hubungan bisnis dengan siapa pun tanpa harus melihat apa agamanya. Ajaran Islam tidak membelenggu kita, tetapi justru menganjurkan kita untuk membangun hubungan yang harmoni sesama manusia walaupun berbeda agama.

Sayangnya, nilai-nilai multikulturalisme yang begitu humanistis hanya disampaikan kepada para santri melalui khutbah jum'at, kuliah subuh, muhadharah, dan tausiyah, tidak terintegrasi secara formal di dalam kurikulum. Jika materi multikulturalisme terintegrasi dalam kurikulum, para santri dapat mengetahui dan memahami lebih dalam dengan mendiskusikannya kepada Ustadz/Ustadzah yang mengajar di kelas.

Pemberian materi "multikulturalisme" kepada santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu tidak terjadual secara formal akan tetapi materi itu disampaikan melalui khutbah jum'at dan muhadharah. Penyampaian melalui khutbah jum'at dan muhadharah sifatnya monologis (satu arah). Kelemahan model ini, santri tidak ada kesempatan untuk bertanya (mendiskusikan) sesuatu yang belum dipahami. Oleh karenanya akan sangat bijaksana jika disampaikan secara dialogis, apalagi



terstruktur ke dalam kurikulum.

Riyanto,<sup>26</sup> menyatakan seorang pendidik yang efektif, tidak hanya efektif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas saja (*transfer of knowledge*), tetapi lebih-lebih dalam relasi pribadinya dan "modeling" nya (*transfer of attitude and values*), baik kepada peserta didik maupun kepada seluruh anggota komunitas sekolah. Pendidikan yang humanis menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi-pribadi dan antar pribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah. Relasi ini berkembang dengan pesat dan menghasilkan buah-buah pendidikan jika dilandasi oleh cintakasih antar mereka. Pribadi-pribadi hanya berkembang secara optimal dan relatif tanpa hambatan jika berada dalam suasana yang penuh cinta (*unconditional love*), hati yang penuh pengertian (*understanding heart*) serta relasi pribadi yang efektif (*personal relationship*). Dalam mendidik seseorang kita hendaknya mampu menerima diri sebagaimana adanya dan kemudian mengungkapkannya secara jujur (*modeling*). Mendidik tidak sekadar mentransfer ilmu pengetahuan, melatih keterampilan verbal kepada para peserta didik, namun merupakan bantuan agar peserta didik dapat menumbuhkembangkan dirinya secara optimal.

Mendidik yang efektif pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang menghadirkan diri sedemikian sehingga pendidik memiliki relasi bermakna pendidikan dengan para peserta didik sehingga mereka mampu menumbuh-kembangkan dirinya menjadi pribadi dewasa dan matang. Pendidikan yang efektif adalah yang berpusat pada siswa atau pendidikan

---

<sup>26</sup>Theo Riyanto. *Pendidikan yang Humanis*. <http://bruderfic.or.id/h-60/pendidikan-yang-humanis.html> [8/04/2008].

bagi siswa. Dasar pendidikannya adalah apa yang menjadi "dunia", minat, dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Pendidik membantu peserta didik untuk menemukan, mengembangkan dan mencoba mempraktikkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki (*the learners-centered teaching*). Ciri utama pendidikan yang berpusat pada siswa adalah bahwa pendidik menghormati, menghargai dan menerima siswa sebagaimana adanya. Komunikasi dan relasi yang efektif sangat diperlukan dalam model pendidikan yang berpusat pada siswa, sebab hanya dalam suasana relasi dan komunikasi yang efektif, peserta didik akan dapat mengeksplorasi dirinya, mengembangkan dirinya dan kemudian mem "fungsi" kan dirinya di dalam masyarakat secara optimal.

Tujuan sejati dari pendidikan seharusnya adalah pertumbuhan dan perkembangan diri peserta didik secara utuh sehingga mereka menjadi pribadi dewasa yang matang dan mapan, mampu menghadapi berbagai masalah dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Agar tujuan ini dapat tercapai maka diperlukan sistem pembelajaran dan pendidikan yang humanis serta mengembangkan cara berpikir aktif-positif dan keterampilan yang memadai (*income generating skills*). Pendidikan dan pembelajaran yang bersifat aktif-positif dan berdasarkan pada minat dan kebutuhan siswa sangat penting untuk memperoleh kemajuan baik dalam bidang intelektual, emosi/perasaan (EQ), afeksi maupun keterampilan yang berguna untuk hidup praktis. Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia muda (N. Driyarkara). Pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih bermanusiawi (semakin "penuh" sebagai manusia), berguna dan berpengaruh di dalam masyarakatnya, yang bertanggung jawab dan bersifat proaktif dan kooperatif. Masyarakat mem-



butuhkan pribadi-pribadi yang handal dalam bidang akademis, keterampilan atau keahlian dan sekaligus memiliki watak atau keutamaan yang luhur. Singkatnya pribadi yang cerdas, berkeahlian, namun tetap humanis.

### G. Pendidikan Multikultural pada Santri

Penanaman paham multikultural (toleransi beragama) bagi santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu belum menjadi prioritas utama dan tidak terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan. Masalah multikulturalisme dibicarakan di luar jam belajar, melalui khutbah jum'at, kuliah subuh, muhadharah, dan tausiyah. Kalaupun dibicarakan di dalam jam belajar sifatnya hanya kebetulan ada ayat-ayat yang muatannya bersentuhan dengan multikultural.

Sistem pendidikan hendaknya berpusat pada peserta didik, artinya kurikulum, administrasi, kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler, sistem pengelolaannya harus dirumuskan dan dilaksanakan demi kepentingan peserta didik, bukan demi kepentingan guru, sekolah atau lembaga lain. Pendidikan yang hanya memusatkan pada kepentingan kebutuhan kerja secara sempit harus dikembalikan kepada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian peserta didik secara utuh. Misalnya, kemampuan bernalar, berpikir aktif-positif, kreatif, menemukan alternatif dan prosesnya menjadi pribadi yang utuh (*process of becoming*). Peserta didik hendaknya benar-benar dikembalikan sebagai subjek (dan juga objek) pendidikan dan bukannya objek semata-mata.<sup>27</sup>

Jika dijabarkan lebih rinci, pendidikan multikultural se-

---

<sup>27</sup> Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn. 1991. "Multicultural Education for Exceptional Children. E", (IC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA), hal. 6.

kurang-kurangnya memiliki lima tujuan. *Pertama*, meningkatkan pemahaman diri dan konsep diri secara baik. *Kedua*, meningkatkan kepekaan dalam memahami orang lain, termasuk terhadap berbagai kelompok budaya di negaranya sendiri dan negara lain. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami kemajemukan, interpretasi kebangsaan, serta budaya yang kadang-kadang bertentangan menyangkut sebuah peristiwa, nilai, dan perilaku. *Keempat*, membuka pikiran ketika merespon isu. *Kelima*, memahami latar belakang munculnya pandangan klise atau kuno, menjauhi pandangan stereotipe dan mau menghargai semua orang.<sup>28</sup> Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut agar berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

- Pendidikan multikultural harus menawarkan keanekaragaman kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
- Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
- Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandangan kebudayaan yang berbeda-beda.
- Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.
- Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya serta mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> C. Mack. Jr. "Mistaken Identity and Issues in Multicultural Education" Updating School Board Policies, Juli-Agustus 1992), hal. 4.

<sup>29</sup> Muhammad Ali. "Pendidikan Pluralis-Multikultural", dalam *Kompas*,



Bisa digarisbawahi, nilai dasar dalam pendidikan multikultural adalah toleransi. Oleh karena itu, toleransi merupakan sikap kewargaan yang aktif bukan sikap yang spontan (*La tolerance est une position civique active, et non pas une attitude spontanee*, Fernando Savater), maka sikap toleran tidak akan tertanam dengan sendirinya, tanpa ada usaha sadar menginternalisasikannya.<sup>30</sup> Toleransi harus dididikkan, tidak cukup berhenti pada wacana. Keputusan majelis ulama, keputusan konsiliasi, kesepakatan sidang dewan gereja-gereja sedunia, dan kesepakatan hasil pertemuan tokoh agama yang menganjurkan toleransi tidak akan cukup efektif bila hanya berhenti di kertas dan bibir, tanpa dukungan pendidikan dalam arti luas.

Pendidikan multikultural dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang saling menghargai perbedaan kenyataan kemajemukan sosial serta menjauhi sikap diskriminatif. Isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih secara sungguh-sungguh dengan menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain.<sup>30</sup> Misalnya, ketika seorang guru mengajarkan sebuah materi keilmuan perlu memasukkan nilai dan tokoh-tokoh dari budaya lain dengan maksud agar siswa mengerti bahwa ilmu itu dikembangkan dalam tiap budaya. Jika memberi contoh tentang ketokohan seorang ilmuwan dan hasil penemuannya, dia perlu menampilkan sejumlah tokoh dengan latar belakang berbagai budaya dan jender. Dalam proses ini, seorang guru akan bisa menjelaskan kesamaan dan perbedaan antarbudaya yang amalannya akan membantu para siswa untuk lebih mengerti tentang nilai-nilai budaya orang lain serta akan mau menerima dan menghargai secara positif. Dalam proses pembelajaran, guru ketika mengajarkan etika

---

(Jakarta, PT. Kompas, 26 April 2002, hal. 4.

<sup>30</sup> Rose Reissman. 1994. "The Evolving Multicultural Classroom", dalam *ASCD Publication*, (New York, ASCD), hal. 12.

sosial menyangkut tata cara makan, berpakaian dan cara hidup hendaknya bukan hanya dijelaskan dari sudut pandang budaya atau etnis tertentu, tetapi juga dijelaskan menurut sudut pandang budaya dan etnis orang lain.

Konsep keragaman budaya yang menjadi dasar dalam pendidikan multikultural diperkenalkan oleh pendidik di hadapan para siswa dengan menggunakan sebuah alat peraga visual berupa payung. Sebut saja payung itu bernama "Payung Multikultural (*The Multicultural Umbrella*) yang pada tiap-tiap ruas bagian luar payung ditulisi berbagai etnis, ras, agama, budaya, kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan/keadaan khusus seperti anak-anak terlantar, orang-orang cacat, penderita AIDS dan lain-lain.<sup>31</sup>

Atas dasar ini maka proses pendidikan multikultural berorientasi pada siswa atau komunitas tertentu, yang memungkinkan guru memahami keyakinan serta nilai-nilai sosio-budaya siswa dalam konteks kebudayaan masyarakat yang berjalan pada saat dia merancang model pembelajaran yang akan digunakan. Para pendidik pada konteks ini disarankan menggunakan pendekatan antropologis untuk mengidentifikasi berbagai kelompok sosial-budaya, nilai-nilai serta norma-norma yang hidup dan mempengaruhi proses kehidupan sehari-hari. Pendekatan antropologis ini akan membantu para pendidik dalam mengidentifikasi perumusan dan penerapan model pembelajaran yang tanggap budaya dan bisa membentuk sikap positif-apresiatif terhadap perbedaan etnik dan sosio-budaya di kelas, masyarakat, dan nasional.<sup>32</sup>

Implementasi pluralisme budaya dalam semua kegiatan

---

<sup>31</sup> Tjetjep Rohendi. "Pendidikan Seni Multikultural", dalam *Kompas*, 23 September 2002, (Jakarta, PT Kompas), hal. 4.

<sup>32</sup> Theo Riyanto. "Pendidikan yang Humanis". <http://bruderfic.or.id/h-60/pendidikan-yang-humanis.html> [8/04/2008].



pengajaran atau belajar sebagai cara dalam melaksanakan pendidikan multikultural perlu didasarkan pada empat premis pokok. *Pertama*, penggunaan khasanah keanekaragaman budaya untuk mencapai hasil pelajaran bersama adalah cara paling baik untuk memberi kesempatan secara sama kepada siswa. *Kedua*, keanekaragaman budaya adalah ciri pembawaan atau sifat dari sebuah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Oleh sebab itu, fungsi utama sekolah dalam mensosialisasikan budaya, etnis dan pluralisme budaya secara nasional harus dijadikan elemen utama dari proses pendidikan. *Ketiga*, kajian pluralisme budaya secara pedagogis menembus semua dimensi dari proses pendidikan. Dengan demikian, pluralisme budaya tidak diajarkan sebagai sesuatu yang terpisah atau mata pelajaran distinktif (mandiri), tetapi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada sebagai semangat dan prinsip pembelajaran. *Keempat*, pendidikan multikultural yang efektif menuntut upaya komprehensif yang memadukan sikap, nilai, isi dan tindakan serta melibatkan semua aspek dari sistem pendidikan secara simultan.<sup>33</sup>

Pendidikan multikultural seyogyanya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang menekankan dominasi sebuah budaya, penuh prasangka dan bersifat diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan bersifat terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka, namun menuntut transformasi menyeluruh yang mencakup transformasi diri, sekolah dan proses belajar mengajar serta masyarakat.

---

<sup>33</sup> Paul Suparno. "Pendidikan Multikultural" dalam *Kompas*, 7 Januari 2003, (Jakarta, PT Kompas).

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Penanaman paham multikulturalisme (toleransi beragama) bagi para santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu belum menjadi prioritas utama dan tidak terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan. Materi Multikultural disampaikan oleh para Ustadz kepada para santri di luar kelas (luar jam belajar formal), yaitu melalui khutbah jum'at, kuliah subuh, muhadharah, dan tausiyah. Kalaupun dibicarakan di dalam kelas (jam belajar) sifatnya hanya kebetulan karena ada ayat-ayat yang muatannya bersentuhan dengan nilai-nilai multikultural. (2) Model komunikasi penyampaian paham multikultural kepada para santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu bersifat verbal dan linier (monologis, satu arah), sehingga tidak ada kesempatan bagi santri untuk bertanya dalam rangka mendalami, memahami, dan mendiskusikan sesuatu yang masih belum jelas berkaitan dengan multikultural.

Saran penulis, pengelola Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu khususnya, dan Pondok Pesantren di tanah air pada umumnya, kiranya dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan materi penanaman nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini penting mengingat negara kita berdasarkan Pancasila yang mengakui adanya lima agama, beragam budaya, dan beraneka adat istiadat. Terlebih akhir-akhir ini pesantren mendapat sorotan tajam akibat pelaku bom bunuh diri yang notabene pendidikannya berbasis pesantren. Sebagai bahan pertimbangan, bahwa toleransi merupakan nilai dasar dari pendidikan multikultural. Sikap toleransi terhadap agama, budaya, dan adat-istiadat yang dianut orang lain tidak akan tertanam dengan sendirinya, tanpa ada usaha sadar dan sungguh-sungguh untuk mengintegrasikan dan menginternalisasikannya ke dalam kurikulum pendidikan.



## BAGIAN 5

# KOMUNIKASI POLITIK KYAI DALAM PILKADA

### A. Pendahuluan

Era reformasi menghembuskan angin segar bagi umat Islam untuk mengambil peran dalam dunia politik, di mana selama Orde Baru keinginan berpolitik terbelenggu dan tidak mendapat kebebasan. Besarnya keinginan berpolitik umat Islam itu dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan partai politik yang didirikan oleh Kyai/Ulama/Ustadz, tokoh agama, dan kaum cendekiawan, baik dengan mengedepankan simbol-simbol Islam maupun nasionalisme kebangsaan. Pernyataan di atas didukung oleh Fatwa,<sup>1</sup> bahwa: "alam reformasi telah melahirkan beberapa partai politik, baik yang berlabel agama maupun non-agama. Keberadaan parpol dalam negara dianggap sebagai salah satu institusi demokrasi. Karena fungsi parpol di antaranya adalah, (i) menyerap dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat; (ii) sarana sosialisasi dan komunikasi politik; dan (iii) media penyaluran perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat – maka kebera-

---

<sup>1</sup> Abdul Mu'nim D.Z. (edt.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas. Hal. 120.

daan parpol yang kuat menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa”.

Kini politik Islam memasuki fase baru yang ditandai dengan tampilnya para intelektual Islam ke panggung politik praktis sebagai pimpinan partai politik. Sebagai cendekiawan kinerja mereka sangat meyakinkan, tetapi sebagai politisi masih perlu dibuktikan.<sup>2</sup> Para Kyai/Ulama/Ustadz, tokoh agama, dan kaum cendekiawan, mereka terjun aktif dalam partai politik. Ada yang bergabung di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan partai politik lainnya.

Muhammad,<sup>3</sup> menambahkan “terbukanya peluang partisipasi politik yang makin luas telah membuka ruang bagi berdirinya partai-partai baru termasuk partai-partai Islam. Fenomena tersebut sekaligus merupakan ekspresi ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik yang ada sekarang, terutama lembaga legislatif”.

Para Kyai/Ulama/Ustadz, merupakan sosok panutan, figur moral, dan orang yang memiliki wawasan keagamaan yang luas. Dengan demikian diharapkan dapat membimbing umat dan menjadi benteng moral dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan hadirnya sosok Kyai/Ulama/Ustad dalam panggung politik, diharapkan dunia politik menjadi lebih bermoral, mementingkan kepentingan rakyat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Seperti dikatakan Al-Faruqi,<sup>4</sup> bahwa “diri Ulama adalah simbol

---

<sup>2</sup> Hajriyanto Thohari Y. (a). 2000. *Daur Ulang Politik Islam*, dalam Abdul Mu'nim D.Z. (ed.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas. Hal. 147.

<sup>3</sup> Agus Muhammad. 2000. *Redefenisi Politik Islam*, dalam Abdul Mu'nim D.Z. (ed.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas. Hal. 99.

<sup>4</sup> Jabir Al-Faruqi, 2000. *Ulama, Pemilu, dan Etika Politik*, dalam Abdul



daripada etika dan moralitas politik, keterlibatan Ulama dalam kancan politik harus bisa memberikan sumbangan besar bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral. Moral yang betul-betul hidup dan menjadikan landasan politik dan bukan sekadar slogan politik”.

Pendapat yang dikemukakan Al-Faruqi bertentangan dengan harapan Ridwan,<sup>5</sup> bahwa “Ulama lebih strategis berada “di luar” parpol. Peran utamanya ialah menjaga kantong-kantong kultural untuk tetap netral secara politik dan konsisten dengan visinya sebagai pilar masyarakat madani. Mereka bisa membangun wacana publik dan kekuatan oposisi permanen”. Senada dengan Al-Faruqi, Rokhmad,<sup>6</sup> menegaskan: “sejak awal, saya termasuk bagian dari mereka yang tidak atau kurang setuju Kyai berkiprah di dunia politik. Pandangan ini sampai sekarang pun masih bertahan. Sebagaimana dikemukakan banyak pihak, terlalu banyak minus atau dampak negatif yang harus ditanggung, baik bagi diri Kyai maupun umat di bawah. Jeratan, jebakan, rayuan dan racun politik dalam berbagai bentuk, seperti materi, kekuasaan, permainan kotor atau fitnah terlalu mudah dideteksi oleh publik, sementara Kyai tidak seluruhnya cerdas dan lihai berpolitik. Ibarat kertas putih bersih, kecurangan atau kekurangan Kyai saat berpolitik sangat mudah dilihat sehingga ujung-ujungnya lahir komentar masyarakat yang tidak simpatik kepadanya, “Kyai kok korupsi, Kyai kok saling fitnah antar Kyai” dan lain sebagainya. Kyai

---

Mu'nim D.Z. (ed.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas. Hal. 158.

<sup>5</sup> M. Deden Ridwan. 2000. *Perubahan Politik dan Kebangkitan Peran Umat Islam*, dalam Nurcholish Madjid (et al.). *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Mediacipta. Hal. 233.

<sup>6</sup> Rokhmad. *Diperlukan Fiqih Politik Kyai*. Melalui < <http://www.freelists.org/archives/ppi/04-2004/msg00089.html> > [25/7/2007].

mesti ditempatkan dalam posisi yang netral, terhormat dan hanya layak mengurus hal-hal yang maslahat demi umat bukan politik yang kotor”.

Keberadaan Kyai/Ulama/Ustadz dalam kancah politik sampai saat ini memang masih diperdebatkan oleh sebagian kalangan. Ada yang berpendapat bahwa Kyai/Ulama/Ustadz seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat, terutama dalam pembinaan kehidupan beragama. Oleh karena itu, lebih tepat jika Kyai/Ulama/Ustadz membimbing umat secara maksimal dan menghindarkan diri dari keterlibatannya di dunia politik.

Ada pula yang berpendapat sebaliknya, tidak ada alasan bagi Kyai/Ulama/Ustadz untuk meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian dari ajaran agama, oleh karenanya hampir setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilu untuk memilih anggota legislatif (DPR) maupun dalam pemilihan kepala daerah (Gubernur, Walikota, atau Bupati), sebagian besar Kyai/Ulama/Ustadz terlibat aktif dalam kegiatan kampanye dan pencitraan positif calon yang didukungnya dengan dalih demi kemaslahatan umat.

Seperti dikatakan Suprayopgo,<sup>7</sup> peran politik elit agama dalam era pembangunan dewasa ini juga tidak sepi dari kontroversi. Sebagian pengamat, Usman (1990) misalnya, mengatakan bahwa keberadaan Kyai dalam politik semakin terpinggirkan. Sementara Suprpto (1997) menemukan bukti bahwa posisi Kyai di tengah masyarakat yang dijadikan objek penelitian masih kokoh.

Dengan dikibarkannya bendera reformasi di negeri ini,

---

<sup>7</sup> Imam Suprayogo. (b). 2006. *Telaah Atas Realitas Peran Politik Elit Agama Kini dan Yang Akan Datang*, dalam Mudjia Rahardjo (ed.). *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*. Malang: UIN Malang Press. Hal. 137.



yang sekaligus mengantarkan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih dikenal sebagai era otonomi daerah yang bertumpu pada asas demokrasi, pemerataan dan keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peran serta masyarakat.

Demokrasi yang disuarakan dan diperjuangkan di era reformasi telah memberikan peluang emas bagi para Kyai/Ulama/Ustadz untuk aktif dalam panggung politik. Mereka berpeluang menduduki jabatan politis, seperti Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati, dan bahkan menjadi anggota dewan yang terhormat.

Contoh kongkrit dalam hal ini adalah Wakil Gubernur Bengkulu "H. Syamlan, Lc" yang sebelumnya adalah Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu dan seorang Ustadz yang aktif menyampaikan dakwah, memberikan ceramah, khutbah dan pengajian. Dalam Pilkada bulan Oktober tahun 2005 melalui perahu PKS beliau berpasangan dengan Ir. Agusrin M. Najamudin meraih suara terbanyak dan menang dalam Pilkada.

Berpijak pada realitas yang ada di lapangan, perlu kiranya membangun sebuah kerangka dan bentuk pemberdayaan Kyai/Ulama/Ustadz yang akan menggeluti dunia politik sehingga dapat memberi warna dan teladan dalam pendewasaan politik umat (masyarakat luas). Akan tetapi, kontroversi sosok Kyai/Ulama/Ustadz yang berpolitik sampai saat ini masih saja terjadi. Hal tersebut menandakan bahwa masih adanya aspek-aspek menarik yang perlu dikaji lebih lanjut tentang sosok Kiyai/Ulama/Ustadz yang berpolitik. Tulisan ini berangkat dari hasil penelitian tentang "Peran Kyai di Era Otonomi Daerah (Mengkaji Tipologi Politik Kyai di Kota Bengkulu)".

## B. Kyai dan Perannya di Masyarakat

Sebutan Kyai sebenarnya merupakan istilah yang dipakai oleh kalangan masyarakat Jawa untuk menyebut elit agama Islam.<sup>8</sup> Seperti halnya "Buya" sebutan elit agama di Sumatera Barat. Ajengan sebutan elit agama untuk orang Sunda, Tengku sebutan elit agama untuk orang Aceh, Syekh sebutan elit agama untuk orang Sumatera Utara, dan Tuan Guru sebutan elit agama untuk orang Nusa Tenggara Timur, Kalimantan). Sedangkan sebutan elit agama untuk masyarakat di Kota Bengkulu lebih populer dengan istilah Ustadz, yakni mereka yang aktif menyampaikan dakwah, memberikan ceramah, khutbah, dan mengisi pengajian. Selain itu, merupakan sosok panutan, figur moral, dan memiliki wawasan keagamaan yang luas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kyai sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam).<sup>9</sup> Sarman,<sup>10</sup> menyatakan "seorang Kyai sebenarnya seorang Ulama (ilmuan) yang menguasai sesuatu bidang ilmu agama atau beberapa bidang sekaligus. Tetapi, tidak setiap Ulama lantas disebut Kyai. Kyai lebih dekat pada profil cendekiawan pemikir, dan sekaligus sosok panutan dalam amal perbuatan bagi umat atau kelompok pengikutnya". Quraish Shihab,<sup>11</sup> menyebutkan bahwa: "peran Ulama – di Indonesia, khususnya di Jawa Timur

---

<sup>8</sup> Imam Suprayogo. 2007. *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*. Malang: UIN Malang Press. Hal. 1.

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 565.

<sup>10</sup> Mukhtar Sarman. 1999. *Jagat Kyai*, dalam Marzuki Wahid (et.al.). *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna*. Jakarta: Harian Kompas Bekerja sama dengan Lakpesdam NU. Hal. 264.

<sup>11</sup> Quraish Shihab dalam A'la, Abd. 2002. *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: Kompas. Hal. 94.



biasa disebut atau identik dengan Kyai – memberikan petunjuk dan bimbingan keagamaan dalam rangka mengatasi persoalan yang berkembang, seperti perselisihan pendapat dan problem sosial yang lain. Peran ini bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Ini menuntut para Kyai untuk selalu menafsirkan nilai-nilai dan ajaran agama ke dalam konteks kekinian sesuai dengan perkembangan sosial, budaya dan politik yang terjadi. Di samping itu, tugas tersebut memerlukan kehati-hatian dan daya kritisme tinggi sehingga Kyai dalam kondisi apa pun bisa tetap netral dan punya posisi tawar-menawar yang tinggi dengan semua pihak”.

Kyai, sebagaimana dilukiskan oleh Robert R. Jay (1968),<sup>12</sup> sebagai manusia profesional terpelajar (*learned profession*), golongan intelegensia tradisional, dan ulama, sejatinya merefleksikan jiwa kenabian. Kyai, sebagai pewaris nabi, tugas utamanya adalah meneruskan misi dan perjuangan para nabi dalam menyampaikan agama Allah kepada umat manusia.

Burhani,<sup>13</sup> berpendapat bahwa Ulama adalah kelompok terbatas yang dipersepsikan orang awam sebagai elit, karena ada nilai tambah dalam dirinya, mereka mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan. Seseorang akan disebut Ulama atau Kyai kalau disebut Kyai oleh masyarakat, bukan diproklamirkan sendiri oleh penyandanginya.

Ulama adalah orang yang tertanam akarnya pada masyarakat dan tumbuh dari dan di tengah-tengah rakyat.<sup>14</sup> Ulama

---

<sup>12</sup> Lihat dalam Ahmad Barizi. *Ketika Kyai Ber-Politik*, dalam Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius. Volume III, Nomor 12, Oktober – Desember 2004. Hal. 38.

<sup>13</sup> Ahmad Najib Burhani. 1999. *Agama, Nahdlatul Ulama, dan Sikap Memilih Partai*, dalam Marzuki Wahid (et.al.). *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna*. Jakarta: Harian Kompas Bekerja sama dengan Lakpesdam NU. Hal. 134.

<sup>14</sup> Lihat Dawam R., dalam Ahmad Najib Burhani. 1999. *Agama,*

menurut Geertz memiliki fungsi utama sebagai perantara atau pialang budaya (*cultural brokers*). Pandangan ini dilandaskan pada fenomena bahwa Ulama menjadi penghubung antara budaya lokal atau budaya rakyat dengan kultur Islam atau kultur asing.

Menurut Abdillah,<sup>15</sup> Ulama memiliki kedudukan yang tinggi dan peran yang penting karena mereka merupakan pewaris para Nabi yang mempunyai tugas untuk: (a) mendidik umat di bidang agama dan lainnya, (b) melakukan kontrol terhadap masyarakat, (c) memecahkan problem yang terjadi dalam masyarakat, dan (d) menjadi agen perubahan sosial.

Penelitian Suprayogo yang sudah diterbitkan menjadi sebuah buku oleh UIN-Malang Press dengan judul "KYAI DAN POLITIK: Membaca Citra Politik Kyai". Penelitiannya menekankan pada tiga aspek: (1) Sosok Kyai dalam mengemban peran-peran sosialnya; (2) Keterlibatan Kyai dalam politik; dan (3) Relasi Kyai dan Politik. Berkenaan dengan peran sosial, bahwa Kyai di tengah-tengah masyarakat pada umumnya melakukan banyak peran. Mereka dapat sebagai pendidik agama, pemuka agama, pelayan sosial dan sebagian ada yang melakukan peran politik. Sebagai pendidik agama, Kyai biasanya memiliki pondok pesantren, di mana sehari-hari mereka mengajarkan agama kepada para santrinya. Sebagai pemuka agama, mereka bertindak menjadi pemimpin kegiatan ibadah seperti shalat, khotbah, do'a, puasa, zakat, dan haji. Adapun sebagai pelayan sosial, sering kali mereka dijadikan tempat bertanya atau tumpuan orang-orang meminta nasihat, tempat meminta layanan penyembuhan lewat kekuatan supranatural,

---

*Nahdlatul Ulama, dan Sikap Memilih Partai*, dalam Marzuki Wahid (et.al.). *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna*. Jakarta: Harian Kompas Bekerja sama dengan Lakpesdam NU. Hal. 147.

<sup>15</sup>Masykuri Abdillah. 2000. "Ulama dan Politik", dalam Abdul Mu'nim D.Z. (edt.). 2000. "Islam di Tengah Arus Transisi". Jakarta: Kompas. Hal. 162.



dijadikan orang yang dituakan dan sebagainya.

Sedangkan keterlibatan Kyai dalam politik, mereka melakukan perannya yang terkait dengan kepentingan umum baik melalui partai politik secara langsung atau tidak langsung maupun lewat saluran-saluran lain yang bisa dilakukan. Mengenai relasi Kyai dan politik, semestinya harus dilihat dari kerangka konseptual, yaitu: *pertama*, pemikiran yang mengatakan bahwa ajaran Islam adalah bersifat holistik. Islam dianggap sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah agama. *Kedua*, ada yang berpendapat bahwa tidak ada bukti jelas bahwa ajaran Islam (yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah) mengharuskan orang Islam untuk mendirikan "Negara Islam". Pengalaman politik Nabi di Madinah tidak dianggap sebagai proklamasi berdirinya "Negara Islam". Bagi mereka, yang terpenting adalah bukan "Negara Islamnya" tetapi bagaimana ajaran-ajaran Islam mampu terimplementasikan dalam kultur masyarakat secara luas.

### C. Keterlibatan Kyai dalam Politik

Sejak awal hingga perkembangan terakhir, politik memiliki definisi yang berbeda-beda menurut cara pandang orang yang menggunakan istilah tersebut. Menurut Mufid,<sup>16</sup> "politik adalah segala usaha yang berkaitan dengan kekuasaan baik cara memperoleh, mendistribusikan, maupun mempertahankannya". Sedangkan dalam pandangan klasik yang telah dikemukakan oleh Aristoteles, politik dilihat sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan ber-

---

<sup>16</sup> Ahmad Syafi'i Mufid. "Penggunaan Simbol-simbol Keagamaan untuk Kepentingan Politik", dalam Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius, Volume III, Nomor 12, Oktober - Desember 2004. Hal. 76.

sama seluruh anggota masyarakat.<sup>17</sup>

Abdurrahman,<sup>18</sup> berpendapat bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Politik, salah satunya bertujuan melembagakan penyelesaian konflik agar konflik itu tidak melebar menjadi anarkisme dan kekerasan. Dengan kata lain, politik justru menyalurkan konflik ke dalam prosedur, aturan dan mekanisme membangun kompromi dan konsensus antaraktor dan pemain-pemain politik.<sup>19</sup> Al-Qur'an dan al-Hadits hanya menyebutkan hukum tata negara secara garis besar, sehingga kemudian muncul ijtihad para Ulama yang merumuskan teori-teori tentang ketatanegaraan atau politik Islam. Terutama yang bersifat teknis operasional yang merupakan nilai instruktural dan nilai praktis.<sup>20</sup>

Untuk memaparkan keterlibatan Kyai dalam politik, paling tidak kita dapat merujuk pendapat Suprayogo,<sup>21</sup> dari per-

---

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. Hal. 2.

<sup>18</sup> Abdurrahman. "Pemikiran Hamka Tentang Politik Dalam Tafsir Al-Azhar", dalam *Jurnal Penelitian Agama: Media Komunikasi, penelitian, dan Pengembangan Ilmu-ilmu Agama*. Vol. XII, No. 1 Januari – April 2003. Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal. 130.

<sup>19</sup> Maliki. "Insensibilitas Moral dan Kekerasan Elite Politik", dalam *Dialog No. 54 Th. XXV. Desember 2002*. *Jurnal Penelitian dan Informasi Keagamaan*. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Hal. 46.

<sup>20</sup> Hilmi. "Pemikiran Politik Islam tentang Hubungan Eksekutif dan Legislatif", dalam *Media Akademika Vol. 19, No. 2, April 2004*. *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. Puslit IAIN Sulthan Thoha Saifuddin Jambi. Hal. 120.

<sup>21</sup> Imam Suprayogo (b). 2006. "Telaah Atas Realitas Peran Politik Elit Agama Kini dan Yang Akan Datang", dalam Mudjia Rahardjo (edt.). *Quo*



spektif sosiologis, yaitu: "Pertama, bahwa sumber ajaran Islam yang selalu dijadikan sebagai rujukan oleh para elit agama, dipahami memiliki lingkup tak terbatas pada aspek-aspek ritual dan bimbingan moral belaka, melainkan juga memberikan nilai-nilai pada semua sisi kehidupan – baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, dan juga politik. Kedua, mereka yang berposisi sebagai pemuka agama memiliki pengikut dan pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu menyebabkan elit agama diperhitungkan dalam pengambilan keputusan bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian problem-problem Ipoleksosbudhankamnas. Ketiga, elit agama sesungguhnya merasa mengemban misi yang hal ini memerlukan dukungan penguasa baik yang bersifat material maupun immaterial. Keempat, elit agama juga berfungsi sebagai kekuatan yang dapat memberikan legitimasi terhadap keputusan-keputusan dan bahkan juga keberadaan penguasa. Oleh sebab itu, menjadi sangat mudah dipahami jika seorang pejabat datang ke elit agama untuk meminta doa restu dan sejenisnya. Kelima, dari sisi sejarah, elit agama memiliki sejarah keterlibatan politik yang cukup panjang dan penting dalam membangun bangsa Indonesia".

Hal yang perlu dimaklumi, bahwa tipe Kyai yang berbeda, tentu akan memiliki orientasi kegiatan dan bentuk keterlibatan yang tidak sama. Kyai yang lebih memperhatikan aspek politik tentu akan berbeda dengan Kyai yang memiliki konsentrasi pada kehidupan dan pengembangan pesantren, sehingga fokusnya pada bagaimana mengurus para santri agar taat melakukan ibadah dan memiliki kemampuan mendalami Islam dengan membaca kitab-kitab klasik. Demikian pula

---

*Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*". Malang: UIN Malang Press. Hal. 140-141.

dengan Kyai yang berpendidikan ganda - lulusan pondok pesantren sekaligus sekolah umum dan dapat melanjutkan kuliah, akan memiliki pandangan yang berbeda dengan Kyai yang hanya berpendidikan pondok pesantren saja.

#### D. Agama dan Politik

Berbicara agama (Islam) kaitannya dengan politik, menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Islam adalah agama yang sama sekali tidak memisahkan urusan duniawiyah dengan urusan ukhrawiyah. Islam agama yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, santun, menghormati orang lain, tanggung jawab, istiqamah, terbuka, dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang diajarkan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka umat Islam perlu mengambil bagian dalam sistem kenegaraan, dan aktivitas politik di negeri ini. Untuk itu, kehadiran Kyai/Ustadz/Ulama sebagai tokoh agama diharapkan dapat memberikan warna, kesejukan, sebagai tempat meminta petuah/nasihat serta mampu berfungsi menjadi teladan dan menjadi benteng moral bagi masyarakat dan pemerintah. Kehadiran Kyai di pentas politik juga bisa bermakna positif, sepanjang tetap istiqamah dengan pendiriannya, yaitu dengan keteladanan moral yang dimiliki, diharapkan dapat mewarnai kehidupan politik ke arah yang lebih baik, terhormat dan bermartabat.

Ruslani,<sup>22</sup> mengatakan "persoalan antara Islam dan negara dalam masa modern merupakan salah satu subjek penting,

---

<sup>22</sup> Ruslani, 2000. *Politik Islam di Tengah Pluralisme Politik*, dalam Abdul Mu'nim D.Z. (edt.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas. Hal. 138.



yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini, tetap belum terpecahkan secara tuntas". Masih menurut Ruslani, (2000: 141), "membicarakan hubungan antara agama dan negara sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan antara doktrin ajaran Islam dan praktik politik umat Islam. Karena dalam setiap praktik politik muslim, doktrin selalu memainkan peranan meskipun bukan pemeran tunggal". Sedangkan menurut Dhakiri,<sup>23</sup> penempatan Islam dalam wacana politik di Indonesia ternyata menghadirkan wajah yang berbeda-beda, yaitu: "*pertama*, kelompok yang memandang bahwa Islam adalah agama perfeksionis yang mencakup seluruh dimensi urusan manusia; tidak semata mengatur relasi vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga relasi horizontal antarsesama manusia. Masalah politik merupakan sesuatu yang termasuk di dalamnya. Kelompok ini meyakini Islam sebagai agama dan sekaligus negara (*al-Islam diinun wa al-daulah*), sehingga penafsiran doktrin Islam atas persoalan-persoalan politik dirasakan sebagai keharusan agama. Pada gilirannya, formalisasi dan institusionalisasi agama diniscayakan sebagai upaya mencari jawab atas persoalan-persoalan politik itu. *Kedua*, kelompok yang berpendapat bahwa Islam terlepas dari hal-hal yang bersifat duniawi. Islam harus dijaga kemurniannya dari kemungkinan kontaminasi unsur-unsur duniawi. Masalah politik adalah hal duniawi yang berada di luar pagar agama, dan oleh karena itu harus dijauhkan antara keduanya. *Ketiga*, kelompok yang berpandangan di antara kedua pandangan di atas, yaitu bahwa Islam tidak memberikan rumusan baku tentang sistem politik kenegaraan, akan tetapi menyediakan

---

<sup>23</sup> Muh. Hanif Dhakiri. 2000. *Partai Islam dan Islam Berparta*", dalam Abdul Mu'nim D.Z. (edt.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas. Hal. 135.

seperangkat tata nilai sebagai landasan etik bagi penataan kehidupan berpolitik dan bernegara. Substansi kehidupan dengan *idea moral* – meminjam istilah Fazlur Rahman – Islam akan lebih bermakna bagi penciptaan kehidupan bernegara yang beradab dan jauh dari kontraksi, reduksi, dan distorsi-distorsi ajaran.

Dari ketiga pemahaman itulah lahir berbagai bentuk artikulasi dan agregasi politik yang berbeda-beda, bahkan bertentangan. Kelompok pertama menekankan kaitan formal ideologi Islam dengan negara (politik), kelompok kedua membuat garis demarkasi yang tajam antara Islam dan politik, sedangkan kelompok ketiga mengukuhkan ajaran/nilai-nilai dalam realitas politik dan negara”.

### E. Komunikasi Politik dan Teori Pendukungnya

Komunikasi politik menurut Fagen,<sup>24</sup> merupakan segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Cakupannya meliputi: jaringan komunikasi (organisasi, kelompok, media massa, saluran khusus) dan determinan sosial ekonomi dari pola-pola yang ada pada sistem tersebut.

Lord Windlesham dalam karyanya “*What is Political Communication*” (seperti dikutip Effendy),<sup>25</sup> mendefinisikan Komunikasi Politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komu-

---

<sup>24</sup> Sumartias. 2004. “NU dan Komunikasi Politik: Suatu Telaah terhadap Kiprah NU pada Pilpres 2004”, dalam “*Jurnal Komunikasi dan Informasi, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2004*”. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Hal. 382.

<sup>25</sup> Bahtiar Effendy. 2000. *Islam di Tengah Polarisasi Politi*”, dalam Nurcholish Madjid (et.al.). *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madan*”. Jakarta: Mediapipta. Hal. 158.



nikan dengan tujuan mempengaruhinya, di situ harus terdapat keputusan politik yang dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan". Oleh karenanya, Nimmo,<sup>26</sup> mendefinisikan Komunikasi Politik sebagai "*communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict*" (komunikasi atau kegiatan yang dianggap politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial, yang menata perilaku manusia dalam kondisi konflik).

### 1. Teori Persuasi

Teori Persuasi dapat membantu mengidentifikasi proses-proses yang terjadi ketika pesan-pesan kampanye diarahkan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak. Selain itu, dapat memperkaya pemahaman mengenai tahapan efek yang akan dimunculkan dalam sebuah kegiatan kampanye.<sup>27</sup> Olson dan Zanna,<sup>28</sup> mendefinisikan persuasi sebagai "perubahan sikap akibat paparan informasi orang lain".

Devito,<sup>29</sup> mengatakan "kebanyakan pembicaraan bersifat persuasif. Pembicaraan para politisi, pengiklan, dan pemuka agama barangkali merupakan contoh yang paling jelas. Dalam sebagian besar pembicaraan anda sendiri, anda juga berusaha melakukan persuasi. Anda akan berusaha mengubah sikap dan kepercayaan pendengar anda, atau barangkali mengubah

---

<sup>26</sup> Dan Nimmo. 2004. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. Vi.

<sup>27</sup> Antar Venus. 2004. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Akomunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Hal. 43.

<sup>28</sup> Olson dan Zanna dalam Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr. 2005. "*Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*". Edisi Kelima. Jakarta: Kencana. Hal. 177.

<sup>29</sup> Joseph A. Devito. 1997. *Komunikasi Antarmanusia: Kuliah Dasar*. Edisi Kelima, terjemahan Agus Maulana dari *Human Communication*. Jakarta: Professional Books. Hal. 447.

perilaku mereka". Rudy,<sup>30</sup> mendefinisikan "persuasif adalah kegiatan psikologis dengan menggunakan bahasa dan tindakan dalam usaha mempengaruhi pendapat, sikap, dan tingkah laku seseorang atau orang banyak".

Beberapa tokoh komunikasi, seperti Bettinghaus & Cody, 1987; Littlejohn dan Jabusch, 1987; Smith, 1982,<sup>31</sup> menegaskan "keberhasilan anda dalam mengukuhkan atau mengubah sikap atau kepercayaan dan dalam mengajak pendengar anda untuk berbuat sesuatu akan bergantung pada pemanfaatan prinsip-prinsip persuasi". Oleh karenanya, Nimmo,<sup>32</sup> menegaskan "persuasi adalah suatu proses yang di dalamnya baik persuader maupun yang dipersuasi sama-sama responsif, bukan reaktif terhadap satu sama lain; perilaku itu konstruktif, interpretif, dan dipikirkan; jadi tidak pasif dan tak dipikirkan".

Menurut Effendy,<sup>33</sup> "*from Attention to Action Procedure (A-A Procedure)* adalah proses pentahapan persuasi yang dimulai dari usaha membangkitkan perhatian (*attention*) untuk kemudian berusaha menggerakkan seorang atau orang banyak agar melakukan kegiatan (*action*) seperti yang kita harapkan. Lebih lanjut Effendy menjelaskan: "*A-A Procedure* tersebut hendaklah melalui proses pentahapan yang disebut AIDDA (*Attention, Interest, Desire, Decision, dan Action*). Proses pentahapan ini dimaksudkan agar persuasi dimulai dengan jalan membangun

---

<sup>30</sup> Teuku May Rudy. 2005. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 66.

<sup>31</sup> Joseph A. Devito. 1997. *Komunikasi Antarmanusia: Kuliah Dasar*. Edisi Kelima, terjemahan Agus Maulana dari *Human Communication*. Jakarta: Professional Books. Hal. 447.

<sup>32</sup> Dan Nimmo. 2004. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 146.

<sup>33</sup> Onong Uchjana Effendy. 2000. "*Dinamika Komunikasi*". Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 176.



kitkan perhatian (*attention*) terlebih dahulu. Tanpa adanya perhatian dari komunikan, komunikasi tak akan dapat berlangsung. Apabila perhatian telah tumbuh, hendaknya disusul dengan usaha menumbuhkan minat (*interest*) sehingga komunikan mempunyai hasrat (*desire*) untuk memenuhi apa yang kita ajukan, dan akhirnya terjadi keputusan (*decession*) untuk melakukan kegiatan (*action*) sesuai ajakan kita.

Dalam komunikasi, usaha membangkitkan perhatian dalam rangka melaksanakan *A-A Procedure* tidak saja dilakukan pada saat mulai berkomunikasi, melainkan harus dibina jauh-jauh sebelumnya. Berkomunikasi dengan orang yang sudah dikenal lebih mudah dan akan lebih berhasil dibandingkan dengan mereka yang tidak dikenal sebelumnya.

## 2. Teori Pemrosesan-Informasi McGuire

Teori Pemrosesan-Informasi McGuire menyebutkan bahwa "perubahan sikap terdiri dari enam tahap, yang masing-masing tahap merupakan kejadian penting yang menjadi patokan untuk tahap selanjutnya. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Pesan persuasif harus dikomunikasikan;
2. Penerima akan memerhatikan pesan;
3. Penerima akan memahami pesan;
4. Penerima terpengaruh dan yakin dengan argumen-argumen yang disajikan;
5. Tercapai posisi adopsi baru; dan
6. Terjadi perilaku yang diinginkan.

Lebih lanjut, Severin dan Tankard,<sup>35</sup> mengemukakan Teori

<sup>34</sup> Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr. 2005. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Edisi Kelima. Jakarta: Kencana. Hal. 204.

<sup>35</sup> Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr. 2005. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Edisi Kelima. Jakarta:

Pemrosesan-Informasi McGuire memberi kita sebuah pandangan yang bagus tentang proses perubahan sikap, mengingatkan kita bahwa ia melibatkan sejumlah komponen.

## F. Islam, Negara, dan Politisi Moral

Menurut Madjid,<sup>36</sup> "salah satu persoalan yang banyak menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan banyak orang ialah persoalan politik dalam Islam atau hubungan antara agama dan negara dalam Islam". Untuk melihat bagaimana pandangan para Ustadz yang pernah aktif dan terlibat langsung dalam panggung politik memandang "Islam dan negara" dari kacamata dan perspektif mereka. Anwar Ali,<sup>37</sup> mengatakan bahwa Islam dan negara tidak boleh dipisahkan, artinya bagaimana Islam bisa mewarnai kehidupan negara. Untuk itu, kita harus andil bagian dalam sistem sehingga dapat ikut menentukan kebijakan. Ahmad Zarkasi,<sup>38</sup> menjelaskan bahwa Islam juga mengatur hal-hal yang bersifat negara tapi tidak disebutkan secara eksplisit tentang negara di dalam ajaran Islam. Sesungguhnya secara defakto bahwa negara sesuatu yang penting di dalam Islam. Tidak ada Islam kecuali ada jamaah, tidak ada jamaah kecuali ada imamah (kepemimpinan). Bagi seorang muslim wajib berjamaah.

Ustadz dan aktivis Partai Golkar, Djali Affandi,<sup>39</sup> berpen-

---

Kencana. Hal. 205.

<sup>36</sup> Nurcholish Madjid, (et.al.). 2000. *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Mediacipta. Hal. 191.

<sup>37</sup> Wawancara tanggal 2 Agustus 2007 di kediaman informan, Jl. Hibrida 10 Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

<sup>38</sup> Wawancara tanggal 5 Agustus 2007 di kediaman informan, Jl. Merapi 7 RT. 5 Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

<sup>39</sup> Wawancara tanggal 6 Agustus 2007 di kediaman informan, Jl. Hibrida Raya Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.



dapat bahwa Islam dan negara tidak dipisahkan, dalam konteks Indonesia sejarah telah membuktikan berdirinya NKRI tidak terlepas dari peran Ulama (Islam). Selain itu, satu-satunya negara yang mempunyai Departemen Agama hanya Indonesia, dan yang mengusulkannya ketika itu adalah para Ulama.

Dari pernyataan politisi di atas dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan pandangan tentang Islam dan negara, intinya bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks Indonesia, sejarah membuktikan bahwa tidak sedikit peran yang dimainkan Ulama (Islam) untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karenanya, keterlibatan tokoh-tokoh Islam mengurus bangsa dan negara merupakan keharusan, dan harus dapat mewarnai bangsa dan negara ini dengan nilai-nilai keislaman (bermoral, jujur, adil, dan mengedepankan kepentingan rakyat).

Sumargono, berpendapat bahwa "Islam bukan hanya agama, tetapi juga komunitas (umat), tidak hanya menyangkut masalah individual tetapi juga kolektivitas. Agama – pinjam istilah Kuntowijoyo – tidak hanya menuntut internalisasi nilai yang bersifat individual tetapi juga memerlukan eksternalisasi sebagai konsekuensi dari yang pertama. Dua hal tersebut (internalisasi dan eksternalisasi) merupakan dua sisi dari satu keping mata uang yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. Pada tataran eksternalisasi ini yang biasanya menjadi problem. Di satu sisi kelompok umat Islam ingin menjalankan ajaran agamanya secara "penuh", namun jika hal itu dilakukan akan "mengancam" penganut agama yang lain".

Masih dalam koneksi Islam dan negara, Suprayogo,<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Lihat dalam Mu'nim D.Z., Abdul, (edt.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas. Hal. 82.

<sup>41</sup> Lihat dalam Mudjia Rahardjo (edt.). 2006. *Quo Vadis Pendidikan*

mengemukakan bahwa "sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang posisi agama dan negara. Dalam kajian politik Islam kontemporer, setidaknya ada tiga aliran pemikiran tentang hubungan antara Islam dan politik. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat yang hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan. Islam dipandang sebagai suatu agama yang sempurna dan lengkap mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Hasan al-Bana, Sayyid Quthub, Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling gigih adalah Abu A'la al-Maududi. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa Islam memerlukan kekuatan untuk melaksanakan syari'ah dan dakwah. Syari'ah akan dapat berjalan dengan baik jika terdapat kekuatan yang melaksanakan, yaitu negara".

Berbicara masalah politik, berarti bicara soal strategi. Politisi Partai Bulan Bintang, Anwar Ali,<sup>42</sup> mengatakan bahwa politik itu adalah seni dalam memimpin dan dalam mengambil kebijakan. Islam juga sebenarnya politik (siyasah). Bagaimana politik diwarnai oleh nilai-nilai keislaman. Tokoh politik dari Partai Keadilan Sejahtera, Zarkasi,<sup>43</sup> berpandangan bahwa politik itu sebenarnya adalah sistem yang dijalani dalam sebuah negara, dalam istilah lain kekuasaan. Politik dalam Islam disebut dengan siyasah. Politik bagian dari Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari persoalan aqidah (iman), muamalah (ekonomi), politik, militer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, proses untuk mewujudkan

---

*Islam: Pembacaan Relitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan.* Malang: UIN-Malang Press. Hal. 141.

<sup>42</sup> Wawancara tanggal 2 Agustus 2007.

<sup>43</sup> Wawancara tanggal 5 Agustus 2007.



kepemimpinan itulah politik. Orang yang tidak berpolitik berarti menghilangkan sesuatu dari kesempurnaan Islam itu sendiri.

Aktivis Partai Golkar, Djali Affandi,<sup>44</sup> menegaskan politik jangan dipahami dalam arti sempit, kalau dipahami dalam arti sempit maka politik itu cenderung kotor, merebut kekuasaan, dan menghalalkan segala cara. Padahal setiap orang harus tahu politik, karena politik itu bicara strategi bagaimana untuk mencapai tujuan dengan tidak menghalalkan segala cara. Sebagai orang yang beragama politik yang dimainkan harus tetap beretika.

Politik dalam pandangan para politisi seperti disebutkan di atas pada prinsipnya sama, yaitu "dimaknai sebagai sebuah strategi (siyasah)". Politik jangan dimaknai dalam arti yang sempit. Setiap orang harus berpolitik, karena politik bagian dari Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Politik adalah seni dalam memimpin dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (kekuasaan) dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keislaman sehingga tidak menghalalkan segala cara. Oleh karenanya, umat Islam harus piawai dalam berpolitik, sehingga memperoleh posisi yang dapat menentukan kebijakan dan kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan umat.

Suprayogo,<sup>45</sup> mempertegas bahwa "tidak mudah memisahkan Ulama dari kegiatan politik, baik dalam tataran empirik, apalagi dalam tataran teoritik filosofisnya". Hamka,<sup>46</sup> menam-

---

<sup>44</sup> Wawancara tanggal 6 Agustus 2007.

<sup>45</sup> Lihat dalam Mudjia Rahardjo (ed.). 2006. *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Relitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*. Malang: UIN-Malang Press. Hal. 138.

<sup>46</sup> Rusjdi Hamka. 1986. *Etos, Iman, Ilmu dan Amal Dalam Gerakan Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas. Hal. 35.

bahkan “politik dan Islam sekali-kali bukan dua kutub yang bertentangan. Politik menurut ajaran Islam ialah “upaya menegakkan keadilan dan kesejahteraan yang diridhai Allah”, *Baldhatun Thayibatun wa Rabbun Ghafur*, bukan sekadar untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara”.

Burhani,<sup>47</sup> secara keras mengungkapkan bahwa “agama merupakan ideologi doktrinal-dogmatis yang kebenarannya diakui berasal dari Tuhan. Bagaimana ia mesti berperan dalam pergulatan politik, sebagai legitimator atau oposan”. Sedangkan Noer,<sup>48</sup> menegaskan “politik Islam menuntut penganutnya untuk mengikutsertakan akhlak, etika dan moral dalam sikap dan tindakannya. Kalau tidak, maka yang lebih menonjol dalam sikap dan tindakan itu adalah segi kepraktisan atau kepragmatisan belaka. Lebih parah lagi bila dalam sikap dan tindakan tadi hanya tujuan singkat yang dikejar – umpamanya kursi, atau harta – tanpa memperhatikan apakah tujuan itu dicapai dengan disertai kelurusan, kebenaran dan keadilan”.

Senada dengan pernyataan Noer, ditegaskan oleh Thohari,<sup>49</sup> “seorang muslim yang memilih politik sebagai lapangan perjuangan harus menegakkan moralitas Islam. *Pertama*, ia tidak boleh larut dalam opini publik yang sekuler yang memandang bahwa dalam politik orang boleh bertindak kotor. *Kedua*, seorang muslim justru harus berdakwah untuk menegakkan

---

<sup>47</sup> Ahmad Najib Burhani. 1999. *Agama, Nahdlatul Ulama, dan Sikap Memilih Parta*”, dalam Marzuki Wahid (et.al.). *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna*. Jakarta: Harian Kompas Bekerjasama dengan Lakpesdam NU. Hal. 118.

<sup>48</sup> Lihat dalam Mu’nim D.Z., Abdul, (ed.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas. Hal. 116.

<sup>49</sup> Hajriyanto Y. Thohari (a). 2000. “*Daur Ulang Politik Islam*”, dalam Abdul Mu’nim D.Z. (ed.). 2000. “*Islam di Tengah Arus Transisi*”. Jakarta: Kompas. Hal. 237.



akhlak Islam dalam politik.

Ustadz yang terjun dalam panggung politik paling tidak dapat menangkap pernyataan yang disampaikan Fatwa,<sup>50</sup> bahwa "seorang politisi harus mempunyai pemikiran bahwa mereka masuk wilayah politik guna memperjuangkan nilai-nilai, dan dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut harus mempunyai posisi. Posisi adalah bagian dari kekuatan untuk mengimplementasikan nilai-nilai. Para politisi dalam mewarnai panggung politik nasional haruslah seorang moralis, bukan mengejar kekuasaan untuk kepuasan diri, tetapi menggunakan kekuatan untuk mengabdikan kepada agama, bangsa, dan negara".

Benang merah dari pemaparan di atas adalah bahwa setiap orang yang terjun di dunia politik dan memilih politik sebagai lapangan perjuangan "dipersilahkan dan tidak haram" sepanjang politik yang dimainkan di bingkai, diwarnai, dan dihiasi oleh nilai-nilai Islam, mengedepankan aspek moral, jujur, berkeadilan, bertanggungjawab dan untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan dan memperkaya diri pribadi, terlebih jika yang berpolitik berlatar belakang Ustadz (tokoh agama

### G. Tujuan Elit Agama Berpolitik

Peran politik para elit agama juga dapat dilihat secara jelas dalam alam modern seperti sekarang ini. Peran-peran yang dimainkan itu kadangkala tampak cantik, menarik dan kelihatan lihai. Dalam berpolitik, tanpa dapat diduga, elit agama tak ubahnya seorang pesilat yang lincah.<sup>51</sup> Untuk menge-

---

<sup>50</sup> A.M. Fatwa. 2000. "Satu Islam Banyak Partai", dalam Abdul Mu'nim D.Z. (edt.). 2000. "Islam di Tengah Arus Transisi". Jakarta: Kompas. Hal. 123.

<sup>51</sup> Suprayogo dalam Mudjia Rahardjo (edt.). 2006. *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Relitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*. Malang: UIN-Malang Press. Hal. 139.

tahui tujuan dan peran yang dimainkan oleh Ustadz sebagai elit agama yang terjun dalam dunia politik praktis dan pernah menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu, dapat kita ikuti pernyataan mereka sebagai berikut:

Anwar Ali,<sup>52</sup> anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Bulan Bintang. Motivasinya terjun ke dunia politik karena keinginannya untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi dan ingin memperbaiki kondisi yang ada. Selain itu, tegas Ali, ingin mewarnai kebijakan pemerintah, oleh karena itu, ke depan kita menginginkan lebih banyak tokoh-tokoh yang religius melalui partai-partai Islam menjadi anggota DPR ketimbang orang-orang yang berjiwa premanisme. Persoalannya, ketika akan menelorkan kebijakan yang bernuansa agama sangat sulit, karena suara yang ada di DPR tidak seimbang, lebih banyak mereka (yang tidak berlatar belakang Ustadz) daripada kita yang berbasis religius. Sebagaimana hadist Nabi menegaskan *"Jika melihat kemungkaran ubah dengan tanganmu, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisanmu, dan jika tidak juga mampu maka ubahlah dengan hati (berdo'a)"*.

Zarkasi,<sup>53</sup> Ketua DPRD Kota Bengkulu dan aktivis Partai Keadilan Sejahtera, Ia mengatakan motivasinya terjun ke dunia politik karena menginginkan perbaikan di masyarakat, dengan cara membangun sebuah politik yang baik melalui wadah politik yang baik pula. Partai Keadilan yang didirikan pada tahun 1999 oleh aktivis dakwah, mahasiswa, para da'i di pesantren, dan aktivis dunia perguruan tinggi merupakan apresiasi untuk melaksanakan nilai-nilai keislaman ke dalam sebuah sistem. Partai yang didirikan dijadikan sebagai sarana untuk berkiprah secara kongkrit melakukan praktik politik

---

<sup>52</sup> Wawancara tanggal 2 Agustus 2007.

<sup>53</sup> Wawancara tanggal 5 Agustus 2007.



yang jujur, dan tidak menghalalkan segala cara. Politik sebagai sebuah wasilah untuk melaksanakan tugas dakwah. Aspek-aspek kehidupan masyarakat bisa diatur dengan baik dengan adanya otoritas politik yang dimiliki, jangan saling menzholimi. Mencegah kemungkaran tidak cukup dengan ceramah di mimbar-mimbar. Dengan kekuatan politik bisa menggunakan tandatangan untuk mengeluarkan kebijakan larangan pelacuran. Menghapus perjudian tidak cukup dengan ceramah tetapi dengan kekuasaan politik melalui penetapan kebijakan.

Pada tahun 2004 karena tuntutan konstitusi, Partai Keadilan berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebenarnya, PKS adalah partai yang menjalankan agenda-agenda dakwah, di mana politik bagian dari kerja dakwah. Barangkali berbeda dengan partai politik yang lain, PKS bukan hanya sebagai sebuah partai politik, tetapi jati dirinya sebagai sebuah partai dakwah. Bukan saja melaksanakan agenda politik 5 tahunan, tetapi di samping itu PKS melaksanakan misi dakwah sepanjang masa. Didirikan partai sebagai wasilah untuk mewujudkan misi dakwah secara lebih kongkrit.

Fungsi dakwah mengajak kepada kebaikan. Ada 2 (dua) hal yang ingin dipastikan di dalam kerja dakwah, yaitu *wayak-muruuna bi al-ma'rufi wayanhauna ani al-munkari* (memerintah-kan orang melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar). Fungsi amar makmur nahi mungkar akan lebih efektif jika punya otoritas. Otoritas sesuatu yang harus diperjuangkan. Kekuasaan dalam Islam adalah tegaknya kekuasaan manusia dalam rangka untuk menjalankan kekuasaan Allah SWT. Tanpa ada perjuangan politik, dakwah tidak akan efektif. Untuk memperjuangkan masalah ekonomi, kesejahteraan di tengah masyarakat eksistensi politik menjadi diperlukan. Perjuangan politik lalu menghasilkan lembaga perwakilan rakyat, orang-orang yang mewakili masyarakat dan memiliki otoritas

dapat melahirkan kebijakan untuk perbaikan masyarakat, dan itu adalah misi dakwah. Kekuasaan (politik) dalam Islam bukan seperti yang dipahami orang selama ini "kekuasaan manusia atas manusia".

Djali Affandi,<sup>54</sup> menegaskan bahwa tujuannya terjun ke dunia politik adalah untuk memperjuangkan kepentingan agama melalui penetapan kebijakan anggaran di DPRD. Selain itu, untuk menunjukkan bahwa orang yang berlatar belakang agama (Ustadz) mampu berpolitik.

Dari pernyataan informan di atas dapat ditangkap bahwa ada tiga tujuan Ustadz terjun dalam dunia politik, yaitu (1) *untuk memperbaiki kondisi yang ada*. Jalan yang ditempuh adalah mengambil bagian dalam proses demokrasi dengan cara membangun politik yang baik, melakukan praktik politik yang jujur, tidak menghalalkan segala cara. Di duga, selama ini para politisi yang menjadi anggota legislatif tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya, justru melakukan kecurangan, tidak jujur, tidak adil, tidak bermoral, dan tidak memikirkan rakyat; (2) *untuk mewarnai kebijakan pemerintah dan memperjuangkan anggaran untuk kepentingan agama di lembaga legislatif*. Pengalaman selama ini anggaran untuk kepentingan agama sangat kecil, ini disebabkan oleh orang yang menjadi anggota legislatif tidak memiliki emosional yang kuat dengan urusan agama, sehingga perjuangan ke arah itu sangat kecil dan sedikit sekali; dan (3) *untuk menunjukkan bahwa Ustadz pun mampu berpolitik*. Hal ini disebabkan oleh masih adanya anggapan di masyarakat bahwa tugas Ustadz itu cukup membina umat, dengan memberi ceramah, khutbah jum'at, tabligh musibah, membaca do'a dan mengurus masjid, sedangkan untuk urusan politik bukan wilayahnya.

---

<sup>54</sup> Wawancara tanggal 6 Agustus 2007.



Di sini penting kita ikuti saran yang disampaikan Achmad,<sup>55</sup> bahwa dalam aktivitas politik hendaklah mengikuti rumusan Muhammad Asad yang menggunakan “kesadaran ketuhanan” dalam bahasa Arab sinonim dengan kesadaran *rabbaniyyah* atau *ribbiyyah*. Artinya, segala aktivitas individu – termasuk aktivitas politik – disadari sepenuh hati berada dalam bingkai “kesadaran ketuhanan”, di mana Tuhan senantiasa mengawasi gerak gerik kita, di manapun kita berada, termasuk dalam aktivitas politik manusia.

Berkenaan dengan kampanye politik saat berlangsungnya pesta demokrasi “Pemilihan Umum” Ali,<sup>56</sup> mengatakan bahwa dalam berkampanye “menyampaikan visi politik” dirinya tidak pernah berjanji kepada masyarakat, apalagi saat ia terjun ke dunia politik tidak dengan modal yang besar. Ali menambahkan, meskipun di Bengkulu jumlah orang yang berasal dari Sumatera Barat cukup banyak, tetapi ia tidak pernah secara khusus meminta dukungan orang-orang minang.

Zarkasi,<sup>57</sup> mengatakan visi politik yang disampaikan pada saat kampanye adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selama ini masyarakat tidak memahami ajaran Islam secara utuh, bahwa politik itu bagian dari Islam. Bukan orang berpolitik lalu mempolitisir Islam. Lebih lanjut Zarkasi mengatakan, perlunya melibatkan peran serta masyarakat dalam politik. Jika masyarakat aspirasi politiknya diberikan kepada orang yang tidak memiliki akhlak, maka akan melahirkan pemimpin yang jelek dan tidak berakhlak. Allah memerintahkan agar memilih pemimpin yang baik dan jangan dipilih pemimpin yang musyrik, pilih yang dapat mengan-

---

<sup>55</sup> Nur Achmad (edt.). 2001. “Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman”. Jakarta: Kompas. Hal. 114.

<sup>56</sup> Wawancara tanggal 2 Agustus 2007.

<sup>57</sup> Wawancara tanggal 5 Agustus 2007.

tarkan masyarakat kepada kebaikan. Seorang masyarakat jika memilih pemimpin yang baik itu adalah kerja ibadah. Kerja-kerja politik yang dilakukan dalam rangka menegakkan Islam secara utuh, itu pun bagian dari ibadah.

Affandi,<sup>58</sup> dalam berkampanye lebih menyuarakan dan mengedepankan konsep “pembangunan yang berkeseimbangan”, jika pembangunan fisik material tidak diimbangi dengan pembangunan mental spiritual, maka negara akan hancur.

Pernyataan yang dipaparkan di atas menunjukkan adanya perbedaan isu yang dijual para Ustadz pada saat kampanye politik, paling tidak ada tiga isu, yaitu: (1) menjual isu “kejujuran dan tidak mengobral janji” karena memang berangkat dari modal yang tidak besar; (2) mengangkat isu perlunya “pembangunan berkeseimbangan” antara fisik material dengan mental sepiritual, karena pembangunan yang dilakukan selama ini hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, sehingga melahirkan berbagai kehancuran diberbagai sektor kehidupan; dan (3) perlunya “melibatkan peranserta masyarakat” dalam politik. Jika masyarakat aspirasi politiknya diberikan kepada orang yang tidak berakhlak, maka akan melahirkan pemimpin yang jelek dan tidak berakhlak. Jika masyarakat memilih pemimpin yang baik itu adalah kerja ibadah. Kerja-kerja politik yang dilakukan dalam rangka menegakkan Islam secara utuh, itu pun bagian dari ibadah.

Saat berlangsungnya kampanye pemilu para calon legislatif berusaha keras mempengaruhi massa pemilih dengan berbagai cara agar pada saat pemilu digelar partainya yang menjadi pilihan. Menurut Burhani,<sup>59</sup> tidak heran jika pada saat penco-

---

<sup>58</sup> Wawancara tanggal 6 Agustus 2007.

<sup>59</sup> Ahmad Najib Burhani. 1999. “Agama, Nahdlatul Ulama, dan Sikap Memilih Partai”, dalam Marzuki Wahid (et.al.). “Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna”. Jakarta: Harian Kompas



blosan hanya partai yang berjuang menyuarkan amanat hati nurani rakyat, *al-amar bi al-ma'rufi* dan *al-nahy 'ani al-munkari* (memberi motivasi untuk berakhlak luhur, membela kebenaran, dan memerangi kemungkaran), menekankan etika politik yang jujur dan adil, berorientasi kesejahteraan rakyat, serta berjiwa keselamatan dunia dan akhirat, kiranya yang patut dipilih. Bukan partai yang penuh hiasan ayat suci, namun hampa dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Rakyat membutuhkan bukti, bukan janji.

Aktivitas sosial yang dilakukan Ustadz yang berpolitik dapat kita ketahui dari pernyataan mereka, seperti yang dikatakan Ali,<sup>60</sup> dengan jujur mengungkapkan bahwa dirinya sejak menjadi anggota dewan, terjadi pengurangan aktivitas di masyarakat, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya tugas dan luasnya jangkauan kegiatan yang dilakukan sampai ke daerah tingkat dua lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Akan tetapi, Ali masih menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, berupa sunatan massal, pengobatan gratis, bakti sosial, memberi bantuan kepada anak yatim dan fakir miskin. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu yang tersedia. Sedangkan Zarkasi,<sup>61</sup> menegaskan bahwa dirinya masih aktif membina masyarakat, karena PKS yang menjadi kendaraan politiknya merupakan partai dakwah. Dakwah yang dilakukan tidak hanya di masyarakat tetapi juga dakwah disampaikan di parlemen, kalangan eksekutif dan legislatif. Pembinaan yang dilakukan berupa: pengajian, majelis taklim, khutbah jum'at, dan pembinaan secara langsung dan intensif. Affandi,<sup>62</sup> mene-

---

Bekerja sama dengan Lakpesdam NU. Hal. 123.

<sup>60</sup> Wawancara tanggal 2 Agustus 2007.

<sup>61</sup> Wawancara tanggal 5 Agustus 2007.

<sup>62</sup> Wawancara tanggal 6 Agustus 2007.

gaskan bahwa dirinya selama ini aktif dalam kegiatan masyarakat, tapi sejak menjadi anggota dewan mengurangi aktivitasnya, terutama jadwal mengisi Khutbah Jum'at. Namun demikian, dirinya masih aktif sebagai Ketua Yayasan Tarbiyah Provinsi Bengkulu dan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam (saat itu).

Tidak dipungkiri bahwa Ustadz yang dulunya aktif membina umat (mengisi pengajian rutin, khutbah jum'at, ceramah umum dan sejenisnya), setelah menjadi anggota legislatif kegiatan tersebut tidak lagi dilakukan secara penuh, bahkan ditinggalkan karena terbatasnya waktu. Kondisi seperti ini tentu mengakibatkan ada pihak yang dirugikan, yaitu masyarakat yang selama ini menjadi jama'ah pengajiannya dan menyumbangkan suara dalam pemilihan umum. Namun demikian, masih ada juga yang menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu yang tersedia, artinya kegiatan ini dilakukan tidak rutin. Ada juga yang masih konsisten dan aktif membina masyarakat, kendati sudah menjadi anggota legislatif. Hal ini disebabkan oleh perbedaan visi dari partai politik yang menjadi kendaraan politiknya. Pembinaan kepada umat atau dakwah yang dilakukan tidak hanya terbatas pada masyarakat tetapi juga dakwah disampaikan di parlemen, kalangan eksekutif dan legislatif.

## H. Polemik dan Tipologi Ustadz Berpolitik

Polemik dan perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya Ustadz berpolitik, Ali,<sup>63</sup> berpendapat bahwa perbedaan pendapat itu terjadi dari sisi mana orang memandang, yang ragu lebih baik tidak usah berpolitik daripada terjerumus

---

<sup>63</sup> Wawancara tanggal 2 Agustus 2007.



kepada hal-hal yang subhat. Jika memandang secara lebih luas, daripada dikuasai orang-orang salib lebih baik kita yang ambil peran, akan lebih baik kita menjadi orang yang menentukan. Praktik politik selama ini adalah praktik politik yang tidak Islami, dan kondisi ini yang mengharuskan kita terjun ke dunia politik praktis, untuk mengubah pandangan masyarakat yang menilai bahwa politik itu kotor. Agar politik itu bisa indah, maka hendaknya agenda politik dilaksanakan secara baik. Dengan politik kita bisa jadi Presiden. Kepemimpinan Islam itu harus dan wajib ditegakkan.

Zarkasi,<sup>64</sup> menyatakan, sebagai seorang Ustadz, da'i harus terjun dalam dunia politik. Pandangan masyarakat yang menilai bahwa politik yang berlangsung selama ini kotor dan tidak bermoral, karena selama ini politik dijalankan oleh orang-orang yang memang tidak berlatar belakang dan memahami agama dengan baik. Sehingga sepak-terjang yang ditampilkan dalam berpolitik juga tidak baik, tidak bermoral, dan tidak jujur. Kalau Ustadz dalam berpolitik sikapnya baik, sepak-terjangnya menguntungkan masyarakat, justru semakin menambah simpatik masyarakat dan menambah kharismatik sang Ustadz. Rasulullah sendiri sebagai pemimpin masyarakat menggunakan *siyasah*. Ustadz yang terjun di dunia politik tergantung partai politik yang mana yang dijadikan perahunya. PKS punya nilai lebih di banding dengan partai politik yang lain, karena PKS bisa masuk pada wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh organisasi-organisasi lain. Agenda dakwah PKS adalah bagaimana dapat menempatkan orang terbaiknya menjadi anggota Legislatif, Walikota, Gubernur, Presiden, dan sebagainya. Affandi,<sup>65</sup> dengan sederhana mengatakan bahwa politik itu boleh dengan tetap menempatkan agama

---

<sup>64</sup> Wawancara tanggal 5 Agustus 2007.

<sup>65</sup> Wawancara tanggal 6 Agustus 2007.

sebagai payung dan pedoman.

Berkaitan dengan pandangan Ustadz di atas, Suprayogo,<sup>66</sup> mengatakan dalam perkembangan politik di tanah air belakangan ini, di satu pihak terlihat luapan partisipasi politik di kalangan umat dan elit agama (Islam) yang kental membawa agama beserta ayat-ayat dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Sementara di pihak lain, terdapat kecenderungan pada sebagian pemimpin agama dan politik sehingga sering kali memunculkan himbauan agar tokoh politik tidak melibatkan agama dalam politik praktis.

Munculnya perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya Ustadz berpolitik tergantung dari sisi mana orang memandang. Jika praktik politik dilakukan secara proporsional dan profesional, sikap berpolitiknya baik, sepak terjangnya menguntungkan masyarakat, maka orang akan memandang Ustadz tidak akan miring. Tetapi sayangnya, praktik politik yang dilakukan selama ini tidak secara Islami, yang dilakukan adalah politik kotor dan tidak bermoral, karena yang menjadi anggota dewan berasal dari orang-orang yang tidak memahami agama dengan baik.

Untuk memahami tipologi politik Kyai/Ustadz, tokoh agama, para peneliti melakukan kategorisasi, misalnya Mansurnoor,<sup>67</sup> mengajukan kategorisasi atas dasar respon Kyai terhadap perubahan sosial sehingga ia membagi Kyai ke dalam Kyai konservatif, adaptif dan progresif. Kategorisasi lainnya dikemukakan oleh Dirdjosanjoto dan Turmudi,<sup>68</sup> dalam pene-

---

<sup>66</sup> Suprayogo dalam Mudjia Rahardjo (edt.). 2006. *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Relitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*. Malang: UIN-Malang Press. Hal. 135.

<sup>67</sup> Lihat Imam Suprayogo. 2007. *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kya*". Malang: UIN Malang Press. Hal. 103.

<sup>68</sup> Lihat Imam Suprayogo. 2007. *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kya*". Malang: UIN Malang Press. Hal. 104.



litiannya di daerah Muria, Dirdjosanjoto mengkategorisasikan Kyai ke dalam Kyai langgar, Kyai pesantren dan Kyai tarekat. Sedangkan Turmudi membedakan Kyai ke dalam Kyai pesantren, Kyai politik, Kyai tarekat, dan Kyai Panggung.

Setelah memperhatikan pemikiran, pandangan dan berbagai informasi yang disampaikan Ustadz sebagaimana dipaparkan di atas, kemudian diinventarisir kesamaan-kesamaan dan juga perbedaan-perbedaannya yang menonjol. Diketahui bahwa terdapat beberapa kesamaan antara Ustadz yang satu dengan yang lainnya, misalnya pada komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan agama melalui kebijakan yang ditelorkan di DPRD Kota Bengkulu. Selain itu, adanya pengurangan aktivitas di masyarakat, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya tugas dan kesibukan yang harus dikerjakan sebagai anggota dewan.

Adapun tipologi Ustadz yang dapat ditarik dari uraian di atas sebagai berikut:

a) Ustadz Politisi Religius

Dalam berpolitik nilai-nilai keagamaan lebih dikedepankan, orientasi memperjuangkan kepentingan agama melalui pengambilan kebijakan di DPR kelihatan lebih kental. Prinsip yang dipegang adalah "lebih baik kita mengambil bagian dalam politik daripada dipimpin oleh orang-orang yang nonmuslim apalagi yang berjiwa premanisme.

b) Ustadz Politisi Nasionalis

Dalam berpolitik lebih mengedepankan nilai-nilai nasionalisme, kendati masih menyuarakan kepentingan agama saat menentukan kebijakan di lembaga legislatif. Nilai nasionalisme ini dapat diketahui dari perilaku politik yang diperankan dan partai yang mengusungnya menjadi anggota dewan serta referensi yang menjadi bahan bacaannya, seperti buku-buku karya Bung Karno.

c) **Ustadz Politisi Dakwah**

Setiap gerakan politik yang dilakukan senantiasa berorientasi kepada misi dakwah, dakwah tidak hanya dilakukan di masyarakat, dakwah juga harus disampaikan di parlemen, legislatif, eksekutif, masjid, dan di manapun berada, orientasi ini dipengaruhi oleh visi partai yang dijadikan kendaraan politiknya menuju anggota dewan terhormat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1994. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama R.I.
- Abdillah, Masykuri. 2000. *Ulama dan Politik*, dalam Abdul Mu'nim D.Z. (edt.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas.
- Abdurrahman. *Pemikiran Hamka Tentang Politik Dalam Tafsir Al-Azhar*, dalam Jurnal Penelitian Agama: Media Komunikasi, penelitian, dan Pengembangan Ilmu-ilmu Agama. Vol. XII, No. 1 Januari – April 2003. Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Abidin, Yusuf Z, *Analisis Lingkungan dalam Penyusunan dan Penyajian Program Dakwah*, Jurnal Ilmu Dakwah: *Academic Journal for Homiletic Studies*. Vol. 3 No. 9 / Januari-Juni 2007, Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2007.
- Abrar, Ana Nadhya. 2011. Makalah "Bagaimana Memframing Dakwah Islam". Disampaikan pada Seminar Nasional dan Temu Dekan Fakultas Dakwah se Indonesia di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 29 Oktober 2011.
- Achmad, Nur (edt.). 2001. *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

- Ahmadi, Abu. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Faruqi, Jabir. 2000. *Ulama, Pemilu, dan Etika Politik*, dalam Abdul Mu'nim D.Z. (edt.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas.
- Ali, Muhamad. *Pendidikan Pluralis-Multikultural*, dalam Kompas, Jakarta, PT. Kompas, 26 April 2002.
- Amin, Samsul Munir. 2008. "Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam". Jakarta: Amzah.
- Amrozi, Yusuf. 2009. "Sumbangsih Teknologi Informasi untuk Pengembangan Dakwah Islam". Lihat dalam Congress Proceeding "Dakwah dan Pembangunan Bangsa: Strategi Transformatif Masyarakat Multikultural". Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel – APDI, Surabaya, 15 s.d. 17 Mei 2009.
- Anam, Saiful. 2012. *Merekonstruksi Kerukunan yang Hakiki*. Majalah Ikhlas Beramal, Edisi 74, April 2012.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- , *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*", melalui: < <http://kongres.budpar.go.id>, > [24 Agustus 2012].
- Banks, James A. 1997. *Multicultural education: Characteristics and goals*, In J. A. Banks and C. A. M. Banks (Eds.) *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Boston, Allyn and Bacon.
- Barizi, Ahmad. *Ketika Kyai Ber-Politik*, dalam Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius. Volume III, Nomor 12, Oktober – Desember 2004.
- Blum, Lawrence. 2001. *Anti Rasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi sebuah Masyarakat Multikultural*, dalam Larry May (ed.), *Etika Terapan 1 Sebuah Pendekatan Multikultural*. Yogyakarta: Tiara Wacana.



- Burhani, Ahmad Najib. 1999. *Agama, Nahdlatul Ulama, dan Sikap Memilih Partai*, dalam Marzuki Wahid (et.al.). *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna*. Jakarta: Harian Kompas Bekerja sama dengan Lakpesdam NU.
- Dawam R., dalam Ahmad Najib Burhani. 1999. *Agama, Nahdlatul Ulama, dan Sikap Memilih Partai*, dalam Marzuki Wahid (et.al.). *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna*. Jakarta: Harian Kompas Bekerja sama dengan Lakpesdam NU.
- Devito, Joseph A.. 1997. *Komunikasi Antarmanusia: Kuliah Dasar*. Edisi Kelima, terjemahan Agus Maulana dari *Human Communication*. Jakarta: Professional Books.
- Dhakiri, Muh. Hanif. 2000. *Partai Islam dan Islam Berpartai*, dalam Abdul Mu'nim D.Z. (edt.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas.
- Dhofier, Zamacksyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Durkheim, Emile. 1966. *Suicide; A Study in Sociology*. New York: Free Press.
- Edyar, Busman. *Sisdiknas dan Pendidikan Pluralis-Multikultural*, dalam Kompas, Jakarta, PT. Kompas, 31 Maret 2003.
- Effendy, Bahtiar. 2000. *Islam di Tengah Polarisasi Politi*, dalam Nurcholish Madjid (et.al.). *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madan*. Jakarta: Mediascripta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2004. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Enjang dan Aliyudin. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Dakwah*. Bandung: Widya Padjadjaran.

- Enjang dan Hajir Tajiri. 2009. *Etika Dakwah: Suatu Pendekatan Teologis dan Filosofis*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi: Teori & Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu dan Universitas Mercu Buana.
- Faletahan, Aun Falestien. 2009. *Mengapa Harus Menggunakan Manajemen dalam Kegiatan Dakwah?* Lihat dalam Congress Proceeding "Dakwah dan Pembangunan Bangsa: Strategi Transformatif Masyarakat Multikultural". Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel – APDI, Surabaya, 15 s.d. 17 Mei 2009.
- Fatimah, Siti, *Pemberdayaan Klien dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal PMI Vol. III Nomor 2, Maret 2006, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Fatwa, A.M. 2000. *Satu Islam Banyak Partai*, dalam Abdul Mu'nim D.Z. (edt.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas.
- Fay, Brian. 1998. *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Massachusetts: Blank Well Publishers Ltd.
- Gay, Geneva. 1994. *A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education*. Dalam *Urban Education Monograph Series*. Washington, NCREL's Urban Education Program.
- Ghazali, M. Bahri. 1997. *Dakwah Komunikatif: Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Pedomannya Ilmu Jaya.
- Giddens, Anthony. 1989. *Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Gollnick, Donna M. dan Philip C. Chinn. 1991. *Multicultural Education for Exceptional Children*. E. IC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA.
- Gorski, Paul. 2003. *Multicultural Philosophy Series, Part 1: A Brief History of Multicultural Education*, dalam *The McGraw Hill Education Papers online*. The McGraw-Hill Companies.
- Hamidah. Makalah (t.t.). *Dakwah Islam Era Global*.



- Hamka, Rusjdi. 1986. *Etos, Iman, Ilmu dan Amal Dalam Gerakan Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama, Haviland, William A. 1988. *Antropologi 2*. terj. Jakarta: Erlangga.
- Hidalgo, Francisco. 2003. *Multicultural Education Landscape For Reform In Twenty First Century*. New Mexico State University.
- Hilmi. *Pemikiran Politik Islam tentang Hubungan Eksekutif dan Legislatif*, dalam *Media Akademika Vol. 19, No. 2, April 2004*. Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman. Puslit IAIN Sulthan Thoha Saifuddin Jambi.
- Horton dan Hunt. 1984. *Sociology*. (London: Prentice Hall Hurnes IV.
- Ibrahim, Ruslan. 2008. *Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama*. *el-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, No 1 Vol. 1, 2008.
- Ilaihi, Wahyu. 2009. *Dakwah Sebagai Solusi Perdamaian Global*. Lihat dalam Congress Proceeding "Dakwah dan Pembangunan Bangsa: Strategi Transformatif Masyarakat Multikultural". Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel – APDI, Surabaya, 15 s.d. 17 Mei 2009.
- Ilaihi, Wahyu. 2010. *Komunikasi Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ismail, Faisal. 2011. *Tantangan dan Peluang Dakwah di Tengah Masyarakat Plural*. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Temu Dekan Dakwah se-Indonesia di Hotel UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 28 – 30 Oktober 2011.
- Istiqamah, melalui: < <http://komunitas.wikispaces.com/file/view/pemberdayaan+dalam+konteks+pengembangan+masyarakat+islam.pdf> > [11/06/2012].

- Kalida, Muhsin, *Networking: Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSK) dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Jurnal PMI Vol. III Nomor 2, Maret 2006, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Keller, Suzanne and Craig Calhoun. 1989. *Sociology*. McGraw-Hill.
- Koentjaraningrat. 1978. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kornblum, Guy O. 1988. *Sociology in a Changing World*. Belmont: Wadsworth.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi: Metodologi Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Larasati, melalui: < <http://www.google.co.id/#sclient=psy-ab&hl=id&site=&source=hp&q=komunikasi+efektif+dalam+penelitian> > [27/01/2012].
- Mack, Jr. C. 1992. *Mistaken Identity and Issues in Multicultural Education*. Updating School Board Policies, Juli–Agustus 1992.
- Madjid, Nurcholish, (et.al.). 2000. *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respons dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Mediacipta.
- Mahadi, Ujang. 2015. *"Komunikasi dan Dakwah Kontemporer: Pendekatan Fenomenologi, Interaksi Simbolik dan Dramaturgi"*. Bogor: IPB Press.
- Maliki. *Insensibilitas Moral dan Kekerasan Elite Politik*, dalam *Dialog No. 54 Th. XXV. Desember 2002*. Jurnal Penelitian dan Informasi Keagamaan. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- McCarthy, Cameron. 1994. *Multicultural Discourses and Curriculum Reform: A Critical Perspective*, dalam *Journal Winter Online*. Illinois, University of Illinois, Number 1 Volume 44.



- Melalui < [http://faculty.petra.ac.id./ido/courses/3b\\_tantangan-komunikasi.pdf](http://faculty.petra.ac.id./ido/courses/3b_tantangan-komunikasi.pdf) > [31/10/2007].
- Melalui: < <http://azriepo.blogspot.com/2011/01/etika-dakwah-dan-komunikasi.html> > [16/10/2011].
- Melalui: < <http://komunitas.wikispaces.com/file/view/pemberdayaan+masyarakat+islam+.pdf> > [11/06/2012].
- Melalui: < <http://zonaislam.net/?p=12383> > [16/10/2011].
- Melalui: < <http://www.dipertais-net/istiqra/1st-02-05> > [24/09/2012].
- Melalui: < <http://id.shvoong.com/humanities/linguistics/2198716-pengertian-komunikasi-yang-efektif/> > [30/01/2012].
- Melalui: < <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya> > [27/09/2011].
- Melalui: < <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya> > [27/09/2011].
- Melalui: < <http://www.anneahira.com/komunikasi-efektif.htm> > [28/01/2012].
- Melalui: < <http://www.google.co.id/search?q=definisi%20komunikasi&ie=utf-8&oe=utf> > [28/01/2012].
- Mu'nim D.Z., Abdul, (edt.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas.
- Mubarok, Ahmad. 2008. *Psikologi Dakwah*. Cetakan keempat. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. *Penggunaan Simbol-simbol Keagamaan untuk Kepentingan Politik*, dalam Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius, Volume III, Nomor 12, Oktober-Desember 2004.
- Muhammad, Agus. 2000. *Redefenisi Politik Islam*, dalam Abdul Mu'nim D.Z. (edt.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), *Komunikasi*

- Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat (ed.). 2003. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasruddin Harahap. 2005. Makalah "Pembangunan Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Islam". Yogyakarta, 16 Maret 2005.
- Nimmo, Dan. 2004. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oetomo, Dede. 2007. *Penelitian Kualitatif: Aliran dan Tema*", dalam Bagong Suyanto & Sutinah. (edt.), 2007. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Olson dan Zanna dalam Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr. 2005. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Edisi Kelima. Jakarta: Kencana.
- Omar, Toha Yahya, *Islam dan Dakwah*, Jakarta: Zakia Islami Press, 2004.
- Open, Manfred dan Wolfgang Karcher. 1988. *Dinamika Pesantren*. Jakarta: P3M.
- Peh, Ting Chew. 1985. *Konsep Asas Sosiologi*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajar Malaysia.
- Pramudya, Wahyu. 2005. *Pluralitas Agama: Tantangan Baru Bagi Pendidikan Keagamaan di Indonesia*. *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 6/2, Oktober 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspito, Hendro. 1989. *Sosiologi Sistemik*. Yogyakarta: Kanius.



- Rahardjo, M. Dawam. 1988. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, Mudjia (edt.). 2006. *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Relitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*. Malang: UIN-Malang Press.
- Rahardjo, Turnomo, *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Reissman, Rose. 1994. *The Evolving Multicultural Classroom*. Dalam *ASCD Publication*. New York, ASCD.
- Ridwan, M. Deden. 2000. *Perubahan Politik dan Kebangkitan Peran Umat Islam*, dalam Nurcholish Madjid (et.al.). *Kemampuan Spiritual Masyarakat Modern: Respons dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Media Cipta.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Cetakan Ketiga. Alih bahasa Alimandan. Jakarta: Kencana.
- Riyanto, Theo. *Pendidikan yang Humanis*. Melalui: < <http://bruderfic.or.id/h-60/pendidikan-yang-humanis.html> > [8/04/2008].
- Rohendi, Tjetjep. 2002. *Pendidikan Seni Multikultural*. Dalam Kompas. 23 September 2002. Jakarta: PT Kompas.
- Rokhmad. *Diperlukan Fiqih Politik Kyai*. Melalui < <http://www.freelists.org/archives/ppi/04-2004/msg00089.html> > [25/7/2007].
- Romanowski, Jennifer. 2002. *Exploring My Practicum Community A Critical Analysis of Multicultural Education Initiatives*, in the *Winning Paper*. Nipissing University.
- Rudy, Teuku May. 2005. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Ruslani. 2000. *Politik Islam di Tengah Pluralisme Politik*, dalam

- Abdul Mu'nim D.Z. (edt.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas.
- Sairin, Weinata. 2006. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Bangsa: Butir-Butir Pikiran*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Salmadani. 2012. "Kearifan Dakwah dalam Kemajemukan Umat". Makalah pada acara Seminar Nasional "Dakwah dan Radikalisme" dan Temu Dekan/Kajur Dakwah se Indonesia di IAIN Imam Bonjol, Padang, 3 Nopember 2012.
- Samovar, Larry A, *Komunikasi Lintas Budaya (Communication Between Cultures)*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, Edisi VII, Penerjemah Indri Margaretha Sidabalok.
- Sarman, Mukhtar. 1999. *Jagat Kyai*, dalam Marzuki Wahid (et.al.). *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna*. Jakarta: Harian Kompas Bekerjasama dengan Lakpesdam NU.
- Semiawan, Conny. 2003. *Memelihara Integrasi Sosial dan Meneakkan HAM Melalui Pendidikan Multikultural*, dalam Sari Makalah Seminar Integrasi Sosial dan Penegakkan HAM. Ditjen HAM.: 14 September 2003.
- Severin, Werner J. dan James W. Tankard, Jr. 2005. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Edisi Kelima. Jakarta: Kencana.
- Shihab, Quraish, dalam A'la, Abd. 2002. *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: Kompas.
- Soedjono. 1982. *Teori Sosiologi*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soejono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekarnoputri, Megawati. 2003. *UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Lembaran Negara, 8 Juli 2003.
- Soemardjan, Selo dan Soelaiman Soemardi. 1974. *Bunga*



- Rampai Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Sumartias. 2004. *NU dan Komunikasi Politik: Suatu Telaah terhadap Kiprah NU pada Pilpres 2004*, dalam *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2004. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.
- Suparlan, Parsudi. 2003. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Dalam *Artikel CMDD*. Jakarta, CMDD Online. Melalui: < [http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel\\_ps.htm](http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm).
- Suparno, Paul. *Pendidikan Multikultural*. Dalam *Kompas*. 7 Januari 2003. Jakarta: PT Kompas.
- Suprayogo, Imam, 2006. *Telaah Atas Realitas Peran Politik Elit Agama Kini dan Yang Akan Datang*, dalam Mudjia Rahardjo (edt.). *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*. Malang: UIN Malang Press.
- , 2007. *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*. Malang: UIN Malang Press.
- Suranto Aw., *Komunikasi Sosial Budaya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Susiyanto. 2006. *Solidaritas Sosial Cina Muslim dan Non-Muslim dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Edisi Khusus, Juni 2006.
- Sutaryo, *Sosiologi Komunikasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2005.
- Taneko, Soleman B. 1984. *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Thohari Y., Hajriyanto (a). 2000. *Daur Ulang Politik Islam*, dalam Abdul Mu'nim D.Z. (edt.). 2000. *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas.

- Tubbs, Stewart L dan Sylvia Moss, *Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, terjemahan Dedy Mulyana dan Gembirasari.
- Venus, Antar. 2004. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Akomunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Watkins, William, H.. 1994. *Multicultural Education: Toward a Historical and Political Inquiry*, dalam *Journal Winter Online*. Illinois, University of Illinois, Number 1 Volume 44.
- Widowati, Dewi. Melalui: < <http://nr67.wordpress.com/2009/05/08/komunikasi-antarbudaya/> > [6/04/2012].
- Yewanggoe, Andreas Anangguru. 2009. *Agama dan Kerukunan*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Zubaidi, Advan Navis. 2009. "Adopsi Taknologi dalam Dakwah". Lihat dalam Congress Proceeding "Dakwah dan Pembangunan Bangsa: Strategi Transformatif Masyarakat Multikultural". Fak. Dakwah IAIN Sunan Ampel – APDI, Surabaya, 15 s.d. 17 Mei 2009.



## BIODATA PENULIS



**UJANG MAHADI** menyelesaikan Pendidikan S.3 Ilmu Komunikasi pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung dengan mendapatkan beasiswa. Menyelesaikan pendidikan S.2 Ilmu Komunikasi di Universitas yang sama tahun 2006 dengan mendapat Beasiswa IIEF (*Indonesian International Education Foundation*). Pendidikan S.1 diselesaikan di IAIN Raden Fatah tahun 1993 dengan mendapat Beasiswa Supersemar.

Dirinya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu (2013-2017). Sebelumnya, pernah menjabat Ketua Jurusan Dakwah STAIN Bengkulu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Humas di STAIN Bengkulu. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian. Banyak penelitian yang sudah dihasilkan dan beberapa tulisannya dimuat di media cetak, baik jurnal Ilmiah maupun koran. Buku yang sudah diterbitkan adalah "Komunikasi Keluarga: Model Alternatif Komunikasi Suami-Istri". "Komunikasi dan Dakwah Kontemporer: Pendekatan Fenomenologi, Interaksionisme Simbolik, dan Dramaturgi". Serta yang ada di tangan anda saat ini "Komu-

nikasi Antarbudaya: Strategi Membangun Komunikasi Harmoni pada Masyarakat Multikultural”.

Sejak kuliah S.1 penulis sudah aktif di berbagai organisasi. Berbagai kegiatan tingkat nasional pernah diikuti, seperti seminar, diklat, munas, mukernas, dan lomba pidato nasional. Penulis pernah melakukan “Studi Keilmuan & Kebudayaan” di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Maret 2005. Pada tahun 2013 penulis melakukan lawatan di beberapa perguruan tinggi di Malaysia, diantaranya Universitas Islam Malaysia (USIM) dan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Penulis juga berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan yang berkaitan dengan buku ini dapat menghubungi penulis melalui:

E-mail: [mahadi4kdzhnh@yahoo.com](mailto:mahadi4kdzhnh@yahoo.com)

HP. 0816392275/081322860735





Ujang Mahadi menyelesaikan Pendidikan S3 Ilmu Komunikasi pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung dengan mendapatkan beasiswa. Dirinya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu (2013-2017). Sebelumnya, pernah menjabat Ketua Jurusan Dakwah STAIN Bengkulu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Humas di STAIN Bengkulu. Buku yang sudah diterbitkan adalah "Komunikasi Keluarga: Model Alternatif Komunikasi Suami-Istri". "Komunikasi dan Dakwah Kontemporer: Pendekatan Fenomenologi, Interaksionisme Simbolik, dan Dramaturgi". Serta yang ada di tangan Anda saat ini "Komunikasi Antarbudaya: Strategi Membangun Komunikasi Harmoni pada Masyarakat Multikultural".

Buku "Komunikasi Antarbudaya" ini diramu dari hasil penelitian dan artikel penulis, terdiri dari lima bagian. Satu tentang "Membangun Harmonisasi dalam Kemajemukan". Isinya lebih menekankan pada komunikasi masyarakat beda agama dalam membangun harmonisasi dan kerukunan hidup. Dua tentang "Dakwah di Tengah Masyarakat Multikultural". Di dalamnya menguraikan etika komunikasi dakwah pada masyarakat yang plural. Tiga tentang "Pemberdayaan Masyarakat Islam dengan Pendekatan Komunikasi Antarbudaya". Pada bagian ini menjelaskan strategi komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Empat tentang "Pendidikan Multikultural di Pesantren". Di dalamnya membahas komunikasi guru/ustadz kepada santri (peserta didik) dalam menanamkan nilai-nilai multikultural. Lima tentang "Komunikasi Politik Kyai dalam Pilkada". Materinya tentang komunikasi politik, keterlibatan Kyai dalam politik, dan politisi moralis. Kehadiran buku ini dapat menambah dan memperkaya literatur komunikasi antarbudaya di tanah air dan dapat menjadi bahan kajian dalam kegiatan penelitian selanjutnya.



PUSTAKA PELAJAR

Penerbit Pustaka Pelajar  
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167  
Telp. (0274) 381542, Faks (0274) 383083  
e-mail [pustakapelajar@yahoo.com](mailto:pustakapelajar@yahoo.com)  
website [pustakapelajar.co.id](http://pustakapelajar.co.id)

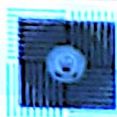
ISBN 978-602-229-792-5



9

786022

297926



IAIN BENGKULU PRESS

